

INDONESIA  
ECONOMIC  
QUARTERLY

Oktober 2013

# Penyesuaian berlanjut



THE WORLD BANK | BANK DUNIA

Sharing Development Solutions  
for an Emerging Indonesia

**PERKEMBANGAN TRIWULANAN  
PEREKONOMIAN INDONESIA**  
*Penyesuaian berlanjut*

Oktober 2013



**THE WORLD BANK | BANK DUNIA**  
Sharing Development Solutions  
for an Emerging Indonesia



## Kata Pengantar

Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia (*Indonesia Economic Quarterly/IEQ*) mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk menyajikan perkembangan utama perekonomian Indonesia dalam tiga bulan terakhir, dan menempatkan dalam konteks jangka panjang dan global. Berdasarkan perkembangan ini, serta perubahan kebijakan dalam periode tersebut, laporan ini menyediakan perkembangan terkini secara rutin tentang prospek perekonomian dan kesejahteraan sosial Indonesia. Kedua, laporan *IEQ* ini memberikan penilaian mendalam terhadap isu-isu ekonomi dan kebijakan tertentu, dan analisis terhadap tantangan pembangunan jangka menengah Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak luas termasuk pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan profesional yang terlibat dan mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia.

*IEQ* merupakan laporan Bank Dunia di Jakarta dan disusun oleh tim kebijakan makro dan fiskal, unit Pengentasan Kemiskinan dan Manajemen Ekonomi (*Poverty Reduction and Economic Management/PREM*), Bank Dunia Jakarta di bawah bimbingan Jim Brumby sebagai *Sector Manager* dan *Lead Economist*, Ndiame Diop sebagai *Economic Adviser* dan *Lead Economist* dan Ashley Taylor sebagai *Senior Economist*. Tim utama penyusun laporan ini dengan tanggung jawab di bagian A (perkembangan ekonomi dan fiskal terkini), pengeditan dan produksi adalah Arsianti, Magda Adriani, Brendan Coates, Fitria Fitriani, Ahya Ihsan, Shakira Jones, Alex Sienaert, Violeta Vulovic and Michele Savini Zangrandi. Dukungan administrasi diberikan oleh Titi Ananto dan Sylvia Njotomihardjo. Diseminasi dilakukan oleh Dini Sari Djalal, Farhana Asnap, Indra Irnawan, Jerry Kurniawan, Nugroho, Marcellinus Winata dan Randy Salim.

Edisi ini juga mencakup kontribusi dari Alex Sienaert (Bagian B.1 paket kebijakan pemerintah), Natalia Cubillos Salcedo dan Henry Sandee (Bagian B.2 *dwell time* peti kemas di Tanjung Priok), Ahya Ihsan dan Bill Wallace (Direktur, AIPEG) (Bagian C.1 investasi bidang infrastruktur), dan Samer Al-Samarrai (Bagian C.2. tata kelola pemerintah daerah dan kinerja pendidikan). Masukkan utama juga diterima dari Djauhari Sitorus, Pamitra Wineka dan The Fei Ming (sektor perbankan, kredit dan korporasi), Ririn Purnamasari dan Matthew Wai-Poi (BLSM dan angka kemiskinan terkini), Rubino Sugana (penerimaan publik), Mark Ahern, Enda Ginting dan Hari Purnomo (pelaksanaan anggaran), dan Yue Man Lee, Mattia Makovec, Arvind Nair, Sjamsu Rahardja, Connor Spreng dan Della Temenggung (paket kebijakan pemerintah), Wahyoe Soedarmono, Paul Lemaistre dan Jon Sariaatmadja (investasi bidang infrastruktur). Deepak Mishra, David Hawes dan Roland Rajah (AusAID), dan Bill Wallace (AIPEG) juga memberikan tambahan masukan yang penting. Dokumen ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Nicolas Novianto dan diedit oleh Magda Adriani, Arsianti, Fitria Fitriani, Ahya Ihsan, Soekarno Wirokartono, Petra Wiyakti Bodrogini dan Mohamad Adhi Prakorso Dipo.

Laporan ini disusun oleh para staf *International Bank for Reconstruction and Development* Bank Dunia, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia - AusAID melalui program *Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis* (SEMEFPA).

Temuan-temuan, interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan di dalam laporan ini tidak mencerminkan pandangan AusAID dan Pemerintah Australia, para Direktur Pelaksana Bank Dunia atau pemerintah yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin ketepatan data-data yang termuat dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi-informasi lain yang digambarkan pada setiap peta di dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Bank Dunia mengenai status hukum dari wilayah atau dukungan atau penerimaan dari batas-batas tersebut.

Foto sampul depan dan bagian dalam diambil oleh Josh Estey dan Ed Wrey, dan tim pendidikan Bank Dunia, dan merupakan Hak Cipta Bank Dunia. Semua Hak Cipta dilindungi.

### Untuk mendapatkan lebih banyak analisa Bank Dunia terhadap ekonomi Indonesia:

Untuk informasi mengenai Bank Dunia serta kegiatannya di Indonesia, silakan berkunjung ke website ini [www.worldbank.org/id](http://www.worldbank.org/id)

Untuk mendapatkan publikasi ini melalui e-mail, silakan menghubungi [madriani@worldbank.org](mailto:madriani@worldbank.org). Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini, silakan menghubungi [asienaert@worldbank.org](mailto:asienaert@worldbank.org).

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF: PENYESUAIAN BERLANJUT .....</b>	<b>I</b>
<b>A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL TERKINI.....</b>	<b>1</b>
1. Gejolak pasar internasional dengan meningkatnya biaya pendanaan eksternal.....	1
2. Ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus melambat di 2014.....	3
3. Defisit neraca transaksi berjalan Indonesia terus berlanjut walau terjadi perlambatan impor.....	9
4. Rupiah telah melemah dan kondisi pembiayaan mengetat .....	13
5. Inflasi telah meningkat karena kenaikan harga BBM bersubsidi .....	17
6. Risiko fiskal dari beban subsidi energi kembali meningkat .....	19
7. Penetapan kebijakan dan kemajuan reformasi yang berjalan dapat memainkan peran penting sejalan dengan penyesuaian neraca eksternal .....	24
<b>B. BEBERAPA PERKEMBANGAN TERKINI PEREKONOMIAN INDONESIA.....</b>	<b>26</b>
1. Paket kebijakan Pemerintah yang diumumkan pada bulan Agustus.....	26
a. Langkah-langkah untuk mendukung investasi asing langsung.....	27
b. Langkah-langkah memperbaiki defisit neraca berjalan dan menjaga stabilitas Rupiah.....	28
c. Langkah-langkah untuk mendukung ketenagakerjaan.....	28
d. Langkah-langkah untuk menurunkan inflasi .....	29
e. Menilai paket kebijakan .....	30
2. Meningkatkan konektivitas melalui peningkatan kinerja pelabuhan.....	31
a. Peningkatan kinerja pelabuhan: kunci untuk membuka perdagangan .....	31
b. Melawan dibawah tekanan untuk tetap melaju .....	33
c. Apa saja tantangan utamanya? .....	34
d. Sejumlah langkah-langkah penting telah diambil untuk mengatasi keadaan tersebut... ..	36
e. ...dan sejumlah upaya tindakan lebih lanjut telah diidentifikasi .....	36
<b>C. INDONESIA TAHUN 2014 DAN SELANJUTNYA: TINJAUAN PILIHAN.....</b>	<b>38</b>
1. Memperkirakan stok aset tetap infrastruktur di Indonesia.....	38
a. Investasi infrastruktur terhadap PDB telah menurun sejak 1997/98.....	39
b. Stok aset tetap infrastruktur Indonesia diperkirakan telah menurun dibandingkan total stok aset.....	40
c. ...mempengaruhi lintasan pertumbuhan Indonesia.....	42
2. Tata kelola pemerintah daerah dan kinerja pendidikan .....	45
a. Pentingnya tata kelola pendidikan daerah untuk meningkatkan kinerja.....	46
b. Survei Tata Kelola Pendidikan Daerah Indonesia (ILEG).....	46
c. Temuan utama dari survei ILEG .....	48
d. Tanpa penanganan kendala utama tata kelola, kinerja akan sulit meningkat.....	51
<b>LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA .....</b>	<b>52</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Biaya pendanaan internasional naik tajam sejak triwulan yang lalu...	2
Gambar 2: ...sementara harga komoditas, termasuk produk ekspor utama Indonesia, tetap tertekan	2
Gambar 3: Pertumbuhan PDB nominal turun tajam, sejalan dengan jatuhnya harga ekspor	4
Gambar 4: Sementara investasi pergedungan terus meningkat kuat, belanja investasi lainnya menurun tajam...	5
Gambar 5: ...namun lebih ketatnya kebijakan moneter tampaknya akan makin membebani investasi pergedungan	5
Gambar 6: Data historis menunjukkan bahwa pemilu nasional selalu mendorong peningkatan pertumbuhan konsumsi	6
Gambar 7: Volume ekspor semakin pulih, sementara impor masih tetap melemah	6
Gambar 8: Data frekuensi tinggi menunjukkan melemahnya permintaan konsumen...	7
Gambar 9: ...sementara impor modal telah lemah	7
Gambar 10: Pertumbuhan PDB riil diperkirakan akan melambat	7
Gambar 11: Defisit neraca berjalan melebar ke 9.8 miliar dolar AS pada triwulan dua, saat neraca barang defisit...	9
Gambar 12: ...dengan penurunan harga menghambat penerimaan ekspor komoditas, walau volume meningkat	9
Gambar 13: Impor barang-barang konsumen dan BBM mendorong naiknya impor agregat sebelum Ramadhan	10
Gambar 14: Aliran FDI tampaknya akan terpengaruh oleh melemahnya penerimaan komoditas	10
Gambar 15: Permintaan impor diperkirakan akan terus melambat sejalan dengan perlambatan pertumbuhan permintaan dalam negeri memasuki tahun 2014	11
Gambar 16: Kebutuhan pendanaan eksternal bruto tetap besar dan risiko likuiditas telah meningkat...	12
Gambar 17: Rupiah mencatat depresiasi yang signifikan secara nominal tetapi tidak secara riil sejak 2011...	13
Gambar 18: ...diikuti masalah likuiditas dolar AS, seperti ditunjukkan selisih <i>spread</i> antara dalam dan luar negeri	13
Gambar 19: Rendahnya persetujuan kredit baru menunjukkan perlambatan pertumbuhan kredit ke depan...	15
Gambar 20: ...sementara perlambatan pertumbuhan tabungan juga membebani kegiatan pinjaman	15
Gambar 21: Perusahaan Indonesia menghadapi peningkatan biaya pendanaan luar negeri	16
Gambar 22: Inflasi naik tajam pada awal kuartal 3 karena dorongan harga BBM dan bahan pangan...	17
Gambar 23: ...menyebabkan peningkatan kecil pada inflasi inti	17
Gambar 24: Inflasi inti kembali normal dengan cepat pasca naiknya harga BBM bersubsidi pada tahun 2005 dan 2008	18
Gambar 25: Harga sejumlah bahan pangan naik karena pembatasan perdagangan dan bulan Ramadhan...	18
Gambar 26: Inflasi <i>yoy</i> diproyeksikan mencapai puncaknya pada kuartal 4	19
Gambar 27: Perkiraan pertumbuhan PDB peka terhadap prospek investasi	25
Gambar 28: Indonesia tertinggal dari negara Asia lain dalam biaya dan kecepatan logistik...	32
Gambar 29: ...dan waktu tinggal peti kemas di pelabuhan terpenting, Tanjung Priok, terus meningkat	32
Gambar 30: Komponen waktu tinggal peti kemas dan pemangku kepentingan utama	33
Gambar 31: Proses impor di Tanjung Priok	34
Gambar 32: Tahap hulu menjadi tantangan utama bagi keseluruhan waktu tinggal peti kemas	35
Gambar 33: Ketidaksiuaian antara kedatangan peti kemas dan PIB menunjukkan tantangan sistem 24/7	35
Gambar 34: Tingkat investasi infrastruktur terhadap PDB telah turun kecuali pada pemerintah daerah	39
Gambar 35: Pertumbuhan riil stok aset keseluruhan jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan stok aset infrastruktur....	42

Gambar 36: ...mengakibatkan penurunan rasio stok aset infrastruktur dibanding jumlah keseluruhannya	42
Gambar 37: Investasi aset infrastruktur lebih besar terkait dengan lintasan pertumbuhan yang lebih tinggi	43
Gambar 38: Pemerintah daerah membiayai sebagian besar pendanaan bagi pendidikan dasar	46
Gambar 39: Kualitas tata kelola pendidikan daerah yang lebih tinggi berkaitan dengan kinerja pendidikan yang lebih baik	48
Gambar 40: Peningkatan kecil pada tata kelola pendidikan secara keseluruhan namun menunjukkan pergeseran yang besar pada beberapa dimensi	48
Gambar 41: Kapasitas daerah dalam mencatat dan melakukan sosialisasi praktik terbaik telah menurun	49
Gambar 42: Sejumlah aspek proses perencanaan dan penganggaran daerah telah meningkat	50

## DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR

Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB triwulanan dan tahunan	52
Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran	52
Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi	52
Lampiran Gambar 4: Penjualan sepeda motor dan mobil	52
Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen	52
Lampiran Gambar 6: Indikator industri penjualan	52
Lampiran Gambar 7: Arus perdagangan riil	53
Lampiran Gambar 8: Neraca pembayaran	53
Lampiran Gambar 9: Ekspor barang	53
Lampiran Gambar 10: Impor barang	53
Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus masuk modal	53
Lampiran Gambar 12: Inflasi dan kebijakan moneter	53
Lampiran Gambar 13: Rincian bulanan IHK	54
Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara	54
Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan internasional	54
Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran	54
Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional	54
Lampiran Gambar 18: Indeks dolar AS dan Nilai tukar rupiah	54
Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal	55
Lampiran Gambar 20: <i>Spread</i> obligasi dolar AS pemerintah EMBI	55
Lampiran Gambar 21: Pinjaman internasional perbankan komersial	55
Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan	55
Lampiran Gambar 23: Hutang pemerintah	55
Lampiran Gambar 24: Hutang luar negeri	55

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan melambat menjadi 5,3 persen pada tahun 2014	iii
Tabel 2: Menurut skenario <i>baseline</i> , pertumbuhan PDB diproyeksikan 5,6 persen untuk 2013 dan 5,3 persen untuk 2014	8
Tabel 3: ...dengan aliran masuk modal investasi sebagai kunci prospek keseluruhan neraca pembayaran, dimana defisit neraca berjalan akan menyusut secara perlahan	12
Tabel 4: Pertumbuhan penerimaan melambat pada periode Jan – Agu 2013 dibanding tahun-tahun yang lalu	20
Tabel 5: Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal 2,5 persen tahun 2013, naik dari 2,1 persen pada <i>IEQ</i> Juli 2013	22
Tabel 6: Depresiasi Rupiah atau kenaikan harga minyak sebesar 10 persen berdampak langsung terhadap defisit APBN setidaknya sebesar 0,4 poin persentase dari PDB	23
Tabel 7: Tingkat pertumbuhan stok aset infrastruktur peka terhadap asumsi tingkat awal stok aset infrastruktur dan tingkat depresiasi (penyusutan)	41

Tabel 8: Penelitian terpilih tentang perkiraan elastisitas perubahan output terhadap perubahan aset infrastruktur	43
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN TABEL

Lampiran Tabel 1: Realisasi dan anggaran belanja Pemerintah	56
Lampiran Tabel 2: Neraca Pembayaran	56
Lampiran Tabel 3: Sekilas tentang perkembangan indikator ekonomi makro Indonesia	57
Lampiran Tabel 4: Sekilas indikator pembangunan Indonesia	58

## DAFTAR KOTAK

Kotak 1: Perkembangan terkini tentang bantuan langsung tunai dan tingkat kemiskinan	21
Kotak 2: Dampak fiskal dari perubahan kurs tukar Rupiah dan harga minyak	23
Kotak 3: Sensitivitas pertumbuhan PDB terhadap investasi	25
Kotak 4: Catatan metodologi dalam menghitung stok aset infrastruktur di Indonesia	41
Kotak 5: Studi empiris tentang hubungan antara stok aset infrastruktur dan publik dan pertumbuhan	43
Kotak 6: Pengaruh dana hibah untuk pengembangan kapasitas yang diberikan kepada dinas pendidikan daerah	50

## Ringkasan eksekutif: Penyesuaian berlanjut



**Perekonomian Indonesia sedang mengalami penyesuaian yang cukup berarti, didorong oleh pelemahan neraca eksternal...**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang melambat, dibebani oleh dampak kumulatif dari pelemahan harga-harga komoditas utama yang telah berlangsung sejak tahun 2011 oleh pengetatan kondisi keuangan dalam dan luar negeri, dan oleh tantangan kebijakan. Bersamaan dengan itu, kebutuhan pendanaan eksternal telah meningkat, sebagian karena melebarnya defisit neraca berjalan. Laju penyesuaian perkembangan-perkembangan ini telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Bersama dengan perekonomian berkembang utama (*emerging market economies/EMEs*) lainnya, pasar keuangan Indonesia mencatat gejala yang cukup besar, dengan nilai tukar Rupiah yang mengalami depresiasi yang cukup besar terhadap dolar AS. Pengaturan kebijakan juga tanggap terhadap penyesuaian ini, misalnya dengan adanya pengetatan kebijakan moneter.

**...yang membawa perlambatan pertumbuhan dan peningkatan fokus terhadap kebijakan**

Berdasarkan berbagai perkembangan tersebut, proyeksi Bank Dunia untuk pertumbuhan Indonesia tahun 2014 telah diturunkan menjadi 5,3 persen – masih relatif kokoh, tetapi suatu penurunan yang cukup berarti dalam prospek ekonomi jangka pendek. Penyesuaian ekonomi yang sedang berlangsung saat ini juga membawa risiko-risiko penurunan laju pertumbuhan yang lebih besar, dan berlangsung lebih lama, dengan tidak adanya dukungan dari pendanaan internasional berbiaya rendah dan permintaan yang kuat terhadap komoditas. Hal ini menunjukkan pentingnya keberlanjutan penyesuaian kebijakan ekonomi makro, melanjutkan upaya yang sedang berjalan untuk meningkatkan daya saing dan laju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan memberikan perlindungan untuk kaum rentan dari dampak perlambatan pertumbuhan dan kejutan ekonomi dimasa depan.

**Gejolak pasar keuangan internasional telah menjadi perhatian, walau pertumbuhan dunia saat ini semakin mendukung...**

Beberapa bulan terakhir telah mencatat gejolak pasar keuangan internasional yang cukup berarti, yang dipicu oleh prospek normalisasi kebijakan moneter secara bertahap di Amerika Serikat. Aliran investasi portofolio dan biaya pendanaan hutang dan investasi di EMEs, termasuk Indonesia, mencatat reaksi yang secara tiba-tiba terhadap kenaikan tajam suku bunga AS. Pada saat bersamaan, dan merupakan salah satu kontributor terhadap gejolak pasar yang belakangan terjadi, adalah penguatan umum kinerja perekonomian maju dengan berlanjutnya proses pemulihan.

**...namun harga-harga komoditas utama tetap tertekan, kecuali minyak bumi ...**

Sebagian mencerminkan prospek perlambatan investasi dan pertumbuhan di China, harga-harga komoditas internasional pada umumnya tetap berada di bawah tekanan, dengan pengecualian utama harga minyak mentah dunia bagi Indonesia. Indeks harga dolar AS yang diboboti ekspor untuk enam komoditas ekspor utama Indonesia (yang mencapai hampir setengah dari seluruh jumlah ekspor) turun sebesar 8 persen pada tahun berjalan 2013 hingga akhir bulan Agustus, yang merupakan 35 persen lebih rendah dari nilai puncaknya setelah tahun 2008/09 di bulan Januari 2011. Harga minyak mentah Brent, sebaliknya, meningkat sebesar 7 persen dari bulan Januari 2011 ke Agustus 2013, dan umumnya mencatat pergerakan yang datar selama tahun 2013. Perbedaan antara harga energi dan non-energi dunia ini menjadi pendorong yang penting dari perlemahan neraca perdagangan Indonesia sejak tahun 2011, dan memberikan tekanan tambahan terhadap posisi fiskal Pemerintah.

**... yang membawa tantangan terhadap neraca eksternal Indonesia**

Pertumbuhan ekonomi global akan terus meningkat, dengan para mitra perdagangan utama Indonesia akan bertumbuh sebesar 3,4 persen pada 2013, sama dengan tingkat pada 2012 tetapi mencerminkan kenaikan pada paruh kedua 2013, dan naik menjadi 3,9 persen pada tahun 2014. Namun dalam proyeksi dasar, harga-harga komoditas diproyeksikan tidak bergerak menjadi lebih mendukung nilai tukar perdagangan (*terms of trade*) Indonesia. Lebih lanjut, dengan pasar keuangan dunia terus menyesuaikan diri terhadap dampak penurunan akomodasi moneter di negara maju, gejolak aliran modal, dan biaya pendanaan eksternal, tampaknya akan tetap bertahan tinggi, baik bagi Indonesia maupun EMEs lainnya. Penyesuaian ekonomi dan kebijakan Indonesia terhadap melemahnya neraca eksternal, yang kini sedang berlangsung, tampaknya akan tetap menjadi pusat perhatian.

**Pertumbuhan melambat di triwulan kedua, walaupun demikian Indonesia mencatat defisit neraca berjalan yang cukup lebar**

Pelemahan permintaan memainkan peran yang penting dalam menggerakkan neraca berjalan, dan kebutuhan pendanaan eksternal secara keseluruhan, seiring dengan kondisi-kondisi pendanaan eksternal yang lebih ketat. Ekonomi Indonesia telah melambat sejauh ini di tahun 2013, dengan pertumbuhan investasi menjadi penyebab utama. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua mencapai 5,8 persen, berada di bawah angka 6,0 persen untuk pertama kalinya sejak tahun 2010. Walau permintaan dalam negeri mulai melemah, faktor-faktor musiman, bersama-sama dengan berlanjutnya perlemahan dalam penerimaan ekspor, berkontribusi kepada pelebaran yang mengejutkan dalam defisit neraca berjalan triwulanan Indonesia menjadi 4,4 persen dari PDB. Data-data tersebut, dan reaksi-reaksi investor yang telah menyeimbangkan kembali portofolio mereka lebih condong kepada aset-aset perekonomian berpenghasilan tinggi, memberikan tekanan yang besar terhadap Rupiah menjelang akhir bulan Agustus. Tekanan itu berkontribusi terhadap keputusan Bank Indonesia untuk meningkatkan suku bunga lebih lanjut, sehingga kenaikan BI Rate sejak bulan Juni telah mencapai 150 basis poin, dan juga mengumumkan aturan kehati-hatian kebijakan makro (*macro-prudential*) tambahan untuk menurunkan pertumbuhan kredit dan kebijakan baru untuk mendukung likuiditas transaksi valas, yang telah berkurang.

**Pertumbuhan PDB diproyeksikan akan melambat dan defisit neraca berjalan akan sedikit menyempit pada tahun 2014...**

Sejalan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan mengalami perlambatan yang lebih besar menjadi 5,3 persen pada tahun 2014, turun dari 5,6 persen pada tahun 2013 (Tabel 1). Proyeksi ini menurun dibandingkan dengan proyeksi pada Triwulanan edisi bulan Juli 2013 dengan penurunan pertumbuhan menjadi 5,9 persen untuk 2013 dan naik menjadi 6,2 persen pada tahun 2014. Defisit neraca berjalan diproyeksikan akan tetap besar, walau dengan sedikit penyempitan, menjadi 2,6 persen dari PDB pada tahun 2014. Setelah didorong naik secara sementara oleh peningkatan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni, inflasi diperkirakan akan mencapai puncaknya secara tahunan pada triwulan terakhir tahun 2013, dan dengan tidak adanya kejutan dorongan biaya (*cost-push*) yang cukup berarti, inflasi akan turun ke rata-rata 6,7 persen *yo-y* pada 2014.

Tabel 1: Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan melambat menjadi 5,3 persen pada tahun 2014

		2011	2012	2013p	2014p
<b>PDB riil</b>	(Persen perubahan tahunan)	6,5	6,2	5,6	5,3
<b>Indeks harga konsumen</b>	(Persen perubahan tahunan)	5,4	4,3	7,3	6,7
<b>Defisit neraca berjalan</b>	(Persen dari PDB)	0,2	-2,8	-3,4	-2,6
<b>Defisit/surplus anggaran</b>	(Persen dari PDB)	-1,1	-1,9	-2,5	-2,3
<b>PDB mitra dagang utama</b>	(Persen perubahan tahunan)	3,6	3,4	3,4	3,9

Sumber: BI, BPS, Kementerian Keuangan, Proyeksi staf Bank Dunia

...tetapi risiko-risiko terhadap penurunan tetap tinggi ...

Risiko penurunan terhadap prospek ekonomi cukup besar. Risiko-risiko dalam negeri bersumber dari dampak yang lebih besar dari yang diperkirakan terhadap permintaan dalam negeri dari kenaikan harga-harga, suku bunga yang lebih tinggi, dan dampak negatif harga saham terhadap kegiatan investasi dan kekayaan korporasi, dan terutama gejolak kurs valuta yang tercatat sejak bulan Mei. Risiko-risiko eksternal terhadap prospek terpusat pada perkembangan harga komoditas bukan minyak, harga bahan bakar internasional dan situasi pendanaan eksternal. Sebagian besar juga bergantung pada perkembangan ekonomi China, permintaan akan investasi dan kualitas tanggapan kebijakan di negara maju maupun berkembang, dengan menyusutnya likuiditas global. Jika faktor-faktor tersebut menunjukkan perkembangan ke arah yang positif, dan kemungkinan pemulihan ekonomi global yang lebih baik dari yang diperkirakan sampai akhir 2014, dapat meningkatkan propek pertumbuhan Indonesia dan dapat mendukung posisi neraca eksternal, asalkan Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan menguatnya perdagangan global dan pergerakan investasi.

...menekankan pentingnya berkelanjutan fleksibilitas kebijakan ekonomi makro untuk memfasilitasi penyesuaian jangka pendek...

Pengaturan kebijakan fiskal dan moneter Indonesia akan terus memainkan peran utama dalam memfasilitasi penyesuaian yang sedang berlangsung dan meminimalkan risiko-risiko terkait. Namun terdapat pilihan yang sulit yang harus diambil (*trade-off*) antara tujuan meredam laju inflasi, mendorong pertumbuhan, dan menyesuaikan defisit neraca berjalan ke lingkungan pendanaan yang lebih ketat. Kebijakan moneter menghadapi tantangan dalam menyesuaikan suku bunga dan kurs tukar untuk memberi perlindungan terhadap peningkatan tekanan inflasi dengan meningkatnya tekanan biaya (seperti pengaruh lanjutan depresiasi kurs atau kenaikan upah) sementara memfasilitasi perbaikan neraca eksternal, tanpa terlalu menghambat pertumbuhan ekonomi dan perlemahan posisi neraca pemerintah dan swasta. Sejalan dengan sedang berlangsungnya pembahasan APBN 2014 dengan DPR, kebijakan fiskal menghadapi tantangan perlambatan pertumbuhan penerimaan dan peningkatan biaya pendanaan hutang nominal, yang semakin menekankan pentingnya upaya meningkatkan kualitas belanja dan penerimaan. Menjaga kehati-hatian posisi fiskal secara keseluruhan, terkoordinasi dengan pengetatan kebijakan moneter, dapat membantu menanggulangi tantangan ini. Bertolak dari kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni, reformasi lebih lanjut dari sistem subsidi energi yang tidak efisien dan distortif dapat memainkan peran penting dalam membebaskan belanja untuk pengeluaran pembangunan utama, seperti untuk infrastruktur dan kesehatan, dan juga membatasi timbulnya risiko fiskal yang besar dari gejolak kurs tukar valuta atau kejutan harga minyak dunia.

...menurunkan ketidakpastian melalui komunikasi dan perencanaan darurat...

Dengan adanya ketidakpastian dari perlambatan momentum pertumbuhan, dan kondisi pendanaan eksternal yang bergejolak dan umumnya mengetat, menjaga komunikasi yang kuat terhadap perubahan kebijakan dan menitikberatkan pada implementasi dapat membantu mendukung tingkat kepercayaan. Kebijakan juga memainkan peran untuk memitigasi dampak negatif skenario-skenario yang lebih buruk, jika risiko-risiko tersebut terjadi. Pemerintah telah berupaya meningkatkan kesiagaan krisisnya dalam beberapa tahun terakhir. Mekanisme pemantauan dan tanggapan sudah disiapkan untuk memfasilitasi tanggapan yang fleksibel terhadap gejolak pasar yang besar. Pemerintah memiliki dana fiskal darurat senilai 5 miliar dolar AS bila terjadi penurunan kondisi pembiayaan yang signifikan, sementara Bank Indonesia baru-baru ini telah mendapat tambahan pertukaran (*swap*) bilateral dalam dolar AS.

...dan terus mendorong kemajuan reformasi untuk meningkatkan laju pertumbuhan berkelanjutan Indonesia

Tekanan terhadap neraca eksternal dan pertumbuhan yang belakangan terjadi menjadi pengingat akan adanya kebutuhan bagi upaya lebih lanjut dalam meningkatkan keragaman (diversifikasi) ekspor Indonesia dan meningkatkan daya saing perekonomian untuk mendukung laju pertumbuhan dan pembangunan yang lebih cepat. Depresiasi Rupiah yang kini terjadi akan memberikan dorongan jangka pendek terhadap daya saing, namun dampaknya hanya akan bertahan bila tidak dipengaruhi oleh tekanan harga dalam negeri, seperti yang berasal dari kenaikan upah, dan jika kebijakan-kebijakan dan investasi ditempatkan untuk meningkatkan fleksibilitas dari sisi penawaran ekonomi. Dengan demikian upaya-upaya untuk meningkatkan daya saing dan lingkungan peraturan dapat membantu meringankan tekanan pendanaan eksternal jangka pendek dengan memberi stimulus kepada ekspor dan mendorong penanaman modal asing langsung (FDI) dan juga membantu meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Paket kebijakan Pemerintah yang diumumkan pada 23 Agustus berisi aturan yang bertujuan untuk mendukung ekspor dan investasi, namun implementasi akan menjadi kuncinya

Sebagai tanggapan terhadap meningkatnya tekanan pasar keuangan, dan bersamaan dengan tekanan kebijakan moneter yang disinggung sebelumnya, pada tanggal 23 Agustus 2013 Pemerintah mengumumkan suatu paket kebijakan yang berisi aturan-aturan yang bertujuan untuk memperbaiki neraca berjalan, menjaga daya beli dan memfasilitasi pertumbuhan, membatasi tekanan inflasi, dan menjaga aliran investasi. Sejumlah aturan termasuk pemberian usulan untuk meningkatkan kepastian dalam dunia usaha dan mencabut kebijakan-kebijakan perdagangan yang bersifat intervensionis. Namun rincian dan penerapan peraturan-peraturan itu, dan kontribusinya dalam mencapai penyesuaian yang dibutuhkan pada neraca eksternal, masih belum terlihat. Sementara kepentingan politis dalam penyusunan kebijakan menjelang pemilu tampaknya akan semakin meningkat, juga terdapat kesempatan bagi penguatan reformasi dalam jangka pendek, dengan adanya potensi biaya dan konsekuensi bila tidak melakukannya dengan kondisi perekonomian saat ini.

Dalam jangka pendek, peningkatan konektivitas internasional, seperti pada kinerja logistik pelabuhan Tanjung Priok, pintu gerbang utama Indonesia, dapat memberikan dorongan peningkatan daya saing

Upaya-upaya untuk meningkatkan konektivitas internasional Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing ekspor Indonesia dan mendorong investasi. Salah satu tantangan praktis utama untuk meningkatkan konektivitas internasional Indonesia adalah menurunkan waktu tunggu (*dwell time*) pada pelabuhan Indonesia yang paling utama, Tanjung Priok (yang menangani lebih dari dua per tiga perdagangan internasional Indonesia), yang telah meningkat hampir dua kali lipat bagi peti kemas yang tiba di pelabuhan itu sejak awal tahun 2011, menjadi rata-rata lebih dari sepuluh hari pada bulan Agustus. Sejumlah langkah-langkah penting telah diambil untuk mengatasi keadaan itu. Tambahan reformasi peraturan dan peningkatan prosedural dapat semakin menurunkan waktu proses hulu, misalnya dengan meningkatkan penggunaan jalur kepabeanan khusus dan proses kepabeanan secara paralel, dan juga memberikan insentif bagi penyerahan dini surat pemberitahuan impor barang dan meningkatkan kinerja sistem *Indonesian National Single Window*.

Tingkat dan kualitas belanja infrastruktur tetap menjadi penentu utama bagi kinerja perdagangan dan pertumbuhan jangka panjang

Seperti telah disadari oleh Pemerintah, perbaikan infrastruktur fisik dapat memecahkan salah satu kendala terhadap daya saing dan laju pertumbuhan Indonesia secara berkelanjutan. Infrastruktur yang lebih baik juga dapat meningkatkan hasil pembangunan, seperti di bidang kesehatan dan pendidikan, dengan meningkatkan aksesibilitas. Data terbaru yang dihimpun Bank Dunia menunjukkan bahwa tambahan investasi terhadap stok infrastruktur di Indonesia belum mencukupi sejak krisis keuangan Asia, menyebabkan stok infrastruktur menurun dibandingkan total stok investasi dan ekonomi. Dalam jangka waktu 2001-2011, simulasi awal menunjukkan bahwa jika pertumbuhan tahunan stok infrastruktur naik menjadi 5 persen, dibanding tingkat perkiraan aktual sebesar 3 persen, dapat meningkatkan pertumbuhan PDB tahunan rata-rata menjadi 5,8 persen, atau 0,5 persen di atas rata-rata aktual, sehingga nilai nominal PDB pada tahun 2011 lebih tinggi sebesar 5 persen. Sementara hasil tersebut peka terhadap asumsi-asumsi yang digunakan, mereka tetap menunjuk akan perlunya meningkatkan kuantitas dan kualitas investasi publik. Melanjutkan kenaikan alokasi anggaran infrastruktur dapat berperan, namun keberlanjutan fiskal dan persaingan untuk pendanaan program prioritas juga sangat menekankan pada efisiensi, termasuk memastikan kelancaran operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang ada, dan usaha selanjutnya meningkatkan pengelolaan investasi publik. Memperbaiki ketersediaan dan kualitas data di bidang ini yang dapat memberikan masukan untuk kebijakan juga sangat dibutuhkan.

**Kinerja pendidikan juga sangat penting bagi pembangunan, yang membutuhkan lebih banyak perbaikan dalam tata kelola pemerintahan daerah**

Hal penting lainnya bagi pertumbuhan, yang juga merupakan sasaran pembangunan utama, adalah modal manusia Indonesia – ilmu pengetahuan dan keahlian penduduknya. Dalam lima belas tahun terakhir, Indonesia telah meluncurkan paket reformasi pendidikan yang menyeluruh yang dirancang untuk meningkatkan akses dan kualitas. Komponen utama dari proses reformasi adalah pendelegasian kewenangan pendidikan dasar kepada pemerintah dan sekolah-sekolah di daerah, dan sehingga peningkatan dalam tata kelola dapat memainkan peran yang penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menjamin bahwa para murid dapat meninggalkan sekolah dengan bekal keterampilan yang memadai. Survei Tata Kelola Pendidikan Daerah di Indonesia (*Indonesian Local Education Governance/ILEG*), yang dilakukan pada tahun 2009 dan 2012, menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintah daerah merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan kinerja pendidikan di daerah, sehingga sangatlah penting untuk terus menangani kendala-kendala tata kelola utama, dan untuk meningkatkan koordinasi dan integrasi pendanaan pemerintah pusat kedalam perencanaan pendidikan daerah.

## A. Perkembangan ekonomi dan fiskal terkini



### 1. Gejolak pasar internasional dengan meningkatnya biaya pendanaan eksternal

**Gejolak pasar keuangan internasional telah mengemuka ...**

Gambaran eksternal bagi Indonesia, dan ekonomi pasar berkembang (*emerging market economics*, EME) lainnya, telah didominasi oleh gejolak pasar keuangan internasional, dan peningkatan biaya pendanaan eksternal, yang dipicu oleh prospek normalisasi bertahap kebijakan moneter di AS. Antara awal bulan Mei (dengan kuatnya spekulasi bahwa Bank Sentral AS akan memangkas program pembelian obligasinya) dan awal September (ketika dugaan pasar bahwa Bank Sentral AS akan mulai “mengurangi” pembeliannya pada bulan itu mencapai puncaknya), imbal hasil (*yield*) obligasi negara AS 10-tahun yang menjadi tolok ukur meningkat sebesar 135 basis poin, menjadi sedikit di bawah 3 persen, yang merupakan tingkat tertinggi sejak bulan Mei 2011. Sebagai tanggapannya, biaya pembiayaan utang dan ekuitas bagi EME, termasuk Indonesia, naik tajam (Gambar 1), dan aliran modal keluar mulai terlihat.

**...walau kondisi ekonomi negara-negara berpenghasilan tinggi mulai membaik...**

Perkembangan pasar juga mencerminkan berlanjutnya penguatan pertumbuhan pada perekonomian negara-negara berpenghasilan tinggi. Zona Eropa bangkit dari resesi panjangnya pada triwulan kedua, dan ekonomi Jepang dan AS meningkat dengan laju yang kokoh. Data triwulan ketiga menunjukkan bahwa keadaan positif itu terus berlanjut, dan peningkatan diperkirakan akan terus berlanjut, dengan perekonomian negara-negara berpenghasilan tinggi melanjutkan pemulihannya dari krisis keuangan dunia tahun 2008/09 dan dampak paska krisis tersebut. Pemulihan yang masih berlangsung ini dapat mendukung ekspor Indonesia, baik secara langsung (karena hampir sepertiga ekspor dikirimkan ke Zona Eropa, Jepang dan AS) dan secara tidak langsung, melalui pengaruh dari permintaan global dan harga ekspor Indonesia. Namun prospek dari mitra-mitra perdagangan Indonesia menunjukkan gambaran beragam.

...yang menambah gambaran beragam terhadap ekonomi negara-negara berkembang utama ...

Penjualan besar-besaran di pasar saham dan valuta lebih besar terjadi di negara EME yang membutuhkan pembiayaan neraca berjalan yang cukup besar, terutama Brasil, Turki, Afrika Selatan, India dan Indonesia. Namun sebagian dari tekanan jual yang dialami pasar-pasar berkembang hingga awal September dapat disebabkan oleh dampak harga dari mengecilnya perbedaan pertumbuhan antara ekonomi berpenghasilan tinggi dan berkembang, yang mencerminkan percepatan pertumbuhan pada ekonomi berpenghasilan tinggi seperti yang didiskusikan dan perlambatan pada ekonomi berkembang. Hal ini, bersama-sama dengan perkiraan akan semakin berkurangnya likuiditas global, memberikan gambaran kombinasi yang menantang bagi banyak EME, dan prospek mitra perdagangan utama Indonesia yang merupakan negara berkembang, memang beragam. China (yang menjadi tujuan dari sekitar 11 persen ekspor Indonesia, dan pendorong utama harga komoditas dunia) tampaknya berada pada jalur yang tepat untuk mencapai sasaran pertumbuhan resminya sebesar 7,5 persen pada tahun 2013, sedikit lebih rendah dari 7,8 persen pada tahun 2012, sementara pertumbuhan telah merosot secara signifikan di India (yang merupakan 7 persen dari jumlah ekspor Indonesia dan merupakan pasar utama bagi produk-produk ekspor tertentu, seperti batu bara dan minyak sawit).

...sementara harga-harga komoditas non-energi terus menurun

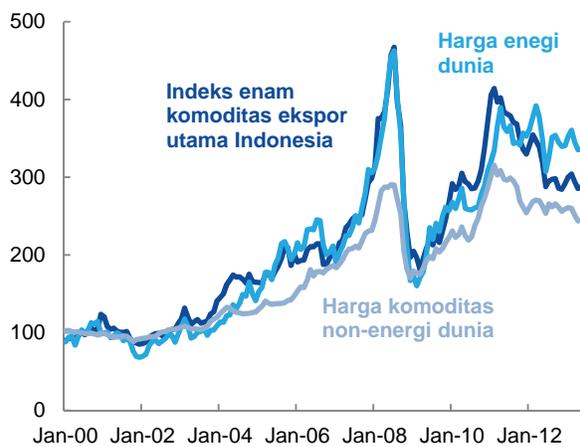
Secara umum harga-harga komoditas internasional telah melemah pada beberapa bulan terakhir, yang dipengaruhi oleh menguatnya nilai dolar AS, dengan pengecualian utama adalah harga minyak dunia (yang terpengaruh oleh kekhawatiran konflik di Syria). Indeks harga ekspor dalam dolar AS untuk enam komoditas ekspor utama Indonesia (yang merupakan hampir setengah dari seluruh jumlah ekspor) turun sebesar 8 persen pada tahun 2013 hingga akhir bulan Agustus, menjadi 35 persen lebih rendah dari puncaknya paska tahun 2008/09 yang terjadi pada bulan Januari 2011 (Gambar 2). Harga minyak mentah Brent, sebaliknya, naik sebesar 7 persen dari bulan Januari 2011 hingga Agustus 2013, dan relatif datar selama tahun berjalan. Perbedaan tren antara harga energi dan non-energi dunia sejak tahun 2011 ini sangat berbeda dari korelasi yang biasanya lebih dekat, dan merupakan satu aspek utama dari penurunan neraca perdagangan Indonesia secara signifikan sejak tahun 2011 (lihat Bagian 3), dan menambah tekanan fiskal dengan adanya pengeluaran untuk subsidi energi.

Gambar 1: Biaya pendanaan internasional naik tajam sejak triwulan yang lalu...  
(yield, persen)



Sumber: JP Morgan

Gambar 2: ...sementara harga komoditas, termasuk produk ekspor utama Indonesia, tetap tertekan  
(indeks harga dalam dolar AS, rata-rata tahun 2000 = 100)



Sumber: Bank Dunia dan perhitungan stafnya

**Pertumbuhan dunia diperkirakan akan semakin membaik, namun risiko tetap tinggi ditengah gejolak pasar keuangan dan peningkatan biaya pendanaan luar negeri**

Bank Dunia terus memperkirakan peningkatan ekonomi global, dengan peningkatan para mitra perdagangan utama Indonesia yang diproyeksikan akan tumbuh sebesar 3,4 persen pada tahun 2013, dan naik menjadi 3,9 persen pada tahun 2014, mendorong permintaan bagi ekspor Indonesia. Namun risiko-risiko terhadap prospek ekonomi internasional yang seringkali saling berkaitan masih terus bertahan, baik untuk kenaikan maupun penurunan. Sebagian besar bergantung pada perkembangan positif lintasan ekonomi-ekonomi negara berpenghasilan tinggi, prospek China, dan penghindaran dislokasi yang signifikan di negara-negara berpenghasilan tinggi dan berkembang dengan semakin menyusutnya likuiditas internasional. Dengan pasar keuangan yang terus menyesuaikan terhadap implikasi penurunan akomodasi moneter di AS, gejala investasi portofolio dan tingkat biaya pendanaan tampaknya akan tetap tinggi, bagi Indonesia maupun EME lainnya.

## 2. Ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus melambat di 2014

**Pertumbuhan ekonomi telah melambat sejauh ini pada tahun 2013 dan diperkirakan akan terus berlanjut**

Seerti dialami oleh banyak EME utama lainnya, ekonomi Indonesia telah melambat selama tahun 2013, karena terbebani oleh perlemahan momentum investasi. Pertumbuhan pada triwulan kedua mengalami penurunan menjadi 5,8 persen, tercatat pertama kali di bawah 6,0 persen sejak tahun 2010. Bank Dunia telah menurunkan proyeksi pertumbuhan PDB-nya untuk tahun 2013 menjadi 5,6 persen, turun dari proyeksi sebesar 5,9 persen pada Triwulanan edisi bulan Juli 2013, dan juga menurunkan proyeksi pertumbuhan tahun 2014 menjadi 5,3 persen dari 6,2 persen. Penurunan yang cukup besar untuk tahun 2014 mencerminkan prospek yang lebih lemah dari permintaan dalam negeri, dengan penyesuaian ekonomi terhadap lebih ketatnya kondisi pendanaan dan lebih rendahnya harga komoditas. Sementara harga ekspor, terutama bagi komoditas, diperkirakan akan tetap lemah, volume ekspor diperkirakan akan terus mencatat peningkatan yang tipis dengan semakin pulihnya laju pertumbuhan di negara-negara perekonomian maju. Pertumbuhan impor tampaknya akan terus menurun tipis, sejalan dengan prospek dari permintaan dalam negeri dan dampak (tertunda) dari depresiasi Rupiah. Karenanya, tidak seperti tahun 2012, ketika ekspor bersih menghambat pertumbuhan, kali ini ekspor bersih akan menambah pertumbuhan tahun 2013 dan 2014.

**Permintaan dalam negeri sedikit melambat pada triwulan kedua...**

Pertumbuhan PDB riil Indonesia melambat pada triwulan kedua tahun 2013, menjadi 5,8 persen *yoY* (*year on year*/tahun ke tahun) dibanding 6,0 persen *yoY* pada triwulan pertama. Pertumbuhan triwulanan setelah penyesuaian musiman sebesar 1,4 persen sedikit lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan pertama sebesar 1,3 persen. Pada sisi pengeluaran, penurunan pertumbuhan investasi yang berkelanjutan merupakan pendorong utama moderasi *yoY*, walau terdapat beberapa kontribusi yang berasal dari konsumsi, dengan pertumbuhan permintaan secara keseluruhan melemah menjadi 4,7 persen *yoY*, dari 5,0 persen *yoY* pada triwulan pertama. Ekspor bersih dapat mengimbangi sebagian moderasi yang tercatat pada permintaan dalam negeri, dengan memberi tambahan kepada pertumbuhan di triwulan pertama tahun 2013, karena pertumbuhan volume ekspor terus meningkat dan melebihi peningkatan yang dicatat oleh impor.

...dan pertumbuhan PDB nominal tetap lemah, sejalan dengan rendahnya nilai tukar perdagangan

Hal yang lebih nyata adalah berlanjutnya penurunan pertumbuhan PDB nominal menjadi 7,8 persen *yyo* pada triwulan kedua, yang turun dari 8,6 persen pada triwulan pertama dan merupakan tingkat pertumbuhan *yyo* yang paling rendah selama lebih dari tiga belas tahun (Gambar 3). Hal ini umumnya terjadi karena penurunan deflator PDB umumnya sejalan dengan penurunan yang tajam dalam nilai tukar perdagangan (*terms of trade*) Indonesia sejak tahun 2011 dengan melemahnya komoditas dunia. Deflator PDB tumbuh hanya 0,3 persen *qoq* (triwulan-ke-triwulan) dengan penyesuaian musiman dan 1,8 persen *yyo* pada triwulan kedua, cukup jauh di bawah inflasi harga konsumen. Dengan harga komoditas dunia dan nominal nilai tukar Rupiah yang diperkirakan tidak akan menguat dalam skenario dasar, maka nilai tukar perdagangan, deflator PDB dan pertumbuhan PDB nominal tampaknya juga akan tetap lemah dalam jangka pendek. Kejutan negatif nilai tukar perdagangan, yang dampaknya terus berlangsung terhadap perekonomian sejak akhir 2011, akan terus membawa implikasi negatif yang signifikan bagi pertumbuhan penerimaan dan profitabilitas, terutama pada sektor-sektor dan wilayah yang berkaitan dengan komoditas.

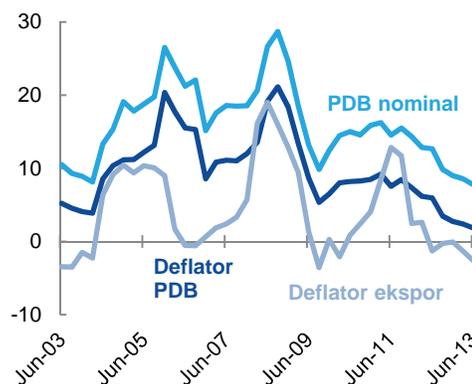
Pertumbuhan investasi terus melambat, seiring dengan penurunan yang signifikan dalam kegiatan yang berkaitan dengan komoditas

Pertumbuhan investasi yang lebih lemah merupakan pendorong utama perlambatan pertumbuhan PDB riil. Secara *yyo*, pertumbuhan investasi mengalami moderasi menjadi 4.7 persen pada triwulan tersebut, turun dari 5,8 persen pada triwulan pertama dan 12,5 persen satu tahun yang lalu (triwulan kedua tahun 2012). Ada beberapa peningkatan dalam laju pertumbuhan triwulanan (menjadi 2,4 persen *qoq* dengan penyesuaian musiman), walau sulit untuk menarik kesimpulan dari pergerakan triwulanan karena sifat investasi yang besar (*lumpy*). Hingga saat ini sebagian besar perlemahan pertumbuhan investasi terjadi pada pemessinan dan transportasi (Gambar 4), seperti tercermin dari penurunan impor barang-barang modal. Hal ini bersamaan dengan penurunan yang signifikan pada kegiatan yang berkaitan dengan komoditas, terutama secara nominal, yang menempatkan tekanan turun bagi penerimaan ekspor dan profitabilitas, yang membawa pengaruh terhadap penurunan investasi dan produksi. Sebaliknya, pertumbuhan investasi gedung riil (85 persen dari jumlah investasi) tetap kokoh namun dapat mendapat tekanan tambahan kedepannya.

...dan investasi diperkirakan akan semakin melemah, dengan pengetatan kondisi kredit diperkirakan akan membebani investasi pergedungan

Prospek investasi telah melemah sejak Triwulanan edisi bulan Juli. Biaya sejumlah faktor produksi (*input*) utama telah meningkat secara signifikan. Depresiasi Rupiah telah menyebabkan kenaikan biaya impor, bagi barang-barang modal dan bahan bakar, dan upah minimum juga mencatat peningkatan yang besar. Seperti dibahas di bawah, kondisi pendanaan dalam negeri telah mengetat dan, bagi perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan komoditas, cakupan pendanaan internal melalui laba yang ditahan perusahaan (*retained earnings*) telah dipengaruhi oleh penurunan harga-harga komoditas. Sejalan dengan pengalaman historis, kebijakan moneter yang lebih ketat diperkirakan akan memperkecil kredit dan investasi, memberikan tekanan terhadap investasi, termasuk investasi terkait pembangunan gedung (Gambar 5). Dengan pengalaman masa lalu yang menunjukkan pengaruh peningkatan suku bunga terhadap kegiatan ekonomi baru terlihat beberapa triwulan kemudian, maka dampak negatif terhadap kegiatan ekonomi, terutama investasi, akan paling banyak terjadi menjelang akhir tahun 2013 dan memasuki tahun 2014. Dengan adanya risiko investasi yang signifikan, seperti semakin ketatnya kondisi pendanaan ditambah dengan perubahan atau ketidakpastian peraturan perundangan, terutama dengan semakin tingginya tekanan siklus politik menjelang pemilu nasional, Kotak 3 menyoroti tingginya sensitivitas prospek pertumbuhan PDB untuk tahun 2014 terhadap lintasan investasi.

Gambar 3: Pertumbuhan PDB nominal turun tajam, sejalan dengan jatuhnya harga ekspor (pertumbuhan *yyo*, persen)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 4: Sementara investasi pergedungan terus meningkat kuat, belanja investasi lainnya menurun tajam... (pertumbuhan investasi *yoq*, persen)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 5: ...namun lebih ketatnya kebijakan moneter tampaknya akan makin membebani investasi pergedungan (pertumbuhan investasi pergedungan nominal dan kredit *yoq*, persen)



Catatan: Siklus pengetatan moneter mencerminkan periode BI Rate meningkat (BI Rate, 2005-13; suku bunga SBI 30 hari, 2001-04)  
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

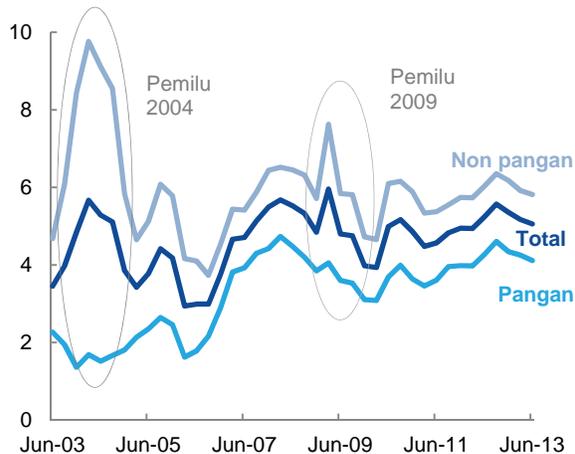
**Prospek pertumbuhan konsumsi swasta juga melemah dengan naiknya harga BBM, tetap tingginya harga bahan pangan dan penurunan tingkat kepercayaan konsumen**

Prospek pertumbuhan konsumsi juga telah menurun. Pertumbuhan konsumsi swasta sedikit meningkat pada triwulan kedua, naik menjadi 5,1 persen *yoq*. Peningkatan secara berurutan ini (sebesar 1,3 persen *qoq* dengan penyesuaian musiman) mencerminkan penguatan pada konsumsi bahan pangan (yang naik 1,0 persen *qoq* dengan penyesuaian musiman) dan bukan pangan (naik 1,5 persen *qoq* dengan penyesuaian musiman), yang keduanya menerima dampak penurunan pada triwulan pertama dari peningkatan tajam harga bahan pangan, yang sebagian besar kini telah mencatat penurunan harga (lihat Bagian 5). Pertumbuhan konsumsi diperkirakan akan melambat pada triwulan ketiga, dengan harga BBM yang lebih tinggi dan tetap tingginya harga-harga sejumlah bahan pangan utama pada triwulan kedua dan ketiga diperkirakan akan membawa pengaruh negatif terhadap daya beli konsumen. Perkembangan ini mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen, dengan turunnya indeks kepercayaan konsumen BI pada bulan Juli and Agustus, memangkas peningkatan yang telah tercatat selama 18 bulan terakhir. Tingginya suku bunga, ketatnya kondisi kredit, rendahnya tingkat kepercayaan, dan dampak terhadap kekayaan/aset dari gejolak pasar keuangan yang belakangan terjadi juga akan mempengaruhi konsumsi swasta. Namun belanja menjelang pemilu wakil rakyat dan presiden pada tahun 2014 akan membawa sejumlah pengaruh pengimbang bagi pertumbuhan konsumsi menjelang akhir tahun 2013 dan memasuki tahun 2014 (Gambar 6).

**Ekspor bersih diperkirakan akan berkontribusi pertumbuhan tahun 2013 dan 2014, setelah mengurangi pertumbuhan selama tahun 2012**

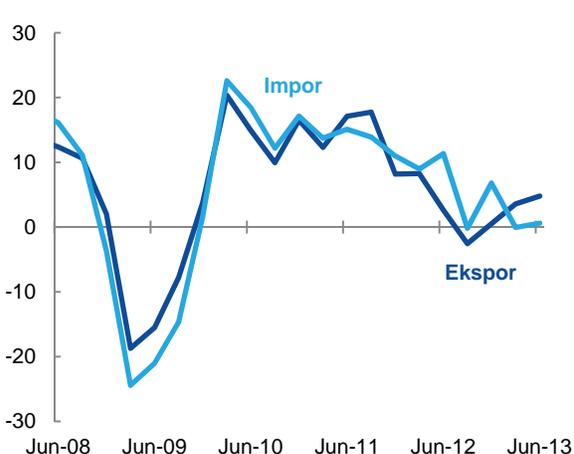
Setelah menjadi penghambat pertumbuhan selama sebagian besar tahun 2012, ekspor bersih telah menambah terhadap pertumbuhan *yoq* pada dua triwulan terakhir, dengan pertumbuhan ekspor yang melebihi impor (Gambar 7). Ekspor riil mencatat pertumbuhan yang positif, walaupun lemah, pada triwulan kedua (seperti terukur oleh neraca nasional), dengan peningkatan sebesar 0,8 persen *qoq* dengan penyesuaian musiman dan 4,8 persen *yoq*. Impor kembali pulih pada triwulan ini, meningkat 3,7 persen *qoq* dengan penyesuaian musiman namun hanya mencatat peningkatan tipis sebesar 0,6 persen *yoq* pada triwulan kedua. Dalam skenario dasar, ekspor bersih diperkirakan akan menambah terhadap pertumbuhan tahun 2013 dan 2014 dengan volume ekspor diperkirakan akan mencatat sedikit pemulihan, sejalan dengan menguatnya permintaan dari negara berpenghasilan tinggi dan volume impor diperkirakan akan tetap lemah sejalan dengan permintaan dalam negeri.

**Gambar 6: Data historis menunjukkan bahwa pemilu nasional selalu mendorong peningkatan pertumbuhan konsumsi**  
(*pertumbuhan konsumsi yoy, persen*)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 7: Volume ekspor semakin pulih, sementara impor masih tetap melemah**  
(*pertumbuhan volume ekspor dan impor yoy, persen*)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Pada sisi produksi, sebagian besar moderasi pertumbuhan didorong oleh sektor industri, terutama pertambangan dan penggalian...**

Pada sisi produksi, moderasi pertumbuhan yoy pada triwulan kedua bersifat luas, dengan dampak terbesar kepada keseluruhan ekonomi yang berasal dari sektor pertanian dan industri. Kegiatan pertambangan dan penggalian tetaplah lemah, dengan kontraksi sebesar 1,2 persen yoy, dan migas turun sebesar 4,7 persen yoy. Sektor-sektor industri lainnya umumnya mencatat kinerja yang kokoh, seperti manufaktur (naik 5,8 persen yoy) dan konstruksi (naik 6,9 persen yoy). Sebagian besar sektor jasa terus mencatat kinerja yang baik, dengan transportasi dan komunikasi meningkat 11,5 persen yoy dan perdagangan, hotel dan restoran naik sebesar 6,5 persen yoy, walaupun lebih rendah dibanding pertumbuhan sebesar 10 persen yang dicatat menjelang akhir tahun 2011.

**...dan dalam skenario dasar, perlambatan yang luas lintas sektor diperkirakan terus berlanjut ...**

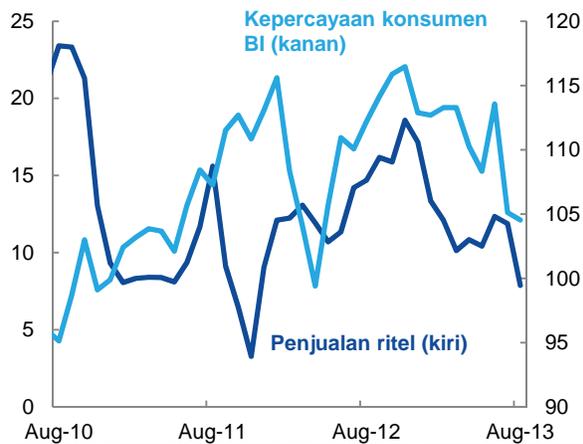
Prospek ke depan diperkirakan pertumbuhan yang lebih lemah di sebagian besar sektor karena pengetatan kondisi kredit dan harga komoditas global yang tetap lemah. Kinerja manufaktur yang terkait dengan non-komoditas tampaknya akan bercampur, dengan sub-sektor berorientasi ekspor yang didukung oleh peningkatan pertumbuhan dunia dan depresiasi Rupiah. Namun dengan sejumlah industri manufaktur Indonesia yang bergantung pada faktor produksi (*input*) dari impor, perlemahan kurs tukar akan meningkatkan sejumlah biaya *input*, sehingga akan menghambat sejumlah kegiatan.

**...seperti yang diperlihatkan oleh sejumlah indikator kegiatan ekonomi frekuensi tinggi**

Indikator-indikator dengan frekuensi yang tinggi pada bulan Juli dan Agustus menunjukkan bahwa moderasi pertumbuhan akan terus berlanjut, walau masa Ramadan memperumit interpretasi dari data-data tersebut. Indikator pertumbuhan konsumsi sejalan dengan perlemahan pada triwulan ketiga, dengan turunnya kepercayaan konsumen secara signifikan, dan penjualan sepeda motor, mobil dan ritel juga menunjukkan sejumlah perlemahan pada bulan Juli dan Agustus (Gambar 8). Pertumbuhan produksi industri tetap lemah, hanya sebesar 3,2 persen yoy pada bulan Juli. Penjualan semen, indikator utama investasi pergedungan, juga melemah. Impor barang modal bulanan, komponen investasi yang penting, tetap lemah selama bulan Agustus setelah penyesuaian musiman (Gambar 9).

**Gambar 8: Data frekuensi tinggi menunjukkan melemahnya permintaan konsumen...**

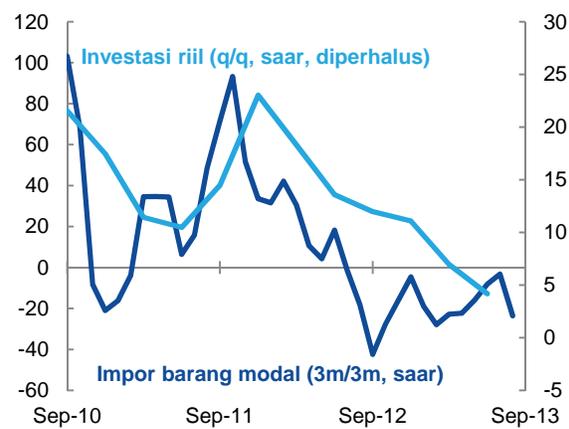
(indeks penjualan ritel, pertumbuhan dalam rata-rata bergerak 3-bulanan yoy, dan indeks kepercayaan konsumen BI, rata-rata tahun 2010=100)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 9: ...sementara impor modal telah lemah**

(perubahan, tingkat penyesuaian musiman disetabunkan, persen)



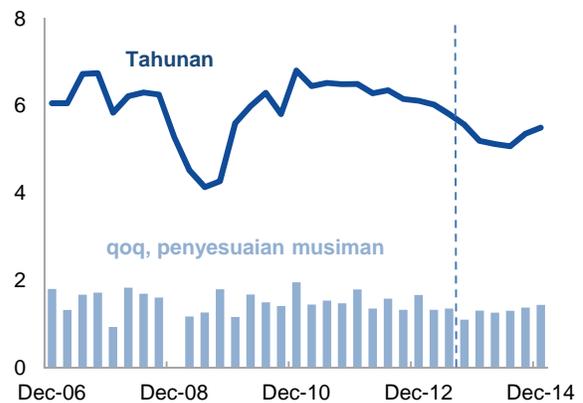
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Pertumbuhan PDB diperkirakan sebesar 5,6 persen untuk tahun 2013 dan 5,3 persen tahun 2014**

Proyeksi Bank Dunia untuk pertumbuhan PDB adalah 5,6 persen untuk tahun 2013 dan 5,3 persen untuk 2014 (Gambar 10). Penurunan yang cukup besar untuk proyeksi tahun 2014, dari 6,2 persen seperti disebut pada *IEQ* edisi bulan Juli, sebagian besar mencerminkan prospek yang lebih lemah atas permintaan domestik dengan ekonomi terus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah tekanan. Penyesuaian yang diperlukan terhadap permintaan dalam negeri akan bergantung pada pelaksanaan sejumlah faktor dan kebijakan tanggapan yang berkaitan, seperti yang dibahas lebih jauh di bawah ini.

**Gambar 10: Pertumbuhan PDB riil diperkirakan akan melambat**

(pertumbuhan PDB riil, persen)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Tabel 2: Menurut skenario *baseline*, pertumbuhan PDB diproyeksikan 5,6 persen untuk 2013 dan 5,3 persen untuk 2014 (persentase perubahan, kecuali dinyatakan lain)

	Tahunan			Tahun berjalan ke triwulan Desember			Revisi Tahunan	
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2013	2014
<b>1. Indikator ekonomi utama</b>								
Jumlah pengeluaran konsumsi	4,8	5,0	5,1	3,9	5,6	4,8	0,1	-0,5
Pengeluaran konsumsi swasta	5,3	4,8	5,1	5,4	4,7	5,0	-0,1	-0,5
Konsumsi pemerintah	1,2	6,1	4,5	-3,3	10,1	4,1	1,7	-0,3
Pembentukan modal tetap bruto	9,8	5,3	4,9	7,3	4,9	4,9	0,9	-1,2
Ekspor barang dan jasa	2,0	5,6	5,7	0,5	6,1	6,7	-0,2	-0,4
Impor barang dan jasa	6,6	2,4	4,5	6,8	-0,1	4,9	1,4	-0,7
<b>Produk domestik bruto</b>	<b>6,2</b>	<b>5,6</b>	<b>5,3</b>	<b>6,1</b>	<b>5,2</b>	<b>5,5</b>	-0,2	-0,9
Pertanian	4,0	3,4	2,4	2,0	4,5	2,6	-0,8	-0,7
Industri	5,2	4,3	4,1	5,4	3,5	4,4	-0,2	-1,0
Jasa-jasa	7,7	7,3	7,0	7,6	6,7	7,0	-0,2	-1,0
<b>2. Indikator eksternal</b>								
Neraca pembayaran (miliar AS\$)	0,2	-15,4	-4,0	n/a	n/a	n/a	-10,6	-9,2
Saldo neraca berjalan (miliar AS\$)	-24,4	-29,2	-22,1	n/a	n/a	n/a	-4,0	0,1
Neraca perdagangan (miliar AS\$)	-1,7	-7,9	-1,0	n/a	n/a	n/a	-2,9	-0,4
Saldo neraca keuangan (miliar AS\$)	25,1	15,1	18,1	n/a	n/a	n/a	-5,4	-9,3
<b>3. Pengukuran ekonomi lainnya</b>								
Indeks harga konsumen	4,3	7,3	6,7	4,3	9,8	4,4	0,1	0,0
IHK keranjang kemiskinan	6,5	7,2	6,3	5,4	8,3	5,9	-0,2	-1,6
Deflator PDB	4,6	2,6	4,2	2,7	3,3	4,7	-1,7	-2,0
PDB nominal	11,0	8,4	9,7	9,0	8,6	10,4	-2,1	-3,1
<b>4. Asumsi ekonomi</b>								
Kurs tukar (Rp/dolar AS)	9419	10400	11400	9630	11400	11400	650,0	1700,0
Harga minyak mentah Indonesia (dolar AS/barel)	113	106	105	108	110	105	0,0	0,0
Pertumbuhan mitra dagang utama	3,4	3,4	3,9	3,1	4,0	4,0	0,0	-0,1

Catatan: Proyeksi aliran perdagangan berkaitan dengan neraca nasional. Kurs tukar adalah asumsi dari rata-rata terakhir. Revisi relatif dibanding proyeksi pada Triwulanan edisi bulan Juli 2013

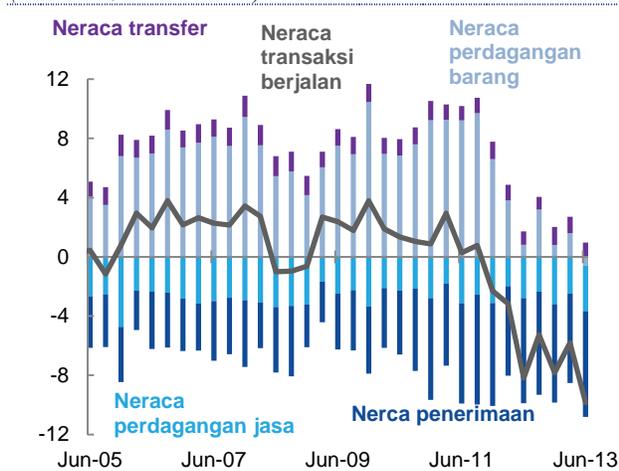
Sumber: Kemenkeu; BPS; BI; CEIC; proyeksi Bank Dunia

### 3. Defisit neraca transaksi berjalan Indonesia terus berlanjut walau terjadi perlambatan impor

**Defisit neraca transaksi berjalan Indonesia melebar ke 4,4 persen terhadap PDB di triwulan kedua 2013 akibat tekanan musiman dan pengaruh harga yang mendominasi pemulihan dalam volume ekspor**

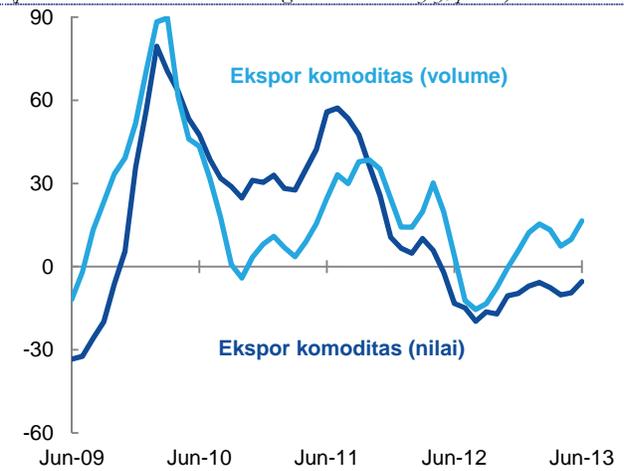
Walau terdapat tanda-tanda perlambatan pertumbuhan pada triwulan kedua, defisit neraca transaksi berjalan Indonesia melebar menjadi 9.8 miliar dolar AS pada triwulan kedua (Gambar 11), atau 4,4 persen terhadap PDB, dari 5,8 miliar dolar AS (2,6 persen dari PDB) di triwulan pertama. Ini merupakan nilai defisit triwulanan terbesar yang pernah tercatat. Saldo neraca berjalan umumnya menunjukkan penurunan musiman pada triwulan kedua, dengan permintaan impor dan jasa hutang perusahaan swasta, dan aliran keluar modal repatriasi keuntungan pada sub-neraca penerimaan yang cenderung naik. Perlemahan musiman tahun ini diperkuat dengan waktu jatuhnya bulan Ramadhan, yang membangkitkan kembali impor non-migas. Selain itu, perlemahan yang terus dialami harga-harga komoditas ekspor utama Indonesia memangkas peningkatan volumenya (Gambar 12), yang akibatnya menekan penerimaan ekspor barang-barang non-migas menjadi 4,9 persen *yoy* berdasarkan rata-rata bergerak 3 bulanan (*3mma*) di bulan Agustus. Rata-rata surplus perdagangan komoditas 12 bulan kini menurun dari 5,5 miliar dolar AS pada bulan Juni 2011 menjadi 3,4 miliar dolar AS di bulan Juni 2013, seperti disebutkan oleh data perdagangan bulanan BPS.

**Gambar 11: Defisit neraca berjalan melebar ke 9.8 miliar dolar AS pada triwulan dua, saat neraca barang defisit...**  
(saldo neraca, miliar dolar AS)



Sumber: BI

**Gambar 12: ...dengan penurunan harga menghambat penerimaan ekspor komoditas, walau volume meningkat**  
(pertumbuhan dalam rata-rata bergerak 3 bulanan *yoy*, persen)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

**Permintaan impor naik mendekati Ramadhan, namun dalam periode yang lebih panjang, telah melambat selama 2013**

Impor barang-barang di bulan Juli hanya turun sebesar 0,8 persen *yoy* secara *3mma* karena kenaikan permintaan sebelum Ramadhan, namun kembali turun pada bulan Agustus dengan penurunan sebesar 1,7 persen *yoy 3mma* (Gambar 13). Keseluruhan impor didorong oleh kenaikan tajam impor BBM, yang naik sebesar 20,2 persen *3mma* pada bulan Agustus, dan barang-barang konsumsi, yang naik sebesar 6,3 persen *yoy 3mma* pada periode yang sama. Namun impor barang setengah jadi non-bahan bakar (sekitar 52 persen dari jumlah impor), dan terutama barang modal (sekitar 18 persen dari jumlah impor) tetap lemah.

**Defisit perdagangan migas tetap menjadi tantangan utama**

Neraca perdagangan migas bulanan Indonesia sudah mengalami defisit sejak bulan Agustus 2012, dan terus menjadi penghambat besar bagi keseluruhan neraca perdagangan. Defisit perdagangan migas mencapai 2,4 miliar dolar AS pada triwulan kedua (mengecil dari 3,4 miliar dolar AS pada triwulan pertama), dan secara beruntun melebar dengan cukup tajam ke 1,9 miliar dolar AS hanya di bulan Juli (hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman, karena di bulan Agustus defisit menyempit menjadi 0,9 miliar dolar AS). Produksi minyak mentah dalam negeri terus menyusut, menjadikan neraca minyak mentah memasuki zona defisit. Sementara, terbatasnya kapasitas penyulingan minyak di dalam negeri mendorong defisit perdagangan pengolahan minyak mencapai 5,4 miliar dolar AS pada triwulan kedua, walau turun dari 6,2 miliar dolar AS pada triwulan pertama, berdasarkan laporan BPS.

**Gambar 13: Impor barang-barang konsumen dan BBM mendorong naiknya impor agregat sebelum Ramadhan**  
(rata-rata bergerak pertumbuhan nilai impor 3 bulanan yoy, persen)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 14: Aliran FDI tampaknya akan terpengaruh oleh melemahnya penerimaan komoditas**  
(pertumbuhan rata-rata bergerak dalam 4 triwulan aliran masuk FDI yoy, persen, indeks tertimbang harga komoditas ekspor Indonesia)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

**Indonesia terus bergantung pada aliran masuk modal portofolio dan lainnya untuk membiayai defisit neraca berjalan...**

Aliran masuk neraca modal dan finansial meningkat menjadi 8,2 miliar dolar AS di triwulan kedua dari defisit sebesar 0,3 miliar dolar AS di triwulan pertama. Akan tetapi, surplus aliran masuk modal tidak cukup untuk mengimbangi aliran keluar dari neraca berjalan, sehingga cadangan devisa mengalami penurunan sebesar 2,5 miliar dolar AS selama triwulan itu. Defisit neraca dasar (*basic balance*) Indonesia, yang merupakan penjumlahan dari neraca transaksi berjalan dan aliran masuk penanaman modal langsung, meningkat menjadi 6,5 miliar di triwulan kedua, dari 1,9 miliar dolar AS di triwulan akhir tahun 2012. Hal ini menambah ketergantungan pembiayaan pada investasi portofolio (yang mencapai 2,5 miliar dolar AS di triwulan kedua) dan pada aliran masuk modal investasi lainnya (sebesar 2,3 miliar dolar AS). Aliran masuk investasi portofolio termasuk 3,0 miliar dolar AS dari penerbitan obligasi negara global, yang mengimbangi aliran keluar modal bersih yang signifikan dari obligasi dan saham dalam negeri Indonesia. Surplus dari investasi lainnya di triwulan kedua merupakan perubahan dari defisit sebesar 7 miliar dolar AS di triwulan pertama, yang berasal dari kuatnya aliran masuk modal untuk tabungan dan valas (sebesar 4,6 miliar dolar AS), yang sebagian mencerminkan kuatnya permintaan musiman valuta asing dari para nasabah bank untuk memenuhi hutang luar negeri dan repatriasi keuntungan, yang mendorong bank-bank untuk melakukan repatriasi tabungan di dalam negeri.

**...sementara aliran masuk PMA secara umum tetap stabil**

Aliran masuk penanaman modal asing langsung sebesar (PMA) sebesar 3,3 miliar dolar AS pada triwulan kedua, menurun dari 3,9 miliar dolar AS pada triwulan pertama, karena lebih kuatnya aliran investasi langsung yang mengalir keluar negeri. Aliran masuk penanaman modal langsung ke dalam negeri, seperti diukur oleh neraca pembayaran, tetap bertahan stabil pada 4,2 miliar dolar AS (naik tipis dari 4,1 miliar di triwulan pertama), namun turun dari nilai rata-ratanya yang sedikit di bawah 5 miliar dolar AS yang tercatat pada tahun 2011 dan 2012, masa ketika aliran masuk modal naik dengan cepat. Walau terjadi peningkatan diversifikasi sektoral dari aliran masuk PMA di triwulan dua, pola aliran masuk PMA secara keseluruhan berhubungan erat dengan pola pergerakan harga-harga komoditas dunia, yang tampaknya mencerminkan penyaluran penerimaan yang terkait dengan penerimaan kepada investasi pada sektor-sektor ekonomi lainnya di Indonesia (Gambar 14). Sebagai akibatnya, harga-harga komoditas dunia bersama-sama dengan ketidakpastian kebijakan dan politik menjelang pemilu tahun 2014, membawa risiko terhadap prospek aliran masuk PMA.

**Perkembangan ekonomi dan penyesuaian kebijakan akhir-akhir ini mendukung penurunan tipis defisit neraca transaksi berjalan...**

Dengan berlanjutnya perlambatan pertumbuhan sampai dengan 2014, diharapkan terjadi perlambatan impor yang mungkin cukup tipis yang dapat mendukung memperkecilnya defisit neraca transaksi berjalan. Hal ini terutama pada impor modal dan impor barang setengah jadi, yang selama beberapa waktu ini telah mengalami penurunan sejalan dengan melambatnya investasi yang telah terlihat sejak pertengahan tahun 2012 (Gambar 15). Seperti disoroti di atas, impor BBM terus membebani neraca perdagangan. Peningkatan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni diharapkan mampu memberikan sejumlah keringanan dengan melemahkan permintaan impor BBM, sehingga menurunkan defisit neraca berjalan pada kisaran 0,1 hingga 0,2 poin persentase terhadap PDB (berdasar perkiraan pada Triwulanan edisi bulan Juli 2013). Tajamnya depresiasi nominal Rupiah yang belakangan terjadi – dengan penurunan yang telah mencapai 20 persen sejauh ini pada 2013 – juga akan memberikan sejumlah dukungan pada neraca perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing eksternal Indonesia (walau secara persyaratan perdagangan penurunan itu lebih kecil, seperti diperlihatkan pada Bagian 4 di bawah). Akhirnya, penerimaan ekspor diproyeksikan akan meningkat berkat dukungan pertumbuhan mitra perdagangan utama, bersama-sama dengan stabilisasi harga-harga komoditas ekspor memasuki tahun 2014.

**...namun kebutuhan pendanaan bruto secara umum tetap besar, dan kondisi pendanaan luar negeri telah mengetat**

Kebutuhan pendanaan bruto Indonesia yang berasal dari luar negeri cukup besar, sementara yang timbul dari pemenuhan dan pembayaran kembali hutang luar negeri berukuran lebih besar dari yang berasal dari defisit neraca transaksi berjalan. Pembayaran kembali hutang luar negeri pada triwulan kedua mencapai 43,1 miliar dolar AS, sementara, seperti dibahas di atas, jumlah defisit neraca transaksi berjalan triwulanan sebesar 9,8 miliar dolar AS (Gambar 16). Kondisi pendanaan luar negeri yang lebih ketat dan depresiasi Rupiah menciptakan kondisi yang lebih menantang dan lebih mahal bagi pembiayaan kembali hutang luar negeri yang ada, di mana lebih dari setengahnya (atau 15 persen dari PDB) merupakan hutang luar negeri sektor swasta. Hal ini terutama dialami oleh perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki akses terhadap lindung ulang (*hedging*) valuta alami (melalui penerimaan dalam dolar AS) dan yang memiliki keterpaparan yang besar terhadap perlemahan harga-harga komoditas global. Cadangan devisa resmi masih dalam kondisi lebih dari mencukupi kebutuhan pembiayaan luar negeri jangka pendek Indonesia, walau rasio hutang luar negeri jangka pendek terhadap cadangan devisa telah meningkat menjadi sekitar 50 persen dari 40 persen pada akhir tahun 2011. Namun yang lebih penting adalah bahwa risiko likuiditas luar negeri telah meningkat, dengan rasio layanan hutang meningkat hingga 80 persen pada bulan Juni 2013, dari sekitar 30 persen pada pertengahan tahun 2011. Bank Indonesia memproyeksikan bahwa pembayaran kembali hutang luar negeri di luar pembiayaan perdagangan, pinjaman bergulir dan valas dan simpanan akan mencapai jumlah 32,6 miliar dolar AS selama bulan Agustus hingga Desember 2013, yang mana 28,8 miliar dolar AS merupakan hutang swasta, dan pembayaran kembali bruto sebesar 33,4 miliar dolar AS yang diperkirakan untuk periode Januari-Juli 2014.<sup>1</sup>

**Gambar 15: Permintaan impor diperkirakan akan terus melambat sejalan dengan perlambatan pertumbuhan permintaan dalam negeri memasuki tahun 2014**  
(pertumbuhan impor barang setengah jadi dan permintaan dalam negeri yoy, persen)



Catatan: Impor barang setengah jadi dalam Rupiah  
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

<sup>1</sup> Perhitungan Bank Indonesia berdasarkan hutang bruto luar negeri pada Juli 2013, tidak termasuk pembiayaan perdagangan, pinjaman bergulir, valuta dan tabungan. Lihat Statistik Hutang Luar Negeri Indonesia, Tabel 1.9.

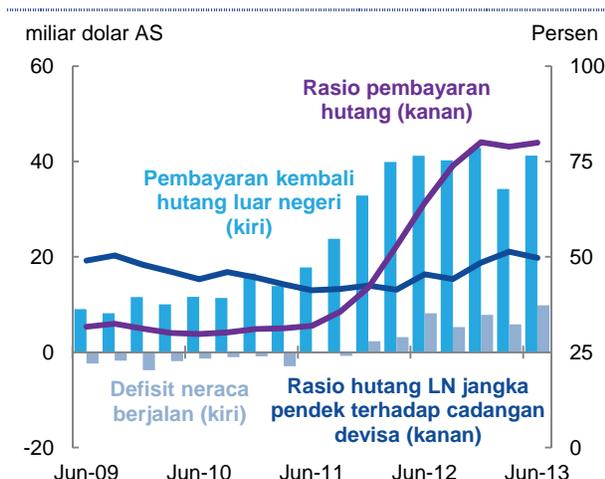
**Defisit neraca transaksi berjalan diproyeksikan mencapai 3,4 persen pada 2013 dan 2,6 persen pada 2014...**

Secara keseluruhan, Bank Dunia memproyeksikan defisit neraca transaksi berjalan sebesar 29 miliar dolar AS pada tahun 2013, atau 3,4 persen dari PDB, lebih besar dari defisit 2,8 persen dari PDB pada tahun 2012. Pada tahun 2014, defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan menyempit menjadi 2,6 persen dari PDB, karena pelemahan kegiatan ekonomi yang diantisipasi menuju tahun 2014 akan memperkecil permintaan impor; sementara depresiasi Rupiah yang belakangan terjadi dan peningkatan pertumbuhan para mitra perdagangan utama Indonesia akan memberikan sejumlah dukungan kepada ekspor.

**...dengan asumsi kesulitan pembiayaan eksternal yang signifikan dapat dihindari**

Seperti biasanya, proyeksi saldo neraca transaksi berjalan sangatlah peka terhadap pola permintaan dalam negeri dan harga komoditas non-minyak (bagi ekspor) dan biaya bahan bakar internasional (bagi impor). Pada saat ini, di tengah peningkatan keprihatinan akan persyaratan pembiayaan eksternal para negara-negara berkembang utama, termasuk Indonesia, suatu tambahan asumsi yang mendasari proyek dasar (*baseline*) di atas adalah bahwa proses penyesuaian untuk memperketat kondisi pembiayaan eksternal tetaplah teratur. Asumsi ini sangat bergantung pada perkembangan kebijakan dalam dan luar negeri dan kaitannya dengan kepercayaan investor. Sejumlah perubahan kebijakan untuk mendukung daya saing perdagangan dan investasi luar negeri dapat ditetapkan untuk jangka pendek (lihat Bagian B.1 dan B.2). Namun peningkatan daya saing lainnya tampaknya akan mengambil waktu yang lebih panjang, termasuk penanganan biaya dan kemacetan yang disebabkan oleh buruknya infrastruktur Indonesia (lihat Bagian C.1). Dengan demikian, secara jangka pendek, fokus yang lebih akan diberikan kepada penyesuaian permintaan impor, baik melalui pertukaran belanja (karena depresiasi Rupiah meningkatkan harga-harga impor) dan tekanan (dengan pengetatan kondisi kredit dan moneter dan impor yang lebih mahal menghambat belanja diskresioner untuk barang-barang yang hanya memiliki sedikit barang pengganti atau barang pengganti yang tidak sempurna pada jangka pendek). Moderasi permintaan domestik dapat berperan dalam menurunkan tekanan neraca pembayaran, sehingga komunikasi dan koordinasi kebijakan menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan intensitas siklus politis, seperti dibahas lebih lanjut pada Bagian 7.

**Gambar 16: Kebutuhan pendanaan eksternal bruto tetap besar dan risiko likuiditas telah meningkat...**  
(miliar dolar AS, persen)



Catatan: Pembayaran seluruh hutang luar negeri, kecuali sekuritas dalam negeri, valuta dan tabungan pihak asing, dan tanggung jawab lain ke pihak asing  
Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

**Tabel 3: ...dengan aliran masuk modal investasi sebagai kunci prospek keseluruhan neraca pembayaran, dimana defisit neraca berjalan akan menyusut secara perlahan**  
(miliar dolar AS)

	2011	2012	2013p	2014p
<b>Neraca pembayaran keseluruhan</b>	<b>11,9</b>	<b>0,2</b>	<b>-15,4</b>	<b>-4,0</b>
Neraca berjalan	1,7	-24,4	-29,2	-22,1
Perdagangan	24,2	-1,7	-7,9	-1,0
Penerimaan	-26,7	-26,7	-25,6	-25,4
Transfer	4,2	4,0	4,3	4,3
Neraca modal & keuangan	13,6	25,1	15,1	18,1
Inv. langsung	11,5	14,0	14,1	12,3
Inv. portofolio	3,8	9,2	4,0	6,5
Inv. lainnya	-1,8	1,9	-3,0	-0,7
<b>Cadangan devisa</b>	<b>110,1</b>	<b>112,8</b>	<b>91,8</b>	<b>87,8</b>

Sumber: Proyeksi staf Bank Dunia

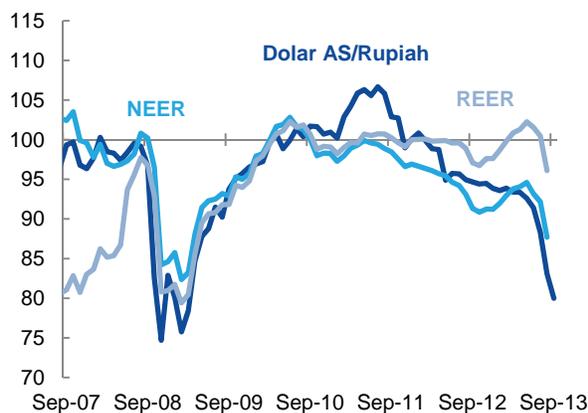
#### 4. Rupiah telah melemah dan kondisi pembiayaan menegat

##### Pasar keuangan Indonesia mengalami gejolak di triwulan ketiga

Seperti telah disinggung sebelumnya, seperti pada banyak negara-negara berkembang, pasar keuangan Indonesia sekali lagi mengalami triwulan yang bergejolak, bereaksi dengan kuat terhadap selera risiko global, dan juga perkembangan ekonomi dan kebijakan dalam negeri. Di tengah penjualan besar-besaran aset-aset pasar berkembang, saham Indonesia turun sebesar 8,6 persen hanya pada tanggal 19-20 Agustus saja. Setelah gejolak yang menyusul (dengan peningkatan yang mengikuti penundaan “pemotongan stimulus AS” dan dibantu dengan sejumlah besar pembelian kembali saham-saham perusahaan, dan diikuti oleh perlemahan baru pada akhir bulan September), indeks menutup triwulan itu dengan penurunan sebesar 10,4 persen, yang belum berubah hingga saat ini (mencerminkan kuatnya peningkatan yang dicatat oleh indeks hingga bulan Mei). Investor asing menjadi penjual bersih akan jumlah yang cukup besar yaitu Rp 8,5 triliun (sekitar 800 juta dolar AS) dalam saham selama triwulan tersebut. Sementara itu imbal hasil (*yield*) obligasi negara lima tahunan dalam mata uang Rupiah meningkat sebesar 180 basis poin dari permulaan triwulan hingga mencapai 8,24 persen pada tanggal 11 September, sebelum turun 40 basis poin pada akhir triwulan itu menjadi 7,85 persen. Melihat pada gejolak harga-harga aset keuangan, tren yang paling jelas pada sektor keuangan adalah depresiasi Rupiah dan pengetatan kondisi pembiayaan dalam dan luar negeri.

**Gambar 17: Rupiah mencatat depresiasi yang signifikan secara nominal tetapi tidak secara riil sejak 2011...**

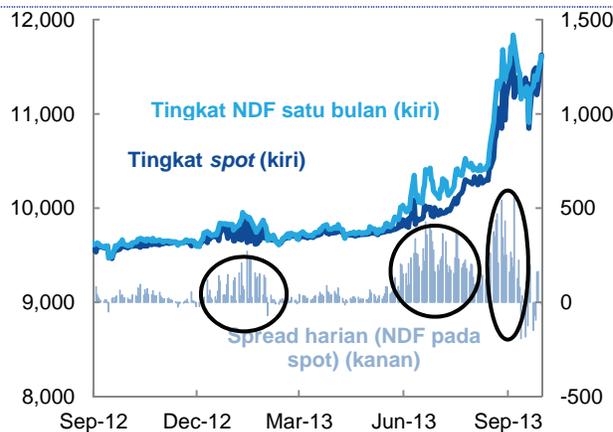
(kurs tukar efektif nominal, kurs tukar efektif riil, dan kurs tukar bilateral dolar AS, indeks, rata-rata tahun 2010=100)



Catatan: Angka hingga akhir Agustus 2013  
Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasar data dari IMF (IFS) dan JP Morgan

**Gambar 18: ...diikuti masalah likuiditas dolar AS, seperti ditunjukkan selisih *spread* antara dalam dan luar negeri**

(Rupiah per dolar AS; *spread* Rupiah per us3; persen)



Catatan: Angka tingkat spot Rupiah dari Bloomberg ke 30 September 2013  
Sumber: Bloomberg; perhitungan staf Bank Dunia

##### Rupiah terus terdepresiasi dan terjadi pengetatan likuiditas dolar di dalam negeri

Mengikuti pergerakan yang tiba-tiba pada pertengahan hingga akhir bulan Agustus, Rupiah terus mengalami depresiasi pada bulan September, turun menjadi Rp 11.593 per dolar AS pada akhir triwulan ketiga, dan kini telah terdepresiasi sebesar 20 persen dibanding akhir tahun 2012, ke tingkatan paling rendahnya sejak awal tahun 2009. Namun walau dengan depresiasi nominal Rupiah yang cukup besar antara bulan Mei dan Agustus, nilai tukar efektif riil (rata-rata tertimbang perdagangan) Indonesia per bulan Agustus hanya turun sebesar 4 persen dari rata-ratanya pada tahun 2010 (Gambar 17), yang mencerminkan penurunan nominal terhadap dolar AS dari valuta-valuta sejumlah mitra perdagangan utama Indonesia dan peningkatan inflasi dalam negeri. Penyesuaian nominal itu telah membentuk tantangan bagi pasar valuta, dan bagi para perusahaan yang mengelola kewajiban eksternal. Likuiditas dolar menegat secara signifikan sejak awal bulan Juli, dan sekali lagi pada pertengahan hingga akhir bulan Agustus (Gambar 18). Bank Indonesia telah mengelola laju penyesuaian dalam Rupiah, dengan cadangan devisa menyusut menjadi 93 miliar dolar AS pada akhir bulan Agustus 2013, setara dengan impor dan kebutuhan pembayaran hutang pemerintah selama lima bulan. Nilai itu juga lebih rendah dari cadangan devisa yang tercatat pada akhir

tahun 2012 sebesar 112,8 miliar dolar AS. Bank Indonesia telah mengambil sejumlah langkah-langkah untuk mendukung peningkatan likuiditas pada pasar valuta asing dalam negeri, termasuk melonggarkan aturan pembelian dolar AS bagi para eksportir, memperpanjang jatuh tempo fasilitas penyimpanan dalam dolar AS hingga 12 bulan, dan melakukan lelang pertukaran (*swap*) dolar AS untuk menurunkan permintaan *spot* dolar AS dengan memfasilitasi lindung nilai komersial terhadap risiko-risiko valuta.

**Kebijakan moneter telah mengalami pengetatan secara signifikan, melalui peningkatan suku bunga...**

Sejak bulan Juni posisi kebijakan moneter telah bergeser secara signifikan menuju pengetatan, menunjukkan fokus terhadap fasilitasi penyesuaian neraca eksternal dan pembatasan tekanan inflasi. Menyiasati peningkatan dalam harga BBM bersubsidi, dan dengan peningkatan tekanan terhadap Rupiah sejak bulan Mei, BI mengejutkan pasar dengan meningkatkan suku bunga Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) sebesar 25 basis poin pada tanggal 11 Juni, yang diikuti dengan peningkatan BI Rate sebesar 25 basis poin pada rapat kebijakannya pada bulan Juni yang sama. Peningkatan ini diikuti dengan kenaikan lanjutan tingkat bunga sebesar 50 basis poin pada bulan Juli. Tingkatan itu tidak diubah pada Rapat Gubernur BI sampai dengan bulan Agustus, walau sejumlah aturan makro-prudensial yang baru diumumkan. Setelah laporan statistik neraca pembayaran yang melemah untuk triwulan kedua dan bertambahnya tekanan pada Rupiah, suku bunga FASBI dan BI Rate kembali ditingkatkan sebesar 50 basis poin pada saat rapat kebijakan luar biasa yang diadakan pada tanggal 29 Agustus (selain itu, koridor batas atas suku bunga operasi moneter, fasilitas pinjaman BI, juga ditingkatkan sebesar 25 basis poin). Hal ini diikuti dengan peningkatan kembali sebesar 25 basis poin untuk FASBI, BI Rate dan fasilitas pinjama pada rapat reguler tanggal 12 September. Dengan demikian, BI telah meningkatkan suku bunga FASBI dan BI Rate sebesar 150 basis poin sejak bulan Juni (masing-masing menjadi 5,5 dan 7,25 persen) dan suku bunga pinjaman utamanya sebesar 50 basis poin (ke 7,25 persen).

**...dan langkah-langkah makro-prudensial**

Sejumlah langkah-langkah makro-prudensial yang mengarah pada pengetatan juga telah diambil, dengan batas atas sasaran rasio pinjaman terhadap tabungan (*loan-to-deposit*) telah diturunkan dari 100 ke 92 persen dan juga rasio uang muka (*loan-to-valuation*) yang lebih ketat untuk kredit perumahan, sementara rasio giro wajib minimum sekunder akan ditingkatkan menjadi 4 persen (dari 2,5 persen) per bulan Desember. BI juga telah mengambil sejumlah langkah-langkah fasilitasi manajemen likuiditas: memperkenankan obligasi pemerintah dan Sertifikat BI untuk dihitung sebagai syarat giro wajib sekunder, dan memperkenalkan masa tenor sekuritas simpanan BI yang lebih singkat.

**Pertumbuhan kredit bank melambat, sementara indikator kesehatan perbankan secara agregat tetap kokoh**

Selain peningkatan biaya peminjaman yang belakangan terjadi, terdapat tanda-tanda perlambatan pada siklus kredit, sejalan dengan perlemahan pertumbuhan ekonomi dan peraturan kebijakan makro-prudensial BI. Pertumbuhan kredit riil tahunan melambat ke 13 persen *yoy* ke bulan Juli, yang merupakan laju pertumbuhan terlemah sejak bulan Mei 2010 yang sebagian mencerminkan tingginya inflasi sementara yang disebabkan oleh peningkatan harga BBM pada bulan Juni. Secara nominal, pertumbuhan kredit secara agregat stabil secara umum pada 22 persen *yoy* sampai dengan Juli, naik tipis dari 21 persen di bulan Juni, dengan pertumbuhan pinjaman investasi stabil di 34 persen pada bulan Juli, naik dari 23 persen pada bulan Mei. Pertumbuhan kredit modal kerja turun menjadi 19 persen *yoy* pada bulan Juli, dari sekitar 24 persen *yoy* di awal tahun 2013, dan pertumbuhan kredit konsumsi relatif stabil pada 20 persen *yoy*. Indikator agregat sektor perbankan tetap stabil, sementara kredit macet tetap berada di bawah 2 persen, sementara tingkat keuntungan bank-bank Indonesia masih cukup tinggi. Namun demikian, diluar catatan-catatan kinerja yang terjadi sekarang, sektor perbankan diharapkan masih mampu menghadapi tekanan margin dan kualitas kredit, ditengah tantangan akan semakin melambatnya pertumbuhan atau bertambahnya gejala pasar finansial pada bulan-bulan yang akan datang.

**Persetujuan kredit baru mengisyaratkan titik balik siklus kredit sebagai respon terhadap pengetatan**

Pertumbuhan kredit diperkirakan akan semakin menurun, seperti ditunjukkan dengan pelemahan pertumbuhan persetujuan pinjaman baru, yang cenderung memimpin pertumbuhan pinjaman (Gambar 19). Pertumbuhan pasokan dana bagi pinjaman mencatat pelemahan sejalan dengan penurunan pertumbuhan tabungan. Sementara itu suku bunga tabungan telah meningkat sejak bulan Juni, dan juga suku bunga pinjaman umum dalam

**kebijakan moneter yang belakangan terjadi...**

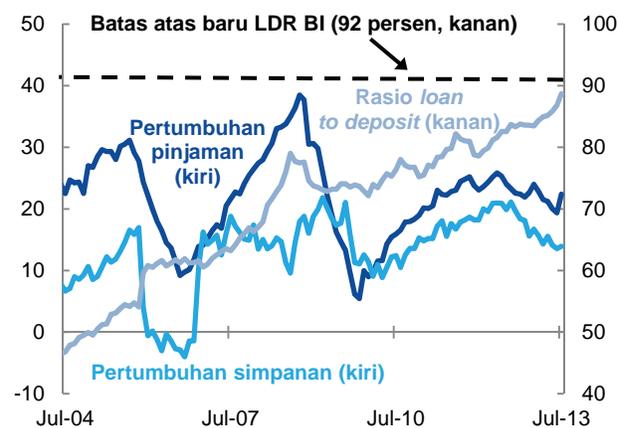
rupiah bagi pinjaman modal kerja dan investasi, sementara suku bunga pinjaman konsumsi tetap melanjutkan penurunannya selama beberapa tahun terakhir. Naiknya bunga dan melambatnya pertumbuhan tabungan tampaknya akan membebani kegiatan pinjaman pada bank-bank yang berukuran lebih kecil, sementara bank-bank besar tampaknya akan lebih tidak terpengaruh, terutama bank-bank yang memiliki akses yang lebih besar kepada rekening giro dan tabungan. Sebagai bagian dari aturan makro-prudensial yang disinggung di atas, BI menurunkan batas atas dari rasio sasaran rasio kredit terhadap nilai agunan (*loan-to-deposit*) bank dari 100 ke 92 persen, dan meningkatkan persyaratan giro wajib minimum untuk simpanan Rupiah ke 4 persen, dari 2,5 persen.<sup>2</sup> Pertumbuhan tabungan secara agregat melambat ke 14 persen ke bulan Juli, sejalan dengan perlemahan lanjutan dalam pertumbuhan PDB nominal menjadi 7,8 persen pada tahun berjalan ke bulan Juni, yang menyebabkan peningkatan keseluruhan rasio *loan-to-deposit* bank ke 88,7 persen pada bulan Juli, naik dari 83,6 persen pada akhir tahun 2012 (Gambar 20).

**Gambar 19: Rendahnya persetujuan kredit baru menunjukkan perlambatan pertumbuhan kredit ke depan...**  
(rata-rata bergerak pertumbuhan persetujuan kredit baru 3 bulan yoy, pertumbuhan kredit yoy; persen)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia.

**Gambar 20: ...sementara perlambatan pertumbuhan tabungan juga membebani kegiatan pinjaman**  
(pertumbuhan simpan pinjam bank yoy; rasio loan-to-deposit sektor perbankan; persen, rasio)



Sumber: CEIC dan perhitungan staf Bank Dunia.

**...yang tampaknya akan membebani pertumbuhan...**

Pengetatan ketersediaan kredit dan peningkatan biaya pendanaan dalam negeri dapat diperkirakan akan membebani kegiatan ekonomi dalam negeri pada kemudian hari, terutama kepada investasi. pada waktu yang bersamaan, proyeksi moderasi pertumbuhan mungkin akan menurunkan permintaan kredit, dengan Bank Indonesia menurunkan sasaran tahun 2013 untuk pertumbuhan pinjaman menjadi 18 persen. Keterkaitan historis menunjukkan bahwa penurunan pertumbuhan kredit bank secara nominal sebesar 4 hingga 5 poin persentase akan menurunkan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 1 poin persentase. Secara keseluruhan, pertumbuhan kredit nominal diperkirakan akan turun ke sekitar 15 persen yoy pada triwulan yang akan datang, dari 22 persen pada bulan Juli.

<sup>2</sup> Bank-bank dengan rasio *loan-to-deposit* yang melampaui batas atas, dan rasio kecukupan modal di bawah 14 persen, harus menempatkan tambahan simpanan ke Bank Indonesia.

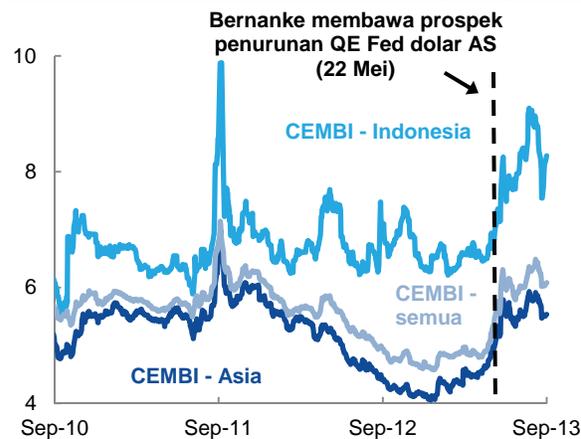
...terutama investasi, dengan pengetatan yang cukup berarti terhadap kondisi pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia

Selain kredit perbankan, akses ke bentuk-bentuk pendanaan lain juga telah mengikat. Obligasi korporasi muncul sebagai sumber pendanaan alternatif selain pinjaman bank, walau jumlahnya hanya 6 persen dari jumlah aset-aset keuangan Indonesia pada akhir tahun 2011, bidang yang sebagian besar masih didominasi oleh aset-aset perbankan (75 persen). Pertumbuhan penerbitan obligasi perusahaan dalam negeri telah melambat menjadi 5 persen *qoq* rata-rata bergerak 4 triwulanan ke bulan September dari 50 persen ke bulan Maret.<sup>3</sup> Imbal hasil (*yield*) pasar sekunder untuk obligasi perusahaan Indonesia dalam dolar AS juga menunjuk kepada biaya pendanaan korporat luar negeri dalam dolar AS, dengan imbal hasil acuan yang meningkat sekitar 170 basis poin sejak awal bulan Mei (Gambar 21).<sup>4</sup>

Pertumbuhan harga properti jenis perumahan mulai stabil pada triwulan kedua namun masih tetap tinggi pada beberapa segmen pasar

Laju kenaikan harga properti jenis rumah tinggal secara nasional di Indonesia sedikit melemah pada triwulan kedua, menjadi 10,7 persen *yoy* pada bulan Juni, turun dari laju yang pesat sebesar 11,2 persen *yoy* pada bulan Maret. Rumah-rumah berukuran lebih kecil (dengan luas tanah kurang dari 36 meter persegi) terus mencatat pertumbuhan harga yang paling kuat, meningkat sebesar 16 persen *yoy* pada bulan Juni, dan tetap dibebaskan dari aturan rasio kredit terhadap nilai agunan BI (*loan-to-value*) yang lebih ketat untuk kredit perumahan bagi pembeli rumah baru. Properti jenis bangunan komersial juga menunjukkan peningkatan harga yang tetap menguat, dengan laju pertumbuhan harga jual apartemen rumah tinggal dan lahan industri, dan sewa ruang perkantoran, seluruhnya berada di atas 25 persen *yoy* bulan Juni 2013 pada wilayah Jabodetabek. Seperti disinggung pada Triwulanan edisi bulan Maret 2013, pertumbuhan harga properti yang sedemikian kuat membutuhkan pemantauan berkelanjutan. Namun kegiatan sektor properti dan pertumbuhannya dapat terkena dampak kondisi pembiayaan yang lebih ketat, dengan kredit bank untuk perumahan melambat menjadi 17,3 persen *yoy* di bulan Juli, pengumuman aturan makro-prudensial lanjutan oleh BI untuk membatasi risiko kredit pada sektor properti<sup>5</sup>, dan juga melambatnya pertumbuhan PDB nominal.

Gambar 21: Perusahaan Indonesia menghadapi peningkatan biaya pendanaan luar negeri (imbal hasil ke jatuh tempo, persen)



Catatan: Data hingga 30 September 2013  
Sumber: JP Morgan

<sup>3</sup> Dihitung sebagai rata-rata bergerak 4 triwulanan (*4qma*) berdasar data penerbitan triwulan 3 hingga 29 September.

<sup>4</sup> Dari 15 miliar dolar AS nilai obligasi korporasi dalam dolar AS yang diterbitkan pada akhir 2012, sektor pertambangan memiliki porsi sebesar 71 persen, diikuti oleh infrastruktur (14 persen), dan keuangan (7 persen).

<sup>5</sup> Bank Indonesia mengumumkan rencana pengetatan batas rasio kredit terhadap nilai agunan (*loan-to-value*) bagi kredit rumah sekunder dan selanjutnya (termasuk bagi rumah yang berukuran lebih kecil) dan memperluas cakupan aturan itu ke ruko (rumah toko), rukan (rumah kantor) dan konsumsi dengan dukungan properti, mulai tanggal 30 September 2013. Selanjutnya, dana pinjaman hanya akan dicairkan setelah properti itu dibangun. Persyaratan rasio *loan-to-valuation* bagi pembeli rumah baru tetap dipertahankan antara 70 dan 80 persen, bergantung pada jenis dan ukuran propertinya.

### 5. Inflasi telah meningkat karena kenaikan harga BBM bersubsidi

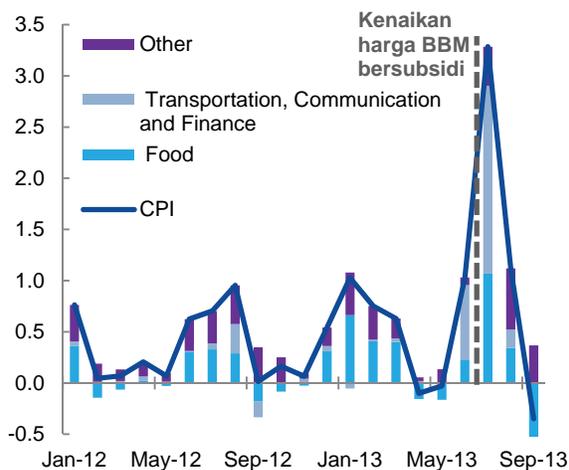
**Inflasi IHK yoy meningkat ke 8 persen pada awal kuartal ketiga karena kenaikan harga BBM dan bahan pangan**

Pergerakan inflasi selama kuartal ketiga didominasi oleh pengaruh reformasi subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) dan dampak musiman bulan Ramadhan. Keputusan Pemerintah menaikkan harga solar bersubsidi sebesar Rp 1.000 per liter dan harga bensin sebesar Rp 2.000 per liter memicu lonjakan tajam inflasi IHK (*headline*), mendorong inflasi *yoy* naik untuk empat kuartal berikutnya. Namun inflasi bulan-ke-bulan diperkirakan akan kembali stabil dalam jangka pendek, seperti pada reformasi harga BBM yang lalu, dengan peningkatan suku bunga Bank Indonesia (yang baru diumumkan) dan pengetatan kondisi kredit yang sedang berlangsung akan membantu mengurangi dampak putaran kedua serta harapan inflasi (*expected inflation*). Gabungan dari pengaruh pembatasan perdagangan yang diluncurkan pada bulan Oktober 2012 dan peningkatan permintaan selama masa Lebaran mendorong peningkatan inflasi harga bahan pangan, terutama pada harga cabai, bawang merah dan bawang putih. Sebagian dampak pembatasan perdagangan tersebut telah berkurang, dan harga bahan pangan tampaknya mulai mengikuti tren menurun.

**Kenaikan harga BBM bersubsidi diperkirakan berkontribusi hampir setengah dari kenaikan inflasi bulan-ke-bulan pada bulan Juli...**

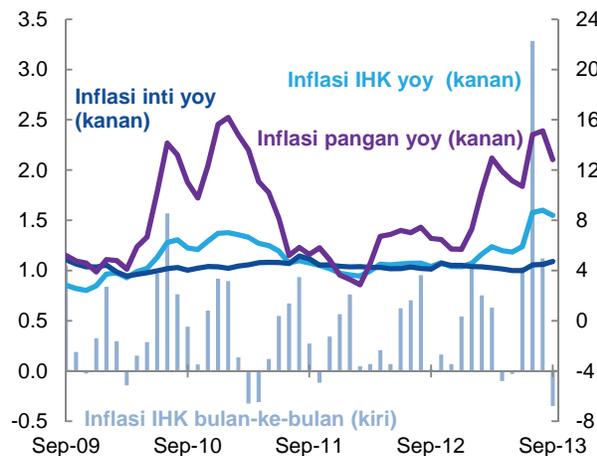
Kenaikan harga BBM diperkirakan menyumbang lebih dari setengah inflasi IHK bulan-ke-bulan pada bulan Juli yang mencapai 3,3 persen (Gambar 22). Sebagai akibatnya inflasi IHK meningkat hingga 8,6 persen *yoy* pada bulan Juli, dari 5,9 persen pada bulan Juni, dan kembali merayap naik ke 8,8 persen pada bulan Agustus, sebelum menurun tipis ke 8,4 persen pada bulan September (Gambar 23). Harga-harga barang konsumsi inti telah sedikit meningkat menjadi 4,5 persen *yoy* pada bulan Agustus, dan 4,7 persen pada bulan September. Pada saat kenaikan harga BBM yang lalu pada bulan Oktober 2005 dan Juni 2008, peningkatan harga konsumsi inti kembali dengan cepat ke tingkat harga sebelumnya (Gambar 24). Namun perubahan inflasi inti harus dipantau dengan jangka waktu yang lebih panjang, karena harga BBM yang lebih tinggi dapat membawa pengaruh yang tertunda terhadap peningkatan harga faktor produksi (*input*). Kenyataan bahwa harga BBM bersubsidi masih berada jauh di bawah harga internasional juga berarti bahwa harga-harga yang tinggi saat ini sebetulnya sengaja ditekan lewat pengaturan subsidi.

**Gambar 22: Inflasi naik tajam pada awal kuartal 3 karena dorongan harga BBM dan bahan pangan...**  
(inflasi, bulan-ke-bulan, persen)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 23: ...menyebabkan peningkatan kecil pada inflasi inti**  
(inflasi, persen)

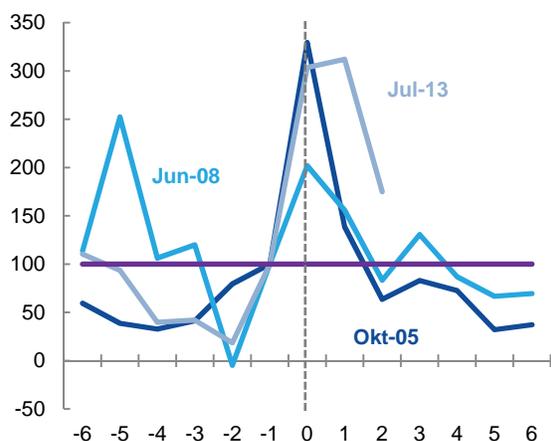


Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

...sementara harga bahan pangan menyumbang tambahan sepertiga terhadap inflasi

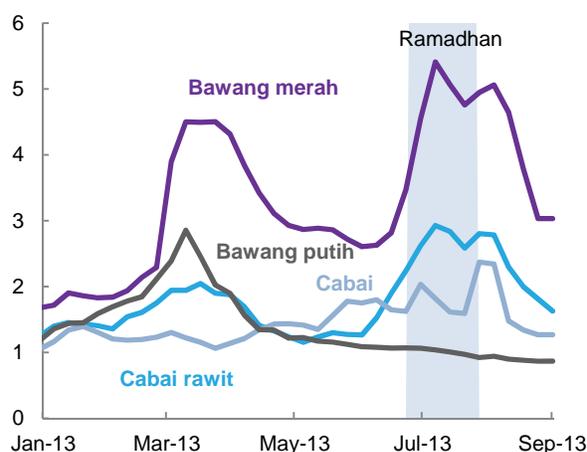
Bersamaan dengan kenaikan harga BBM, harga-harga sejumlah bahan pangan juga meningkat pada kuartal kedua tahun 2013, mengikuti pengumuman UU Pangan, yang ditetapkan pada bulan Oktober 2012 (Gambar 25). Sejumlah pembatasan perdagangan yang berkaitan dengan UU Pangan telah diganti, termasuk kuota daging sapi yang diganti dengan tarif yang menyesuaikan dengan harga dalam negeri, untuk mendorong turunnya harga. Namun bulan Ramadhan pada Juli-Agustus juga membawa pengaruh peningkatan harga yang biasa terjadi. Kenaikan harga bahan pangan – beberapa bahkan meningkat hingga dua sampai lima kali lipat dari harganya pada bulan Oktober 2012 – memberikan kontribusi sebesar 1,1 poin persentase kepada inflasi bulan-ke-bulan (mom) pada bulan Juli. Harga bahan-bahan pangan itu kini tampaknya berada pada jalur yang menurun, yang menunjukkan keringanan dari tekanan inflasi yang berasal dari sumber ini.

**Gambar 24: Inflasi inti kembali normal dengan cepat pasca naiknya harga BBM bersubsidi pada tahun 2005 dan 2008**  
(harga, indeks dimana 100= IHK inti mom(month-on-month) pada bulan -1, bulan dari kenaikan harga)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 25: Harga sejumlah bahan pangan naik karena pembatasan perdagangan dan bulan Ramadhan...**  
(harga, indeks, 1 = Oktober 2013)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

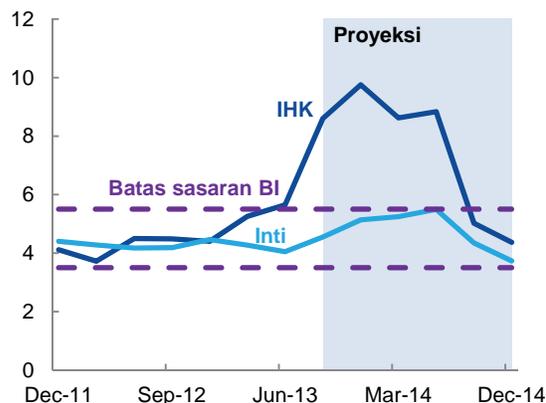
Tekanan lebih lanjut terhadap inflasi dapat berasal dari dampak lanjutan kenaikan harga BBM, depresiasi Rupiah yang baru terjadi dan peningkatan upah minimum tahun 2014...

Depresiasi Rupiah yang akhir-akhir ini terjadi membawa risiko inflasi jangka pendek, melalui peningkatan biaya impor. Depresiasi kuartal kedua tampaknya akan menyumbang sampai sebesar 0,5 poin persentase kepada IHK. Secara prinsip, pengaruh depresiasi valuta terhadap inflasi tampaknya bersifat non-linier, meningkat dalam jangka pendek dengan pengaruh peningkatan harga impor masuk ke keranjang IHK, dan kemudian menurun ketika kejutan harga turun relatif terhadap dasarnya. Sejalan dengan hal ini, tekanan inflasi lanjutan dapat diperkirakan dari depresiasi yang baru terjadi, dan pergerakan kurs tukar merupakan salah satu risiko utama terhadap prospek inflasi dasar (*baseline*). Risiko tambahan sisi penawaran terhadap inflasi juga meningkat, terutama dari potensi peningkatan upah minimum tahun 2014 (mengikuti kenaikan dalam jumlah besar pada tahun 2013), dan kemungkinan dampak lanjutan kedua dan ketiga dari penurunan subsidi BBM.

...namun demikian proyeksi *baseline* menunjukkan penurunan inflasi

Tanpa mengesampingkan risiko-risiko di atas, prospek dasar (*baseline*) adalah bahwa inflasi akan tetap terjaga, sejalan dengan perlemahan umum pada pertumbuhan permintaan secara agregat. Bank Dunia mengantisipasi disinflasi harga secara bulan-ke-bulan pada 3 hingga 6 bulan ke depan, dengan inflasi diperkirakan akan berada pada kisaran batas 8-10 persen melalui kuartal kedua tahun 2014. Setelah itu, ketika pengaruh kenaikan harga BBM telah mereda, inflasi diperkirakan akan kembali turun ke batas sasaran Bank Indonesia Bank Indonesia (Gambar 26). Inflasi inti diperkirakan akan meningkat karena dampak lanjutan kedua yang moderat dari kenaikan harga BBM dan inflasi impor, dan kemudian kembali ke tingkat yang lebih rendah, sejalan dengan prospek pertumbuhan yang lebih rendah dan berakhirnya dampak lanjutan kedua dari kenaikan harga BBM.

**Gambar 26: Inflasi *yoY* diproyeksikan mencapai puncaknya pada kuartal 4 (inflasi, persen)**



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

## 6. Risiko fiskal dari beban subsidi energi kembali meningkat

Defisit fiskal hingga bulan Agustus cukup besar dibanding periode yang sama pada tahun 2012...

Perlemahan yang terus terjadi dalam pertumbuhan PDB nominal, penurunan harga komoditas internasional, dan depresiasi nominal Rupiah, telah berdampak terhadap sektor fiskal Indonesia. Pada periode Januari-Agustus 2013, tercatat nilai defisit keseluruhan sebesar Rp 101 triliun, dibanding defisit sebesar Rp 35 triliun pada periode yang sama tahun lalu (Tabel 4). Pertumbuhan penerimaan riil juga telah menurun, namun laju pencairan anggaran secara keseluruhan menunjukkan sedikit perbaikan.

...karena penurunan penerimaan yang bersifat luas ...

Delapan bulan pertama tahun 2013 mencatat moderasi pertumbuhan penerimaan yang luas, yang mencapai 56 persen dari target untuk tahun 2013 selama periode Januari-Agustus. Secara khusus, pajak pendapatan non-migas, yang merupakan sebagian besar pajak pendapatan (sekitar 86 persen) dan hanya sedikit lebih rendah dari sepertiga jumlah penerimaan, mencatat penurunan pertumbuhan *yoY* yang berarti (6 persen dibanding rata-rata pertumbuhan sebesar 14 persen pada periode yang sama tahun 2010-2012). Pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) juga melemah (ke 13 persen dibanding rata-rata 22 persen pada periode yang sama tahun 2010-2012). Pajak-pajak internasional, terutama bea ekspor, mencatat kontraksi sebesar 13 persen *yoY*, disebabkan menurunnya harga komoditas yang juga mempengaruhi penerimaan bukan pajak, baik dari migas dan sektor sumber daya lainnya. Secara keseluruhan penerimaan bukan pajak pada delapan bulan pertama tahun 2013 hanya meningkat sebesar 3 persen *yoY* dibanding rata-rata sebesar 19 persen pada periode yang sama pada tahun 2010-2012.

...sementara kinerja eksekusi anggaran mencatat sedikit perbaikan...

Pada akhir bulan Agustus sekitar Rp 946 triliun, atau 55 persen dari jumlah anggaran belanja pada APBN-P 2013, telah dibelanjakan, sedikit di atas tingkat pengeluaran pada periode yang sama pada tahun 2012 sebesar 54 persen pada tahun 2012. Pertumbuhan belanja pada delapan bulan pertama tahun 2013 mencapai 14 persen *yoY*, turun dari 23 persen pada tahun 2012. Pengeluaran subsidi energi tercatat sedikit di atas 30 persen dari total belanja tidak termasuk transfer, mencapai 65 persen dari alokasi APBN-P 2013. Belanja modal tampaknya mulai membaik, dengan bertumbuh sebesar 18 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun pencairan belanja masih tetap condong ke akhir tahun, dengan hanya 32 persen pencairan dalam delapan bulan pertama, walau tingkat itu sudah merupakan peningkatan dari pencairan sebesar 29 persen pada delapan bulan pertama tahun 2012.

...walau tantangan  
blokir (tanda bintang)  
masih ada...

Pada akhir bulan Juni 2013, Kementerian Keuangan melaporkan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) negara sebesar Rp 32 triliun (5 persen dari jumlah keseluruhan) masih berada dalam keadaan terblokir (dimana DIPA diblokir dengan pemberian tanda bintang), yang merupakan penurunan dari tingkat blokir pada akhir bulan April 2013 sebesar Rp 87 triliun (atau 15 persen dari jumlah anggaran kementerian negara).<sup>6</sup> Persetujuan bersyarat ini, yang merintangi pencairan secara signifikan, disebabkan oleh kegiatan yang membutuhkan persetujuan DPR, dokumen pendukung yang kurang lengkap seperti kerangka acuan (*terms of reference*, TOR), rincian biaya dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

**Tabel 4: Pertumbuhan penerimaan melambat pada periode Jan – Agu 2013 dibanding tahun-tahun yang lalu**  
(triliun Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Nilai nominal (Jan - Agu)				Proporsi (Jan - Agu) APBN-P				Pertumbuhan nominal YoY			
	(triliun Rp)				(Persen)				(Persen)			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
<b>A. Penerimaan</b>	<b>603</b>	<b>719</b>	<b>798</b>	<b>845</b>	<b>60,8</b>	<b>61,4</b>	<b>51,1</b>	<b>56,3</b>	<b>21,0</b>	<b>19,2</b>	<b>11,0</b>	<b>5,9</b>
1. Penerimaan pajak	448	535	615	657	60,3	60,9	52,5	57,2	15,6	19,5	14,9	6,9
PPh Migas	34	41	51	50	61,2	62,7	64,0	66,8	-2,5	20,7	25,8	-3,5
PPh Non-migas	197	232	256	272	64,1	63,4	51,0	58,5	13,7	18,1	10,1	6,3
Pajak penj. (PPN)	137	157	204	230	51,9	52,7	52,1	54,3	20,9	15,2	29,9	12,6
Cukai	43	49	62	72	73,3	72,3	63,8	68,8	18,6	13,3	26,2	16,0
Pajak dagang int'l	16	37	33	29	71,0	79,1	59,8	59,8	31,3	131,8	-10,4	-13,0
2. Pen. bukan pajak	155	182	181	186	62,5	63,5	46,6	53,4	39,7	17,7	-0,4	2,8
Migas	83	106	92	91	54,4	61,3	40,2	50,6	55,4	28,7	-13,2	-0,9
Non-migas	12	14	15	16	94,5	73,7	67,1	69,2	32,6	12,7	9,4	5,5
<b>A. Pengeluaran</b>	<b>557</b>	<b>678</b>	<b>833</b>	<b>946</b>	<b>49,4</b>	<b>51,3</b>	<b>53,8</b>	<b>54,8</b>	<b>7,1</b>	<b>21,8</b>	<b>22,9</b>	<b>13,6</b>
1. Pemerintah pusat	348	432	533	616	44,6	47,5	49,8	51,4	4,7	23,9	23,4	15,6
Pegawai	98	125	137	153	60,1	68,5	64,7	65,5	8,8	28,2	9,6	11,2
Barang	45	52	63	70	40,0	36,6	38,8	34,6	21,8	16,1	20,4	11,3
Modal	27	37	51	61	28,7	26,1	29,1	32,2	-11,1	35,3	39,3	18,0
Pembayaran bunga	58	63	66	73	54,8	58,9	56,3	64,8	-9,7	8,3	5,7	9,9
Subsidi	87	128	170	213	43,0	54,1	69,2	61,1	48,9	48,3	32,2	25,4
Energi	73	114	155	195	50,9	58,3	76,5	64,9	69,4	55,5	35,8	25,8
BBM	43	84	106	132	47,9	64,6	77,3	66,2	167,5	96,8	26,7	24,7
Listrik	31	30	48	62	55,6	45,9	74,6	62,2	12,3	-1,8	61,0	28,2
Sosial	31	24	42	46	44,0	29,5	49,1	56,7	-6,2	-22,9	74,6	8,2
2. Transfer	208	246	300	330	60,4	59,7	62,7	62,4	11,2	18,2	21,9	10,0

Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

...dan sejumlah aturan  
dan kebijakan baru  
telah diluncurkan  
untuk mengatasi  
tantangan pelaksanaan  
anggaran

Untuk mengatasi sejumlah kendala pelaksanaan anggaran, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah dalam memperbaiki peraturan. Secara khusus, Peraturan Pemerintah yang baru (PP 45/2013) diterbitkan untuk menghapuskan syarat penunjukan kembali pejabat satuan kerja (satker) setiap tahun. Aturan ini memungkinkan para satker untuk mulai bekerja pada awal tahun fiskal, sehingga mempercepat pencairan belanja; memperkenalkan pengendalian komitmen yang, bersama-sama manfaat lain, akan membantu Kementerian Keuangan dalam memantau jumlah dana yang dialokasikan oleh kementerian negara dan mengambil tindakan dini bila terdapat penundaan dalam pelaksanaan; memungkinkan pengadaan dini sebelum tahun fiskal dimulai, sehingga kontrak dapat ditandatangani lebih awal pada suatu tahun fiskal, dan memberikan dasar hukum bagi penerusan anggaran ke tahun berikutnya untuk kegiatan-kegiatan prioritas nasional dan kontrak tahun jamak.

<sup>6</sup> [http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/Perkemb\\_blokir\\_24%20Juni%202013\\_1A.pdf](http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/Perkemb_blokir_24%20Juni%202013_1A.pdf)

Kementerian Keuangan juga telah menerbitkan peraturan baru (PMK 94/2013) yang menyertakan aturan untuk mempercepat pelaksanaan anggaran. Aturan itu, yang menetapkan bagaimana dokumen anggaran disiapkan dan dikaji, termasuk aturan untuk: menghilangkan penggunaan blokir anggaran (tanda bintang), dan kementerian negara kini diberi tanggung jawab untuk menangani persyaratan apapun yang terkait dengan hal anggaran tanpa harus mengirimkan dokumen ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu; dan penyertaan unit audit internal kementerian/lembaga (K/L) negara sebagai pemeriksa dokumen anggaran sebelum persetujuannya (sementara peran auditor internal masih diselesaikan, niatnya adalah untuk tidak membentuk alasan penundaan baru dalam pengelolaan anggaran). Peraturan itu adalah langkah yang positif, namun tingkat efektivitasnya akan bergantung pada kemajuan sosialisasi dan implementasinya.

#### Kotak 1: Perkembangan terkini tentang bantuan langsung tunai dan tingkat kemiskinan

Mengikuti kenaikan harga BBM bersubsidi pada tanggal 22 Juni, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) telah didistribusikan ke 15,5 juta rumah tangga melalui PT POS dengan menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Seperti diuraikan pada Triwulanan edisi bulan Juli, BLSM merupakan salah satu paket kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah untuk memitigasi dampak peningkatan harga BBM terhadap rumah tangga miskin dan rentan. Tiga program lainnya termasuk perluasan bantuan langsung tunai yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan beasiswa, Bantuan untuk Siswa Miskin (BSM), dan peningkatan sementara alokasi beras untuk rakyat miskin, Beras Miskin (Raskin). Menurut PT POS, 94 persen dari alokasi tahap pertama sebesar Rp 4,7 triliun telah dicairkan. Sisa 6 persen yang belum dicairkan umumnya disebabkan oleh kesulitan dalam menemukan penerima yang dituju. Tahap kedua, yang dimulai pada tanggal 2 September telah mencapai 94 persen dari alokasi (per tanggal 1 Oktober), yang menunjukkan distribusi yang relatif lancar. Untuk memperbaiki ketidaktepatan dalam daftar penerima, Pemerintah telah meningkatkan fleksibilitas dengan memperkenalkan masyarakat pada tingkat desa untuk memeriksa dan mengubah daftar penerima bantuan melalui musyawarah kelurahan atau desa (muskel/musdes).

Beralih ke gambaran yang lebih besar tentang kemiskinan, pada tanggal 1 Juli, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat kemiskinan nasional pada bulan Maret 2013 adalah 11,4 persen. Angka ini merupakan penurunan sebesar 0,6 poin persentase dari 12,0 persen pada bulan Maret 2012. Tingkat kemiskinan pedesaan (14,3 persen) tetap hampir mencapai dua kali tingkat kemiskinan perkotaan (8,4 persen), namun terus menyusut dengan cepat, dari masing-masing sebesar 15,1 persen dan 8,8 persen pada tahun yang lalu. Garis rata-rata kemiskinan nasional telah meningkat sebesar 9,2 persen dari Rp 248.707 per orang per bulan menjadi Rp 271.626, di dorong oleh peningkatan harga bahan pangan dan bukan pangan, lintas daerah perkotaan dan pedesaan. Variasi kemiskinan antar daerah sangat tinggi, misalnya tingkat kemiskinan di Maluku dan Papua pada 24,0 persen, adalah dua kali rata-rata nasional, sementara Kalimantan memiliki tingkat kemiskinan paling rendah 6,4 persen, atau sekitar setengah dari rata-rata nasional.

Penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,6 poin persentase tahun ini kira-kira setara dengan penurunan sebesar 0,5 persen pada 2011 dan 2012. Penurunan ini meneruskan tren perlambatan laju penurunan kemiskinan pada beberapa tahun terakhir, dengan dua tahun terakhir mencatat penurunan yang paling kecil secara poin persentase dalam satu dekade, dengan pengecualian terjadinya peningkatan kemiskinan pada tahun 2006 karena gejolak harga bahan pangan dunia. Seperti dibahas pada Triwulanan edisi bulan Maret 2013, perlambatan penurunan kemiskinan bukan tidak diperkirakan dengan kemiskinan mendekati 10 persen, karena penduduk miskin yang tersisa terletak semakin jauh di bawah garis kemiskinan, sehingga membutuhkan pertumbuhan konsumsi yang lebih cepat untuk menjaga laju pengentasan kemiskinan yang sama seperti diukur oleh tingkat kemiskinan yang resmi. Secara umum, tren ini, bersama-sama dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan untuk 2014 dan peningkatan inflasi, akan membatasi perkiraan pengentasan kemiskinan tahun 2014. Namun pencairan BLSM pada paruh kedua tahun 2013 tampaknya akan memitigasi tekanan naik pada tingkat kemiskinan. Sebagai akibatnya, kemungkinan pencapaian sasaran RPJM Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan menjadi 8 hingga 10 persen pada 2014 menjadi tidak jelas. Namun perluasan program jaring pengaman sosial jangka panjang yang sedang berlangsung – terutama BSM dan PKH – merupakan strategi yang penting untuk mempercepat laju pengentasan kemiskinan setelah 2014.

Catatan: Lihat Triwulanan edisi bulan Juli 2013 untuk rincian paket kompensasi tahun 2013

Sumber: Kementerian Keuangan; BPS; PT Pos Indonesia (<http://blsm.posindonesia.co.id/main.php>)

**Bank Dunia memproyeksikan defisit anggaran 2013 sebesar 2,5 persen dari PDB pada 2013 dan 2,3 persen dari PDB pada 2014**

Memperhitungkan realisasi selama periode Januari-Agustus, penurunan harga komoditas, depresiasi Rupiah, dan pertumbuhan nominal PDB yang lebih lemah, Bank Dunia merevisi proyeksi defisit anggaran tahun 2013 dari Rp 189 triliun seperti tercantum pada Triwulanan edisi bulan Juli (2,1 persen dari PDB) ke Rp 226 triliun (2,5 persen dari PDB) (Tabel 5). Proyeksi penerimaan telah diturunkan sebesar 1,0 persen, dan proyeksi jumlah belanja direvisi naik sebesar 1,4 persen (sebagian besar karena peningkatan proyeksi belanja subsidi energi, walau harga BBM bersubsidi telah dinaikan pada bulan Juni, lihat Kotak 2). Untuk tahun 2014, Bank Dunia memproyeksikan defisit APBN sebesar 2,3 persen dari PDB, walau banyak hal jelas akan bergantung dari APBN 2014 yang akan disahkan DPR.

**APBN 2014 sedang dalam pembahasan di DPR**

RAPBN 2014 sedang dibahas di DPR dan diperkirakan akan disetujui (dengan sejumlah amandemen) pada akhir bulan Oktober. Proyeksi defisit anggaran pada RAPBN adalah 1,5 persen dari PDB, namun Menteri Keuangan mengumumkan bahwa perkiraan terakhir defisit tahun 2014 dapat mencapai 2,02 persen dari PDB.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> <http://www.thejakartapost.com/news/2013/09/17/budget-deficit-2014-estimated-reach-202-percent.html>

Mengenai sejumlah kategori pengeluaran utama, belanja pegawai diusulkan untuk meningkat sebesar 19 persen dibanding APBN-P 2013, yang mencerminkan reformasi birokrasi yang masih berlangsung, dan peningkatan dalam gaji dasar dan pembayaran pensiun masing-masing sebesar 6 persen dan 4 persen. Pemerintah menerapkan kebijakan anggaran mendarat bagi belanja barang (*flat policy*), terutama bagi pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan operasi, rapat-rapat dan perjalanan dinas. Belanja modal diusulkan akan meningkat sebesar 7 persen, menyiratkan peningkatan yang tidak begitu besar secara riil setelah pertumbuhan belanja modal riil yang sangat kuat selama beberapa tahun yang lalu, walau memang dimulai dari tingkat dasar yang rendah. RAPBN juga memperkirakan penerapan kebijakan-kebijakan baru, seperti dimensi kesehatan untuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang baru, dan usulan penyesuaian tarif listrik lebih lanjut bagi pelanggan tertentu untuk semakin meningkatkan kualitas belanja. Sama seperti APBN 2012 dan 2013, RAPBN ini juga menyertakan aturan persiapan menghadapi krisis yang memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah untuk menanggapi perubahan situasi ekonomi makro dengan cepat.

**Tabel 5: Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal 2,5 persen tahun 2013, naik dari 2,1 persen pada IEQ Juli 2013**  
(triliun Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2011	2012	2013	2013	2014	2014
	Realisasi	Realisasi	APBN-P	Bank Dunia	RAPBN	Bank Dunia
<b>A. Penerimaan negara dan hibah</b>	<b>1.211</b>	<b>1.338</b>	<b>1.502</b>	<b>1.434</b>	<b>1.663</b>	<b>1.569</b>
1. Penerimaan pajak	874	981	1.148	1.082	1.310	1.215
2. Penerimaan bukan pajak	331	352	349	347	351	349
<b>B. Pengeluaran</b>	<b>1.295</b>	<b>1.491</b>	<b>1.726</b>	<b>1.660</b>	<b>1.817</b>	<b>1.790</b>
1. Pemerintah pusat, yaitu	884	1.011	1.197	1.131	1.230	1.204
Pegawai	176	198	233	228	277	268
Barang	125	141	203	179	204	180
Modal	118	145	188	166	206	182
Subsidi, yaitu	295	346	348	346	336	364
Subsidi BBM	165	212	200	198	195	205
2. Transfer ke daerah	411	481	529	529	586	586
<b>C. Neraca primer</b>	<b>9</b>	<b>-53</b>	<b>-112</b>	<b>-100</b>	<b>-35</b>	<b>-95</b>
<b>D. Surplus/Defisit sebagai persen dari PDB</b>	<b>-84</b>	<b>-153</b>	<b>-224</b>	<b>-226</b>	<b>-154</b>	<b>-221</b>
<b>E. Pembiayaan bersih</b>	<b>131</b>	<b>175</b>	<b>224</b>	<b>n.a.</b>	<b>154</b>	<b>n.a.</b>
1. Pembiayaan dalam negeri	149	199	241	n.a.	173	n.a.
2. Pembiayaan luar negeri	-18	-23	-17	n.a.	-19	n.a.
<i>Asumsi ekonomi utama</i>						
Pertumbuhan ekonomi (persen)	6,5	6,2	6,3	5,6	6,4	5,3
Inflasi (yoy, persen)	3,8	4,3	7,2	9,8	4,5	4,4
Kurs tukar (Rp/dolar AS)	8.779	9.384	9.600	10.400	9.750	11.400
Harga minyak (dolar AS/barel)	112	113	108	106	106	105
Produksi minyak (ribu barel/hari)	899	861	840	840	870	870

Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

### Depresiasi Rupiah telah memperbaharui tekanan terhadap meningkatnya biaya subsidi

Depresiasi Rupiah sampai bulan September memberikan tekanan naik terhadap sejumlah pengeluaran pemerintah, terutama pengeluaran subsidi BBM (lihat Kotak 2). Dengan melemahnya Rupiah, belanja subsidi BBM bagi 2013 tampaknya akan meningkat sebesar Rp 21 triliun dibanding proyeksi pada Triwulanan bulan Juli. Karenanya, pada skenario dasar (*baseline*), proyeksi penghematan bersih tahun 2013 (termasuk belanja untuk BLIS dan program-program kompensasi) dari kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni 2013 sebesar Rp 13,1 triliun akan hilang, walau biaya subsidi lebih tinggi tanpa penyesuaian harga ini. Perkembangan ini menyoroti risiko fiskal dari sistem subsidi tetap yang berlaku sekarang, disesuaikan secara *ad hoc* berkala, terhadap perubahan kurs tukar atau harga minyak.

Perkembangan ini juga menekankan urgensi dan pentingnya terus melanjutkan reformasi subsidi energi, seperti bergerak ke pendekatan yang lebih berdasar aturan, untuk membuat kemajuan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas belanja publik.

#### Kotak 2: Dampak fiskal dari perubahan kurs tukar Rupiah dan harga minyak

Simulasi dapat dilakukan untuk melihat risiko langsung terhadap defisit anggaran yang berasal dari perubahan kurs tukar dan harga minyak internasional. Sebagai contoh, depresiasi Rupiah sebesar 10 persen terhadap dolar AS dibanding asumsi dasar (*base case*) Bank Dunia diperkirakan akan membawa pengaruh langsung pada peningkatan defisit fiskal sekitar 0,7 poin persentase dari PDB pada tahun 2013 dan 2014, masing-masing menjadi 3,2 persen dan 3,0 persen. Hal ini jelas mengasumsikan bahwa tidak ada penyesuaian dalam tingkat belanja sebagai tanggapannya, suatu hal yang sangat mungkin terjadi dengan adanya aturan pembatasan defisit PDB nasional sebesar 3 persen. Kenaikan harga minyak mentah sebesar 10 persen dibanding kondisi dasar (*baseline*) diproyeksikan akan menambah sekitar 0,4 poin persentase dari PDB terhadap defisit fiskal *baseline*.

Perkiraan kepekaan defisit fiskal yang cukup besar terhadap kurs tukar dan harga minyak mentah umumnya berasal dari sisi belanja, terutama karena peningkatan dalam biaya subsidi energi, transfer ke daerah dari bagi hasil migas, dan peningkatan belanja untuk pendidikan (dengan mandat bahwa belanja pendidikan harus merupakan 20 persen dari jumlah belanja). Walau dampak terhadap penerimaan tidaklah sebesar dampak terhadap belanja, proyeksi penerimaan nominal turut menerima dampak negatif; perubahan dalam kurs tukar mempengaruhi pungutan bea cukai dan PPN (bea impor maupun ekspor), sementara perubahan harga minyak mempengaruhi penerimaan melalui pajak pendapatan dari migas, PPN (melalui sensitivitas impor terhadap perubahan harga minyak, dan melalui peningkatan harga dan dampak perubahannya pada konsumsi swasta), bea cukai (bea ekspor maupun impor) dan penerimaan bukan pajak dari sumber-sumber daya alam.

Hasil-hasil simulasi ini harus digunakan sebagai indikasi saja. Secara khusus mereka menekankan kepada dampak fiskal langsung tahap pertama dan tidak termasuk dampak tidak langsung melalui pengaruh ekonomi yang lebih luas dari kejutan itu. Selain itu, mereka membutuhkan sejumlah asumsi (karena ketebatasan data dan statistika), dan tidak memperhitungkan fungsi reaksi kebijakan terhadap kejutan tersebut, seperti misalnya pemotongan belanja lain atau kemajuan pelaksanaan reformasi-reformasi fiskal lainnya.

**Tabel 6: Depresiasi Rupiah atau kenaikan harga minyak sebesar 10 persen berdampak langsung terhadap defisit APBN setidaknya sebesar 0,4 poin persentase dari PDB**

(triliun Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Dasar ( <i>Baseline</i> )		Simulasi 1		Simulasi 2:	
	2013	2014	Depresiasi Rupiah		Naiknya harga minyak	
			2013	2014	2013	2014
<b>Penerimaan</b>	<b>1.434</b>	<b>1.569</b>	<b>1.431</b>	<b>1.565</b>	<b>1.460</b>	<b>1.592</b>
<b>Pengeluaran</b>	<b>1.660</b>	<b>1.790</b>	<b>1.721</b>	<b>1.860</b>	<b>1.716</b>	<b>1.853</b>
Subsidi energi	297	312	342	362	335	355
BBM	198	205	234	246	231	243
Listrik	100	107	108	116	105	112
Transfer ke daerah	529	586	536	594	533	591
Tambahan belanja pendidikan 20%			10	12	9	10
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>-226</b>	<b>-221</b>	<b>-290</b>	<b>-295</b>	<b>-256</b>	<b>-261</b>
<b>sebagai persen dari PDB</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,3</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,7</b>
<i>Asumsi ekonomi utama</i>						
Kurs tukar (Rupiah/dolar AS)	10.400	11.400	11.440	12.540	10.400	11.400
Harga minyak (dolar AS/barel)	106	105	106	105	117	115

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia

#### Pembiayaan hutang bruto secara umum berada pada jalur yang tepat

Mengikuti APBN-P 2013 dan peningkatan proyeksi defisit sebesar Rp 70,9 triliun, kebutuhan pembiayaan hutang bruto untuk tahun 2013 meningkat sebesar Rp 51,4 triliun dibandingkan sebelumnya, menjadi Rp 330,8 triliun, menurut Ditjen Pengelolaan Utang. Penerbitan obligasi umumnya berada pada jalur yang tepat, dengan 25 persen dari sasaran yang telah direvisi untuk tahun 2013 yang masih harus dipenuhi pada awal kuartal terakhir, dan kondisi penerbitan telah membaik sejak bulan Juni, dengan penerbitan hutang sebesar Rp 104,9 triliun yang telah diterbitkan sejak awal bulan Juli, yang mana Rp 76 triliun merupakan hutang dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Lihat Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Presentasi Pertemuan Investor September 2013, tersedia secara *online*.

## 7. Penetapan kebijakan dan kemajuan reformasi yang berjalan dapat memainkan peran penting sejalan dengan penyesuaian neraca eksternal

**Perkembangan-perkembangan neraca eksternal membawa risiko jangka pendek terbesar terhadap pertumbuhan...**

Dalam skenario dasar, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami perlambatan dan kemudian stabil pada tingkat yang masih kokoh namun lebih sesuai dengan defisit neraca berjalan yang lebih berkelanjutan di bawah kondisi likuiditas dunia yang lebih ketat. Perkembangan ekonomi dan penetapan kebijakan, khususnya melambatnya pertumbuhan permintaan dalam negeri, peningkatan harga BBM bersubsidi bulan Juni, pengetatan kebijakan moneter setelahnya, dan berlanjutnya depresiasi Rupiah, seluruhnya bersifat kondusif dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prasyarat bagi pertumbuhan dan pembangunan. Risiko utama terhadap skenario dasar (*baseline*) ini adalah dengan berlangsungnya penyesuaian, dan diproyeksikan berlanjut, meningkatnya tekanan pembiayaan eksternal yang signifikan, misalnya karena perlemahan lebih lanjut yang signifikan dalam harga komoditas ekspor utama atau dinamika investasi masuk bersih. Hal itu akan membutuhkan penyesuaian yang lebih cepat melalui depresiasi lanjutan Rupiah yang signifikan, sehingga memberi tekanan pada cadangan devisa, dan membutuhkan pengetatan kebijakan moneter untuk menstabilisasikan neraca eksternal Indonesia, yang menurunkan tingkat kepercayaan dan semakin menurunkan pertumbuhan (lihat Kotak 3 untuk pembahasan tentang sensitivitas pertumbuhan melalui dampak investasi).

**...yang menekankan pentingnya keberlanjutan fleksibilitas kebijakan makroekonomi untuk memfasilitasi penyesuaian jangka pendek...**

Pengaturan kebijakan fiskal dan moneter Indonesia akan terus memegang peran penting dalam memfasilitasi penyesuaian yang kini berlangsung dan dalam meminimalkan risiko-risiko terkait. Namun terdapat *trade-off* antara tujuan membatasi inflasi, mendukung pertumbuhan dan menyesuaikan defisit neraca berjalan kepada kondisi pendanaan yang lebih ketat. Kebijakan moneter menghadapi tantangan dalam menyesuaikan suku bunga dan nilai tukar valuta sehingga dapat memberi perlindungan terhadap tekanan inflasi dengan meningkatnya tekanan biaya (seperti yang berasal dari pengaruh lemahnya mata uang atau kenaikan upah) sementara memfasilitasi perbaikan neraca eksternal, dan tanpa terlalu menghambat pertumbuhan ekonomi dan melemahkan neraca pemerintah dan swasta. Dengan pembahasan RAPBN 2014 yang sedang dilakukan oleh DPR, kebijakan fiskal menghadapi tantangan lemahnya pertumbuhan penerimaan dan peningkatan biaya pendanaan-hutang, yang meningkatkan pentingnya memperbaiki kualitas belanja dan mobilisasi penerimaan. Menjaga posisi fiskal yang berhati-hati secara keseluruhan, berkoordinasi dengan pengetatan kebijakan moneter, dapat membantu menjawab tantangan itu. Bertolak dari kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni, upaya reformasi lanjutan terhadap sistem subsidi energi yang tidak efisien dan distortif saat ini dapat membantu membebaskan belanja bagi pengeluaran pembangunan utama seperti infrastruktur dan kesehatan, dan juga membatasi risiko fiskal terhadap gejolak kurs tukar valuta atau kejutan harga minyak dunia.

**...menurunkan ketidakpastian melalui komunikasi dan perencanaan keadaan darurat...**

Adanya ketidakpastian yang berasal dari perlambatan momentum pertumbuhan, dan kondisi pendanaan eksternal yang rentan namun umumnya menegat, menjaga komunikasi yang jelas terhadap perubahan kebijakan dan penekanan yang kuat terhadap implementasinya dapat membantu mendorong tingkat kepercayaan. Kebijakan juga memainkan peran dalam memitigasi dampak negatif berbagai skenario, termasuk jika risiko-risiko terburuk terjadi. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan persiapan menghadapi krisis dalam beberapa tahun terakhir. Mekanisme koordinasi pemantauan dan tanggapan telah dibentuk untuk mendukung tanggapan yang fleksibel terhadap dampak dislokasi pasar. Pemerintah memiliki fasilitas pembiayaan fiskal darurat dengan jumlah sekitar 5 miliar dolar AS yang dapat digunakan dalam hal terjadi penurunan yang signifikan dalam kondisi pendanaan, sementara Bank Indonesia telah berupaya untuk mendapatkan tambahan jalur pertukaran (*swap*) bilateral tambahan dalam dolar AS.

**...dan terus mendorong kemajuan reformasi untuk**

Tekanan yang belakangan terjadi terhadap neraca eksternal dan pertumbuhan menjadi pengingat akan perlunya upaya lanjutan dalam meningkatkan diversifikasi ekspor dan dalam meningkatkan daya saing ekonomi untuk mendorong laju pertumbuhan dan pembangunan

**meningkatkan laju pertumbuhan Indonesia yang berkelanjutan**

yang lebih cepat. Depresiasi Rupiah akan mendorong daya saing dalam jangka pendek, namun pengaruhnya hanya akan bertahan bila tidak terkena tekanan biaya dalam negeri, seperti yang berasal dari kenaikan upah, dan jika kebijakan dan investasi disiapkan untuk meningkatkan fleksibilitas sisi penawaran. Upaya-upaya untuk meningkatkan daya saing dan lingkungan peraturan akan meringankan tekanan pendanaan eksternal jangka pendek dengan memberi stimulasi ekspor dan mendorong penanaman modal asing langsung, dan juga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan jangka panjang. Paket kebijakan Pemerintah, yang diumumkan pada tanggal 23 Agustus, berisi aturan-aturan yang menjawab sebagian masalah tersebut; lihat pada Bagian B.1.

**Kotak 3: Sensitivitas pertumbuhan PDB terhadap investasi**

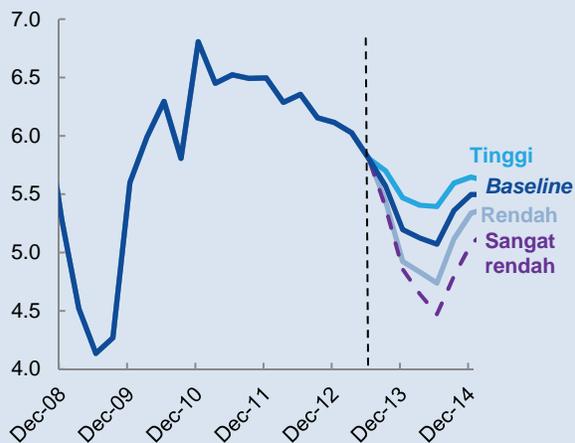
Investasi, yang merupakan 33 persen dari PDB dan telah menjadi pendorong utama bagi kinerja pertumbuhan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, merupakan kunci dari prospek ekonomi secara keseluruhan. Dalam skenario dasar (*base case*) Bank Dunia mengasumsikan pertumbuhan investasi akan tetap lemah selama sisa tahun 2013 dan masuk ke tahun 2014. Proyeksi ini berlandaskan pada perlambatan keuntungan perusahaan dan kondisi pendanaan yang lebih ketat. Investasi juga dapat menghadapi rintangan dengan peningkatan siklus politik menjelang pemilu nasional tahun 2014, dan yang berasal dari ketidakpastian yang masih ada yang melingkupi kebijakan dan peraturan.

Namun asumsi dasar investasi ini juga bergantung kepada risiko-risiko yang signifikan, dengan investasi tampaknya akan bersifat sensitif terhadap lintasan kebijakan moneter dalam negeri yang akan datang, harga komoditas dunia, kurs tukar valuta, kondisi pendanaan luar negeri, dan kondisi kredit dalam negeri. Sebagai contoh, pengetatan lebih lanjut dalam kebijakan moneter dalam negeri akan menghambat pertumbuhan investasi, sejalan dengan temuan IMF (2012) bahwa peningkatan suku bunga riil sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan sebesar 0,2 persen dalam pertumbuhan investasi. Namun analisis ini juga menemukan bahwa sebetulnya faktor yang memiliki dampak paling signifikan terhadap investasi di Indonesia adalah gejolak pada suku bunga jangka pendek, diikuti dengan gejolak kurs tukar valuta. Sebagai akibatnya, keberlanjutan gejolak pasar valuta dan keuangan yang belakangan terjadi memiliki potensi untuk membebani investasi secara lebih signifikan. Penurunan lebih lanjut pada harga-harga komoditas ekspor utama Indonesia, yang mendorong penurunan lebih lanjut dalam kondisi perdagangan Indonesia, dan kemungkinan tanggapan kebijakan yang terpicu oleh perkembangan yang buruk pada neraca luar negeri, juga akan menurunkan profitabilitas dan laba ditahan, dan biaya dan ketersediaan pendanaan investasi.

Prospek pertumbuhan PDB tahun 2014 peka terhadap lintasan investasi (Gambar 27). Deviasi sebesar 1 poin persentase dalam pertumbuhan investasi dari proyeksi dasar (*baseline*) tahun 2014 akan berakibat pada deviasi pertumbuhan PDB sebesar sekitar 0,3 poin persentase pada tahun 2014, membawa pertumbuhan tahunan ke kisaran 5,6 persen (naik dari pertumbuhan *baseline* sebesar 5,3 persen), atau turun mendekati 5,0 persen. Dalam skenario yang lebih buruk, dengan investasi melemah seperti yang terjadi pada waktu krisis keuangan dunia (sekitar 2 poin persentase lebih rendah dari *baseline*), maka pertumbuhan PDB untuk tahun 2014 akan lebih rendah sekitar 0,6 poin persentase, pada kisaran 4,7 persen (Gambar 27).

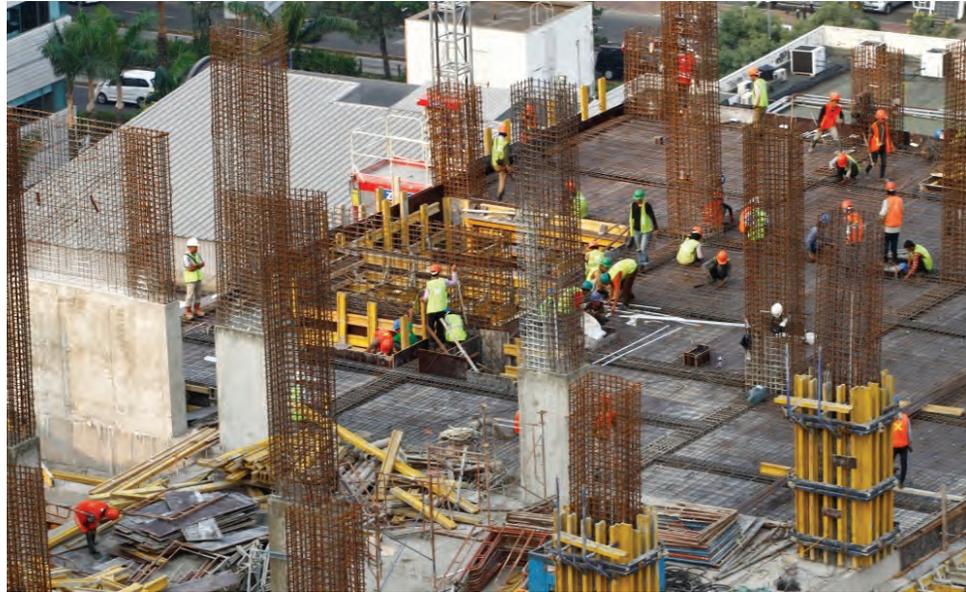
Catatan: Lihat IMF (2012) *Selected Issues Paper*, September 2012, IMF Country Report No. 12/278

**Gambar 27: Perkiraan pertumbuhan PDB peka terhadap prospek investasi**  
(pertumbuhan PDB, yoy, persen)



Catatan: Lintasan “tinggi” dan “rendah” mengasumsikan pertumbuhan investasi adalah 1 poin persentase lebih tinggi dan lebih rendah dari *baseline* 2014. Skenario “sangat rendah” mengasumsikan bahwa investasi akan berada 2 poin persentase lebih rendah dari *baseline* 2014, perlambatan yang setara dengan yang tercatat pada krisis keuangan tahun 2008/9  
Sumber: BPS; proyeksi staf Bank Dunia

## B. Beberapa perkembangan terkini perekonomian Indonesia



### 1. Paket kebijakan Pemerintah yang diumumkan pada bulan Agustus

**Menanggapi tekanan pasar, Pemerintah mengumumkan suatu paket kebijakan pada bulan Agustus ...**

Seperti dibahas pada Bagian A, tekanan pasar keuangan Indonesia meningkat pada pertengahan bulan Agustus, setelah pengumuman statistik neraca pembayaran triwulanan kedua yang menunjukkan defisit neraca berjalan yang lebih besar dari perkiraan, bersamaan penurunan minat investor terhadap aset-aset pasar berkembang di seluruh dunia. Sebagai tanggapan, Pemerintah Indonesia mengumumkan suatu paket kebijakan (“paket”) pada tanggal 23 Agustus, agar bisa menanggapi ketidakseimbangan eksternal Indonesia, dengan mendorong ekspor dan membatasi impor, mempromosikan investasi untuk meningkatkan kapasitas pada sisi penyediaan dan menaikkan produktivitas, serta menyediakan peluang kerja selama kemungkinan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Bagian ini memberikan tinjauan singkat tentang aturan-aturan yang telah diumumkan. Sementara itu ringkasan akan tanggapan kebijakan diumumkan oleh Bank Indonesia dan OJK disediakan dalam pembahasan bagian A.

**... yang bertujuan untuk stabilisasi dan perbaikan struktural, yang disusun dalam empat pilar**

Paket kebijakan itu berfokus pada stabilisasi ekonomi dan perbaikan struktural dan berisi empat pilar. Pertama, mendukung penanaman modal asing secara langsung (FDI) melalui “penghilangan hambatan” proyek-proyek investasi strategis utama, menyederhanakan persyaratan perizinan, dan mempercepat revisi daftar negatif investasi. Kedua, aturan-aturan itu hendak meningkatkan saldo neraca berjalan, dengan memberikan potongan pajak bagi perusahaan-perusahaan berorientasi ekspor, meningkatkan bea masuk sejumlah barang mewah, dan meningkatkan kapasitas biodiesel produksi dalam negeri ke dalam komposisi BBM (untuk membantu mengurangi impor BBM). Ketiga, aturan-aturan itu bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ketenagakerjaan, termasuk potongan pajak bagi sektor-sektor padat karya, pelonggaran sejumlah batasan pada kawasan-kawasan berikat, dan revisi terhadap proses penetapan upah minimum. Keempat, aturan-aturan itu hendak menurunkan inflasi, terutama dengan mengganti pembatasan impor dengan mekanisme berbasis harga untuk daging dan produk holtikultura.

## a. Langkah-langkah untuk mendukung investasi asing langsung

<b>Perubahan daftar negatif investasi (DNI) telah diumumkan...</b>	Implementasi awal dari aturan-aturan pendukung investasi memfokuskan pada percepatan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI), yang menetapkan batasan bagi investasi asing pada bidang usaha di Indonesia. Revisi DNI telah dibahas oleh Pemerintah dan dibahas dengan sektor swasta yang telah berlangsung sejak tahun 2013.
<b>...yang mengikuti sejumlah prinsip pedoman</b>	Pemerintah telah mengumumkan bahwa revisi DNI akan mengikuti sejumlah prinsip-prinsip pedoman. Pertama, DNI yang telah direvisi haruslah “ramah-investor”, sejauh diperkenankan oleh UU yang ada (karena membatasi kewenangan Peraturan Presiden. Sebagai contoh, UU Hortikultura membatasi kepemilikan asing di dalam usaha hortikultura sampai 30 persen, batas yang akan disertakan ke dalam DNI yang baru). Kedua, perubahan-perubahan DNI yang diusulkan oleh kementerian-kementerian yang memiliki efek peningkatan pembatasan tidak akan diterima. Ketiga, klasifikasi industri akan disederhanakan, dan peraturan pengawasan dari industri itu akan diselaraskan, untuk mencegah duplikasi (misalnya, jika suatu sektor usaha kini diatur oleh dua kementerian, maka harus dikurangi menjadi hanya satu kementerian, dengan peraturan yang paling tidak mengikat yang akan berlaku). Prinsip-prinsip pemandu revisi DNI itu menunjukkan bahwa DNI yang baru akan tetap membatasi kepemilikan asing yang berlaku, sesuai UU yang ada, di sektor hortikultura, namun melonggarkan batas kepemilikan asing pada sejumlah kecil bidang-bidang lain, terutama pariwisata, farmasi, industri dan transportasi.
<b>Revisi DNI yang “ramah-investor” akan membantu mengurangi ketidakpastian peraturan, walau masih ada tantangan yang besar, baik dalam strategi Pemerintah yang lebih luas...</b>	DNI yang baru belum diumumkan atau diberlakukan, dan penundaan dalam finalisasi dan penerbitan DNI baru ini seharusnya dihindari, karena sebetulnya DNI yang baru itu akan memberikan kepastian tambahan terhadap batas kepemilikan asing di berbagai bidang. Secara umum, penekanan pada pedoman-pedoman untuk percepatan perubahan mendorong kerangka investasi asing yang lebih terbuka. Secara prinsip, hal ini akan bersifat positif bagi investasi asing. Selain perubahan DNI, masih terdapat ruang peningkatan bagi keseluruhan lingkungan peraturan perundangan untuk investasi asing. Prosedur perubahan yang lebih jelas bagi pembatasan investasi dan strategi komunikasi akan dapat membantu meningkatkan kejelasan dan transparansi kebijakan tersebut. Selain itu, memastikan bahwa DNI akan menjadi daftar tunggal pembatasan investasi yang lengkap merupakan hal yang dibutuhkan, karena sebelumnya DNI telah digantikan oleh aturan-aturan pembatasan investasi yang baru yang diperkenalkan lewat UU sektoral, seperti UU untuk hortikultura dan pos, yang menambah kerumitan dalam lingkungan peraturan perundangan.
<b>...dan birokrasi investasi, dengan upaya untuk menyederhanakan perizinan sedang berjalan...</b>	Langkah-langkah tambahan juga diambil untuk menyederhanakan birokrasi, dengan meningkatkan efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (PTSP), dan memangkas jenis-jenis perizinan yang terkait dengan kegiatan investasi. Sebagai langkah awal, Pemerintah akan menekankan terhadap penyederhanaan perizinan sektor yang penting secara strategis, yaitu sektor minyak dan gas bumi (migas), dengan memangkas jenis perizinan investasi migas dari enam puluh sembilan yang ada sekarang menjadi delapan kelompok perizinan. Kementerian Koordinator Perekonomian dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bekerja sama dalam penyusunan rencana aksi untuk menerapkan upaya reformasi itu dalam waktu satu tahun.
<b>...yang dapat disertakan ke dalam rencana reformasi lintas sektor yang lebih luas bagi lingkungan peraturan perundangan</b>	Penekanan terhadap penyederhanaan sistem perizinan investasi merupakan langkah yang patut disambut, karena sistem yang ada sangatlah rumit, yang seringkali memaksa para investor untuk memperoleh izin-izin dan otorisasi dari berbagai kementerian dan lembaga negara. Namun dibanding mengambil pendekatan khusus ( <i>ad hoc</i> ) penyederhanaan perizinan bagi tiap sektor – dimulai dengan migas – pada akhirnya mungkin lebih efisien untuk merencanakan, mengkomunikasikan dan melaksanakan persyaratan perizinan dan perubahan proses pada konteks rencana reformasi yang lebih besar, untuk meningkatkan lingkungan peraturan bagi usaha di seluruh sektor (termasuk sektor yang memiliki investor dengan ukuran yang lebih kecil dibanding sektor migas, yang melihat peraturan yang rumit sebagai kendala yang lebih besar dibanding perusahaan besar pada industri migas).

## b. Langkah-langkah memperbaiki defisit neraca berjalan dan menjaga stabilitas Rupiah

**Langkah-langkah dalam bidang perdagangan terfokus untuk mendukung ekspor...**

Tekanan terhadap neraca berjalan datang dari gabungan antara perlemahan penerimaan ekspor dan kuatnya permintaan impor, seperti dibahas pada Bagian A. Paket ini bertujuan, pertama, untuk mendukung ekspor dengan memberikan potongan pajak bagi sektor padat karya (tekstil, alas kaki, perabotan, mainan anak dan panganan), dengan penurunan pajak pendapatan perusahaan sebesar 25-50 persen dari jumlah penghasilan terutang, bergantung pada tingkat orientasi ekspornya. Potongan pajak itu bersifat sementara, berlaku untuk sisa tahun pajak dari waktu berlakunya peraturan pelaksana (yaitu dari September hingga Desember 2013), dan juga memperkenankan penundaan pembayaran pajak tanpa denda hingga tiga bulan. Insentif seperti ini sulit untuk menilai dampak *ex ante*, dan pelaksanaan dan biaya fiskal sebaiknya se transparan mungkin. Kedua, paket bertujuan mendorong ekspor mineral dengan memperkenankan para eksportir yang memperoleh persetujuan untuk menyerahkan revisi rencana kerja tahunan demi meningkatkan volume ekspornya untuk tahun 2013. Dalam *press release* tanggal 29 Agustus, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menekankan bahwa peraturan-peraturan di dalam paket itu hanya berlaku hingga bulan Januari 2014. Pembatasan ekspor bijih mineral mentah (mulai berlaku pada bulan Januari 2014) tampaknya masih akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal semula.

**...dan menurunkan jenis-jenis impor tertentu**

Langkah-langkah untuk mengurangi permintaan impor terpusat pada impor BBM dan barang mewah. Pertama, syarat penggunaan biodiesel sebagai bagian dari keseluruhan bahan bakar meningkat, dengan tujuan untuk mengurangi kebergantungan terhadap bahan bakar solar yang berasal dari fosil. Peraturan ini bersifat jangka panjang, dengan peraturan pelaksanaan yang menetapkan bahwa peningkatan porsi biodiesel tahunan di dalam gabungan bahan bakar akan terus berlangsung hingga tahun 2025, disesuaikan dengan kelompok penggunaannya. Tantangan pelaksanaan aturan ini, dan dampak yang lebih luas dari kebijakan tersebut akan sangat penting untuk bisa diakses, misalnya di sektor lingkungan dan pertanian. Kalau masih kurang yakin seberapa cepatnya peraturan ini bisa dilaksanakan atau dampak terbesar apa yang diperoleh terhadap defisit neraca berjalan, karena mempunyai potensi mendorong substitusi dari ekspor minyak kelapa sawit. Kedua, pajak barang mewah tertentu, seperti impor mobil mewah dan barang-barang konsumsi bermerek dengan harga yang tinggi, meningkat sebesar 25-50 persen. Peraturan ini, walau simbolis, tampaknya tidak akan membawa dampak material terhadap keseluruhan permintaan impor, karena barang-barang konsumsi yang termasuk dalam kelompok itu hanya memiliki porsi yang kecil (kurang dari 10 persen) dari keseluruhan impor. Sebagai bagian dari peraturan pelaksanaannya, pajak-pajak untuk sejumlah kelompok barang juga diturunkan, yang dapat sedikit mengimbangi dampak keseluruhan dari peraturan itu terhadap permintaan barang-barang impor.

## c. Langkah-langkah untuk mendukung ketenagakerjaan

**Fokus pada industri padat karya pada kawasan-kawasan berikat...**

Selain potongan pajak bagi perusahaan-perusahaan padat karya seperti yang dibahas di atas, langkah-langkah pendukung ketenagakerjaan pada dasarnya terdiri dari dua bagian. Pertama, peraturan yang berkaitan dengan kawasan berikat memperoleh pelonggaran, misalnya memperkenankan perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan itu untuk menjual lebih banyak hasil produksinya ke dalam negeri (dinaikkan dari 25 menjadi 50 persen), dan dengan penambahan penggunaan sub-kontrak. Kawasan berikat adalah tempat terpusatnya pabrik-pabrik manufaktur ringan yang padat karya, dan mereka menerima insentif sebagai imbalan melakukan ekspor atas sebagian besar hasil produksinya. Walaupun aturan-aturan yang diumumkan sebagai bagian dari paket bulan Agustus dapat terbukti bersifat positif bagi ketenagakerjaan, pengalaman internasional menunjukkan bahwa aturan-aturan yang membuka pasar dalam negeri kepada perusahaan-perusahaan di kawasan berikat juga dapat membawa tambahan biaya dan tantangan peraturan, dan mempengaruhi insentif. Sebagai contoh, karena perusahaan-perusahaan dikenai persyaratan pajak yang berbeda terhadap porsi-porsi bagian produksinya yang berlainan, hal ini memiliki potensi menurunkan insentif bagi perusahaan-perusahaan itu untuk melakukan ekspor).

**...dan pada penetapan upah minimum** Kedua, perubahan yang diusulkan terhadap mekanisme untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk mencegah pemberhentian tenaga kerja yang disebabkan oleh kenaikan upah minimum yang terlalu tinggi. Usulan reformasi ini menguraikan mekanisme bagi proses penetapan upah minimum yang lebih pasti, sederhana dan adil, yang bertujuan untuk mendukung pemilik perusahaan, pekerja dan pencari kerja, dengan mendorong penggunaan proses penetapan upah yang lebih berdasarkan bukti dan tidak dipolitisasi, demi kenaikan upah tahunan yang lebih pasti dan mudah diperkirakan, dan dengan memperkenalkan peningkatan dalam struktur pemerintahan/tata kelola yang menurunkan lingkup pembuatan keputusan secara diskresioner.<sup>9</sup>

**Reformasi proses dan pelaksanaan negosiasi upah minimum bersifat rumit...**

Reformasi proses penetapan upah minimum merupakan hal yang rumit. Negosiasi dan persetujuan akhir dilakukan pada tingkat provinsi dan sektor (dan seringkali hingga ke tingkat kabupaten dan sub-sektor), yang lebih menyulitkan komunikasi dan kepatuhan dengan penyesuaian yang berdasarkan rumus. Secara lebih umum, penjaminan kepatuhan perusahaan dan pegawai dengan peraturan upah minimum (baik dengan revisi atau tidak) bukanlah hal yang mudah, dan membutuhkan pemantauan dan koordinasi pada tingkat pusat, antara Kementerian Tenaga Kerja dan kementerian-kementerian terkait demi implementasi yang efektif, dan juga antara pemerintah pusat dan daerah dan para pelaku yang relevan (Pemerintah Kabupaten dan DPRD).

**...namun dapat membawa dampak positif terhadap pasar tenaga kerja**

Penyesuaian berdasar formula, jika diterapkan, akan membuat peningkatan upah minimum yang akan datang menjadi lebih pasti dan mudah diperkirakan, dan lebih erat mencerminkan perkembangan pasar tenaga kerja, dengan penyesuaian yang lebih baik terhadap kejutan. Peningkatan tata kelola dan penegakan kebijakan pemantauan yang lebih ketat juga akan meningkatkan kepatuhan kepada sistem tersebut. Kalau diterapkan dengan benar, reformasi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kepastian, kesederhanaan dan transparansi dalam penetapan upah minimum, mendukung keadilan dan menyeimbangkan tarik-menarik (*trade off*) dalam penetapan upah minimum, yang merupakan faktor harga yang sangat penting bagi banyak pekerja dan dunia usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui dampaknya terhadap penetapan upah lintas ekonomi secara luas.

#### d. Langkah-langkah untuk menurunkan inflasi

**Pembatasan kuantitatif impor pada sejumlah bahan pangan digantikan dengan mekanisme berdasarkan harga**

Penurunan pajak barang mewah bagi sejumlah produk, seperti yang disinggung di atas, dan juga penghapusan PPN bagi buku-buku pelajaran dan keagamaan, akan menurunkan harga produk-produk tersebut, namun kecilnya porsi bagian mereka pada indeks harga konsumen membatasi dampak aturan itu terhadap tingkat harga yang lebih umum. Sebaliknya, pembatasan perdagangan yang ditetapkan pada tahun 2012 membawa dampak yang sangat besar terhadap inflasi bahan pangan pada paruh pertama tahun 2013, sebelum mulai turun sebagian. Sebagai bagian dari paket kebijakan, langkah-langkah tambahan sedang diambil untuk menggeser pembatasan jumlah impor ke pengelolaan selisih antara harga dalam dan luar negeri untuk daging sapi dan produk-produk hortikultura, yang akan meningkatkan transparansi dan agak menurunkan risiko peningkatan harga yang tajam karena kelangkaan barang impor. Paska pengumuman paket kebijakan tersebut juga terdapat sejumlah langkah-langkah tambahan untuk melonggarkan pembatasan perdagangan, terutama bagi kacang kedelai, dengan penundaan izin impor dan penghapusan (sementara) dari tarif 5 persen. Namun, dengan adanya tantangan-tantangan dalam koordinasi kebijakan lintas kelembagaan, masih harus terus dilihat apakah posisi perubahan kebijakan impor produk-produk tersebut dapat diterapkan secara efektif.

<sup>9</sup> Lihat Triwulanan edisi bulan Desember 2012 tentang rincian sistem dan negosiasi upah minimum yang lalu.

## e. Menilai paket kebijakan

**Pencapaian tanggapan kebijakan yang optimal terhadap perubahan kondisi ekonomi, dan ketika menghadapi pasar yang bergejolak, merupakan hal yang rumit**

Tidak ada paket kebijakan optimal yang sudah siap pakai dalam menanggapi memburuknya kondisi pasar dan pergeseran kondisi ekonomi. Sebaliknya, para pengambil kebijakan di Indonesia menghadapi tantangan yang rumit, walau terdapat sejumlah aspek-aspek yang serupa dengan negara-negara ekonomi berkembang lainnya, seperti Brasil dan India (yang mana kondisi pendanaan eksternalnya juga menegat, dan pertumbuhan telah melambat). Sementara terdapat banyak potensi kebijakan, jangan dilupakan bahwa terdapat biaya implementasi dan potensi *trade off* yang harus dipertimbangkan. Sebagai contoh, menjaga kuatnya pertumbuhan ketenagakerjaan dan upah merupakan tujuan yang diinginkan, namun penerapan langkah-langkah untuk mendukung ketenagakerjaan yang memberi stimulasi ke ekonomi dapat berlawanan dengan moderasi pada pertumbuhan permintaan secara keseluruhan yang mungkin dibutuhkan untuk mengendalikan defisit neraca berjalan. Intervensi kebijakan juga dapat merintangai penyesuaian-penyesuaian lainnya, seperti dalam harga relatif utama, yang dapat membantu menjaga keseimbangan dalam dan luar negeri, dan membawa tambahan ketidakpastian bagi lingkungan peraturan perundangan.

**Paket kebijakan Pemerintah tampaknya memiliki dampak positif yang luas terhadap ekonomi dan dapat dibangun lebih lanjut...**

Sejalan dengan tantangan-tantangan yang kini dihadapi oleh ekonomi Indonesia, kebijakan-kebijakan yang diumumkan oleh Pemerintah tampaknya memiliki fokus yang kuat pada tingkat mikro. Seperti biasanya, sifat dan pemilihan waktu implementasi aturan-aturan yang diumumkan itu sangatlah penting dalam menentukan tingkat efektivitasnya dalam pencapaian sasaran-sasarannya. Misalnya, peraturan yang berhubungan dengan daftar negatif masih perlu diselesaikan kira-kira enam minggu setelah paket ini diumumkan. Paket kebijakan itu juga harus dievaluasi dari sudut pandang strategi Indonesia yang lebih luas untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan pada jangka menengah. Dalam konteks ini, paket kebijakan itu harus dilihat sebagai bagian dari proses reformasi dan implementasi kebijakan yang berjalan, yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

**...dengan tambahan “hasil cepat” di bidang perdagangan...**

Dengan adanya tekanan terhadap neraca eksternal Indonesia dan kebutuhan konsekuensinya untuk meningkatkan daya saing, tambahan “hasil cepat (*quick wins*)” di bidang perdagangan dapat diselidiki, terutama dalam fasilitasi perdagangan, misalnya dengan meningkatkan manajemen risiko dan prosedur perizinan kepabeanan untuk mengurangi *dwell time* (waktu tunggu) (lihat pada Bagian berikut).

**...dan menjaga kemajuan dalam reformasi sektor fiskal**

Bertitik tolak pada paket kebijakan bulan Agustus dalam bidang kebijakan fiskal, suatu sinyal kebijakan yang sangat positif, yang dapat membantu kualitas belanja secara keseluruhan, berupa kemajuan dalam reformasi subsidi energi lanjutan, seperti penyesuaian menuju mekanisme penyesuaian harga BBM yang lebih transparan dan mudah diramalkan, bersamasama dengan pendalaman dan perluasan kerangka perlindungan sosial. Selain itu, Pemerintah dapat secara proaktif meningkatkan kesiapannya untuk menghadapi perlambatan pertumbuhan dengan menempatkan mekanisme pemantauan dan tanggapan yang sistematis untuk memberikan perlindungan sosial sesuai dengan sasaran dan secara efektif. Penting untuk memastikan bahwa posisi fiskal seperti yang diuraikan dalam anggaran tahun 2014 masih dalam pembahasan, tetap berhati-hati dan terkoordinasi dengan kebijakan moneter. Dorongan yang kuat pada pengaturan penerimaan dapat mendukung hal itu dengan membatasi kebutuhan pendanaan hutang, mengkonsolidasikan penguatan dalam neraca pemerintah yang telah dicapai oleh Indonesia, sementara peningkatan lebih jauh dalam pelaksanaan anggaran dapat membantu mendukung pertumbuhan. Sementara beberapa langkah tersebut tampak seperti langkah-langkah jangka panjang, mereka dapat membawa dampak positif jangka pendek dengan memberi sinyal tentang arah kebijakan dan lintasan pertumbuhan Indonesia.

## 2. Meningkatkan konektivitas melalui peningkatan kinerja pelabuhan

**Peningkatan konektivitas internasional, seperti dengan menurunkan waktu tinggal peti kemas (*dwell time*) pada pelabuhan-pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, dapat berperan besar untuk mendukung ekspor dan investasi...**

Seperti ditekankan pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), buruknya konektivitas telah diketahui sebagai salah satu kendala utama bagi pertumbuhan di Indonesia, yang merintang agenda pembangunan. Kendala kapasitas dalam infrastruktur konektivitas dan kelemahan-kelemahan dalam pengaturan kelembagaan masih terus membawa pengaruh buruk terhadap kinerja logistik di Indonesia, mendorong naiknya biaya dan menurunkan daya saing ekspor. Buruknya konektivitas juga merintang upaya-upaya untuk menarik investasi dalam kegiatan proses manufaktur, dengan semakin tingginya biaya transportasi bahan-bahan yang diimpor.

Dengan demikian upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja konektivitas internasional Indonesia memiliki peran yang penting dalam meningkatkan daya saing ekspor Indonesia dan daya tariknya bagi investasi jangka panjang, keduanya yang merupakan bidang kebijakan yang sedang mendapat fokus, dalam kaitannya dengan memburuknya neraca eksternal Indonesia yang belakangan terjadi. Bagian ini mengamati salah satu kuncinya, yaitu tantangan-tantangan praktis dalam meningkatkan konektivitas internasional Indonesia – menurunkan waktu tinggal peti kemas (*dwell time*) pada pelabuhan peti kemas internasional utama Indonesia, pelabuhan Tanjung Priok.

**...dalam meningkatkan daya saing jangka panjang sektor manufaktur Indonesia dengan meningkatkan rantai nilai tambah...**

Peningkatan dalam konektivitas internasional dapat mendukung kemampuan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk bergerak naik pada mata rantai pasokan. Potensi pertumbuhan Indonesia yang besar dalam sektor manufaktur dan perdagangan internasional telah banyak diketahui, namun realisasi potensi tersebut menghadapi sejumlah tantangan. Sebagian besar perusahaan-perusahaan di Indonesia kini bergerak dalam bidang pemrosesan dasar, yang merupakan peringkat yang rendah dalam rantai pasokan regional dan global. Agar industri Indonesia dapat bergerak naik pada rantai pasokan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah hasil produksinya dan menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih berkualitas, akan membutuhkan berbagai peningkatan kebijakan dan infrastruktur, termasuk reformasi yang signifikan terhadap lingkungan usaha, peraturan tenaga kerja, akses kepada pendanaan, inovasi dan konektivitas yang lebih baik. Tidak semua faktor-faktor tersebut dapat dilakukan dengan seketika. Namun dalam jangka pendek maupun menengah, perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat memetik manfaat yang signifikan dari keterbukaan akses terhadap bahan masukan (*input*) internasional yang berkualitas pada tingkat harga pasar dunia.

**...dan memfasilitasi pertumbuhan produktivitas melalui transfer teknologi melalui akses terhadap impor masukan (*input*)**

Konektivitas internasional yang lebih baik juga dapat membantu mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang. Secara keseluruhan, penurunan unit biaya transportasi dan teknologi informasi dapat menghemat biaya pengelolaan kegiatan jarak jauh. Sebagai akibatnya, perusahaan-perusahaan manufaktur multi-nasional telah membagi-bagi rantai pasokannya dan melaksanakan tahapan-tahapan produksi pada negara-negara yang berlainan, berdasarkan kepada kekayaan alam dan keunggulan komparatifnya. Pada jangka panjang, keterlibatan di dalam jaringan produksi global ini akan memfasilitasi transfer teknologi, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan, dan juga kepada peningkatan permintaan bagi *input* domestik.<sup>10</sup> Dengan demikian, penjaminan bahwa proses impor barang-barang dapat dilakukan seefisien mungkin merupakan hal yang sangat penting bagi pembangunan jangka panjang Indonesia.

### a. Peningkatan kinerja pelabuhan: kunci untuk membuka perdagangan

**Masalah fasilitasi perdagangan dan transportasi merupakan beberapa**

Saat ini Indonesia memiliki tingkat perbandingan yang buruk terhadap negara-negara berkembang Asia lainnya dalam pengukuran transportasi dan logistik, seperti biaya, efisiensi dan kualitas, termasuk infrastruktur, bea cukai dan kompetensi industri logistik. (Gambar 28). Rendahnya investasi pada infrastruktur jalan dan pelabuhan berkontribusi kepada

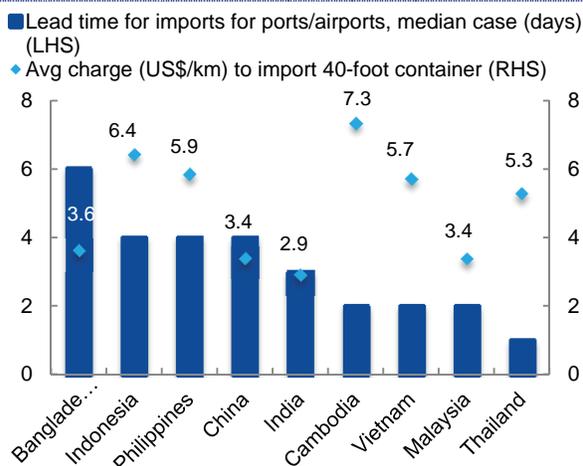
<sup>10</sup> Gambaran tentang statistik nilai tambah perdagangan yang menunjukkan pentingnya impor bahan setengah jadi bagi ekspor manufaktur Indonesia, lihat pada Triwulanan edisi bulan Maret 2013.

**kendala terbesar bagi pelaku perdagangan di Indonesia**

kritisnya masalah kemacetan dan dengan sendirinya menyebabkan buruknya kinerja logistik di Indonesia. sementara peningkatan infrastruktur fisik memang merupakan hal yang sangat penting, hal itu merupakan upaya jangka panjang, sehingga menjadikan peningkatan kinerja sebagai upaya jangka pendek yang utama untuk meringankan beban kapasitas. Hal ini merupakan hal yang dijumpai pada pelabuhan Tanjung Priok, gerbang perdagangan utama di Indonesia. Pelabuhan itu menangani lebih dari dua per tiga perdagangan internasional Indonesia. Tanjung Priok telah mencapai kapasitas maksimum sejak lama, dan karena terminal peti kemas internasional yang baru akan siap beroperasi pada tahun 2018, kini Pemerintah memfokuskan kepada langkah-langkah peningkatan efisiensi pelabuhan tersebut.

**Gambar 28: Indonesia tertinggal dari negara Asia lain dalam biaya dan kecepatan logistik...**

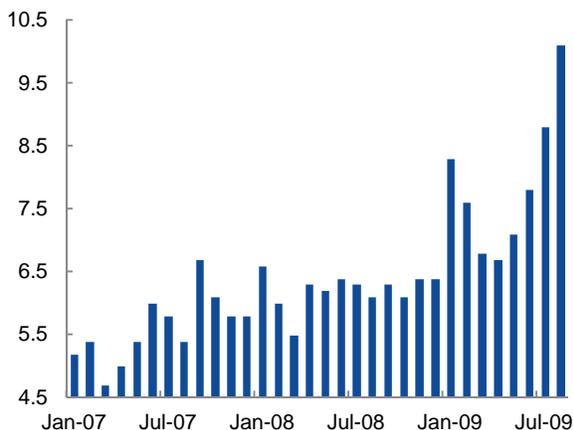
(waktu pemenuhan impor, hari dan biaya peti kemas, dolar AS)



Sumber: Indikator Kinerja Logistik 2012, Bank Dunia

**Gambar 29: ...dan waktu tinggal peti kemas di pelabuhan terpenting, Tanjung Priok, terus meningkat**

(rata-rata waktu tinggal peti kemas impor, hari)



Sumber: Jakarta International Container Terminal (JICT)

**Kinerja pelabuhan merupakan salah satu bidang terkritik dalam reformasi fasilitasi perdagangan...**

Sebagai gerbang ke pasar dunia, pelabuhan-pelabuhan merupakan titik kunci dan pertukaran utama bagi arus pengiriman dalam dan luar negeri. Pelabuhan merupakan tempat di mana terjadi paling banyak transaksi dan dengan demikian, juga merupakan tempat paling banyak terjadinya perlambatan. Pada koridor perdagangan, setidaknya 50 persen perlambatan terjadi pada pelabuhan tempat masuknya barang.

**...dengan waktu tinggal peti kemas sebagai unsur kinerja pelabuhan yang sangat penting**

Waktu tinggal peti kemas (*dwell time*) didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan oleh barang muatan atau kargo di dalam batas pelabuhan, dari saat kargo dibongkar dari kapal dan disimpan di darat hingga saat kargo itu meninggalkan pelabuhan melalui rel kereta maupun jalan darat. Pemangkasan waktu tinggal peti kemas akan memungkinkan pelabuhan untuk meningkatkan volume, pendapatan dan mendorong daya saing dibanding pelabuhan-pelabuhan serupa di suatu negara atau suatu wilayah. Angka waktu tinggal peti kemas ini umumnya digunakan untuk menarik jalur dan perusahaan pelayaran dan lalu lintas pengiriman barang ke suatu pelabuhan, sehingga memberikan insentif yang kuat kepada pihak otoritas pelabuhan dan operator terminal peti kemas untuk meningkatkan indikator kinerja ini.

**Lamanya *dwell time* meningkatkan biaya perdagangan secara keseluruhan, yang mempengaruhi kegiatan produktif, terutama industri yang berorientasi ekspor dan ekspor kembali**

Bagi barang-barang yang merupakan bahan setengah jadi yang akan diproses lebih lanjut di dalam suatu mata rantai pasokan, pengiriman yang tepat waktu merupakan hal yang berharga. Ketidakandalan dan ketidakpastian membawa biaya yang dapat merintangi investasi, meningkatkan persediaan dan biaya penyimpanannya, mengurangi skala ekspansi perusahaan dan menghalangi dimulainya suatu prakarsa ekspor baru. Perlambatan juga membawa pengaruh yang dramatis bagi kapasitas terminal, kinerja dan kebutuhan investasi, yang pada gilirannya meningkatkan biaya dan mengakibatkan ketidakpastian yang lebih besar, sehingga membentuk suatu lingkaran setan. Akhirnya, bagi pelabuhan-pelabuhan yang terletak pada daerah perkotaan yang padat, sangatlah penting untuk menjaga arus barang-

barang dan lalu lintas, karena terjadinya kemacetan dan peningkatan tajam dalam waktu tinggal peti kemas akan membawa dampak yang sangat mengganggu bagi perdagangan dan lingkungan pelabuhan-kota.

**Waktu tinggal peti kemas Waktu tinggal peti kemas impor sangatlah penting bagi kinerja pelabuhan karena biaya dan penundaan waktu seringkali lebih besar pada impor dibanding ekspor**

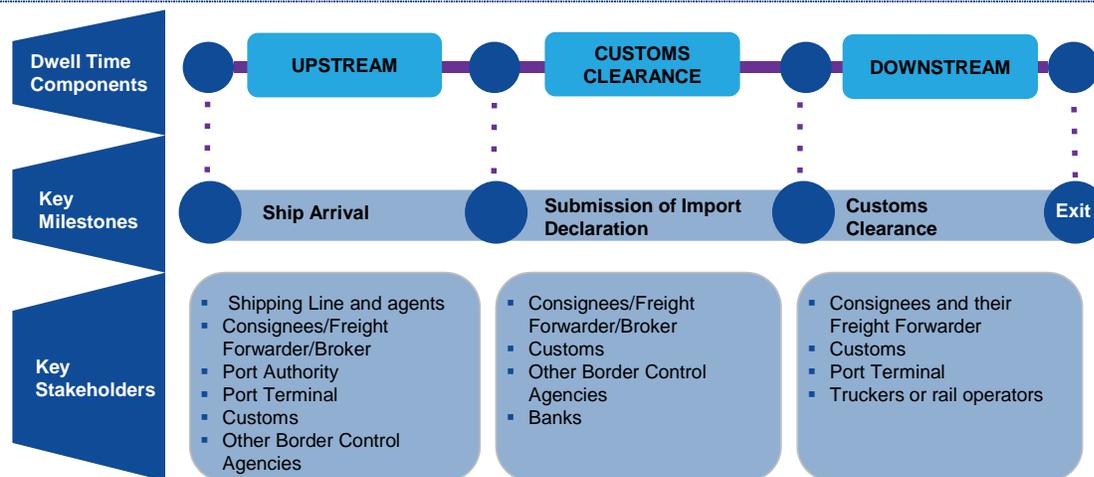
Fokus pada peningkatan waktu tinggal peti kemas peti kemas bagi impor (yaitu peti kemas yang masuk ke suatu negara) umumnya sesuai bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Bagi banyak negara volume ekspor secara agregat biasanya lebih rendah dibanding impor, namun yang lebih penting, waktu tinggal peti kemas untuk ekspor yang menuju ke negara lain umumnya rendah (rata-rata satu hingga dua hari). Impor melibatkan hampir seluruh pengawasan perbatasan, dan menyebabkan beban biaya dan waktu yang lebih tinggi dibanding ekspor. Dalam hal manapun, perdagangan kedua arah itu menggunakan pemberi jasa yang sama, sehingga peningkatan kualitas layanan-layanan tersebut akan membawa manfaat bagi seluruh pelaku perdagangan.

**b. Melawan dibawah tekanan untuk tetap melaju**

**Waktu tinggal peti kemas di Tanjung Priok telah meningkat hampir dua kali lipat dalam dua tahun terakhir**

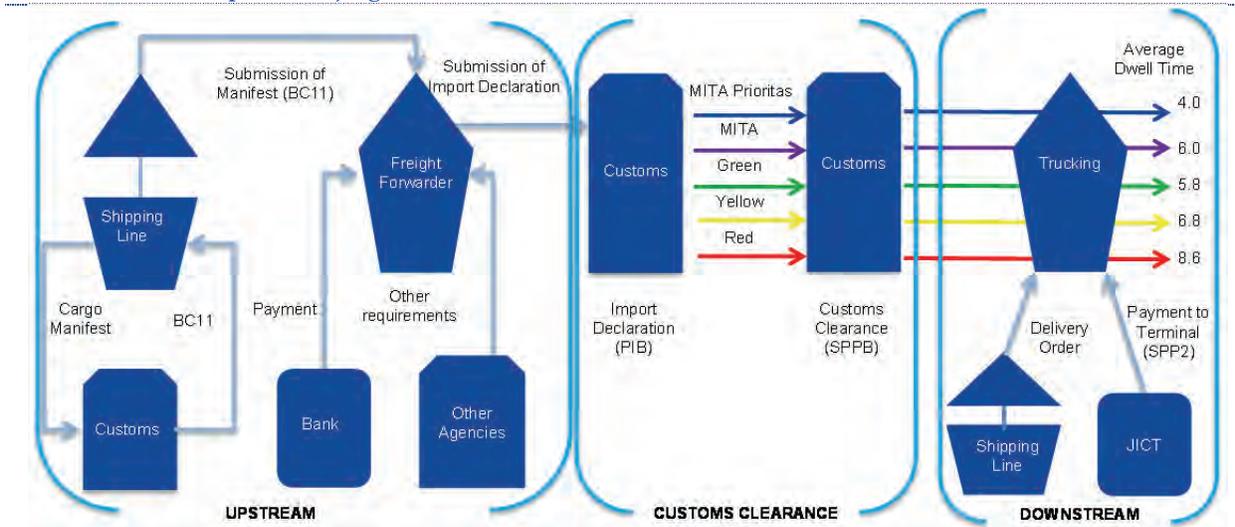
Menurut perkiraan yang terbaru, rata-rata waktu tinggal peti kemas impor di Tanjung Priok telah meningkat hampir dua kali lipat dari 5,2 hari pada bulan Januari 2011 menjadi 10,1 hari pada bulan Agustus 2013 (Gambar 29). Untuk memahami faktor-faktor di belakang semakin cepatnya penambahan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dan melepaskan peti-peti kemas dari pelabuhan, komponen-komponen waktu tinggal peti kemas perlu dicermati. Komponen waktu tinggal peti kemas impor dapat dibagi menjadi tiga tahapan yang berbeda yang terkait dengan proses-proses yang berlainan, tanggung jawab dan keterkaitan badan yang berbeda (Gambar 30). Komponen hulu terdiri dari waktu antara tibanya kapal dan penyerahan surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kepada Bea Cukai. Bagian pengurusan kepabeanan merujuk pada waktu dari penyerahan surat PIB hingga penerimaan izin. Komponen hilir adalah waktu dari penerimaan izin Bea Cukai hingga meninggalkan lokasi pelabuhan, dalam hal ini, gerbang Jakarta International Container Terminal (JICT). Tahapan proses impor diuraikan pada Gambar 31.

**Gambar 30: Komponen waktu tinggal peti kemas dan pemangku kepentingan utama**



Sumber: Bank Dunia

Gambar 31: Proses impor di Tanjung Priok



Sumber: Bank Dunia

c. Apa saja tantangan utamanya?

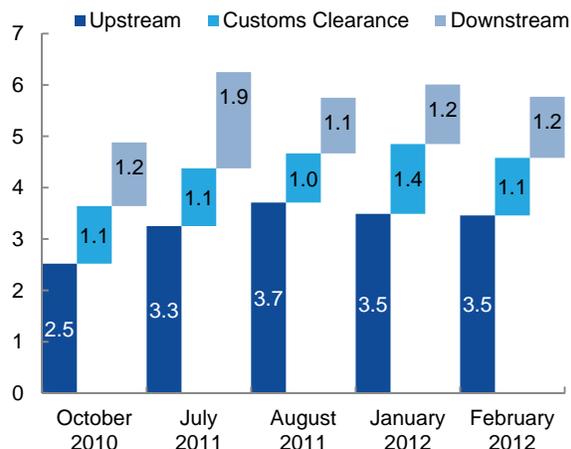
**Keterlambatan utama waktu tinggal peti kemas banyak terjadi pada tahapan hulu...**

Bertentangan dengan persepsi yang umum akan buruknya kinerja bagian Perizinan Kepabeanan dan penyalahgunaan fasilitas pelabuhan oleh para importir, penelitian terbaru menunjukkan bahwa secara rata-rata 58 persen waktu tinggal peti kemas dihabiskan pada tahapan hulu (pra-Bea Cukai) (Gambar 32). Walau terdapat banyak sumber perlambatan pada sepanjang proses impor, penempatan fokus terhadap peningkatan efisiensi pada komponen hulu dapat membawa dampak yang signifikan terhadap keseluruhan rata-rata waktu tinggal peti kemas di Tanjung Priok. Sumber-sumber utama perlambatan pada komponen hulu adalah ketidakefisienan dari sistem 24/7, keterlambatan dalam penyerahan surat PIB, dan rendahnya kinerja sistem *Indonesian National Single Window* (INSW).

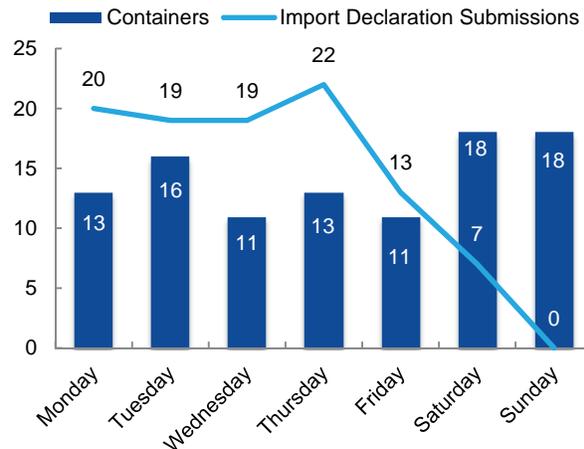
**...yang terkait dengan kelemahan pada sistem 24/7...**

Sementara pelabuhan umumnya beroperasi “24/7” (yaitu layanan pelabuhan, termasuk bea cukai, bank, terminal, pengemudi truk, angkutan barang, broker pabean dan pergudangan, beroperasi di luar jam kerja normal dan pada akhir pekan), pada kenyataannya ketidaksesuaian waktu memperpanjang waktu tinggal peti kemas hulu. Tingginya persentase kapal yang tiba pada hari Sabtu dan Minggu, mencapai rata-rata 38 persen dari jumlah peti kemas yang tiba dalam satu minggu (Senin hingga Minggu). Sebagian besar perusahaan pengangkut barang, pelayaran dan bank tidak beroperasi pada akhir pekan atau di luar jam kerja, sehingga menunda penyerahan surat PIB hingga hari Senin berikutnya, dan memperlambat dimulainya proses perizinan. Dengan demikian, walau jumlah peti kemas yang tiba pada akhir pekan lebih tinggi dibanding hari-hari kerja biasa, jumlah penyerahan PIB per hari lebih rendah pada hari-hari di akhir pekan (Gambar 33). Layanan kepabeanan juga hanya tersedia bila diminta pada akhir pekan atau setelah jam kerja, yang menambahkan jumlah langkah yang dibutuhkan bila importir hendak mengeluarkan barang pada akhir pekan.

**Gambar 32: Tahap hulu menjadi tantangan utama bagi keseluruhan waktu tinggal peti kemas**  
(waktu tinggal peti kemas, hari)



**Gambar 33: Ketidaksihesuaian antara kedatangan peti kemas dan PIB menunjukkan tantangan sistem 24/7**  
(persentase, hari)



Catatan: Data rinci *dwell time* hanya tersedia hingga Februari 2012. Sumber: JICT dan Ditjen Bea Cukai, Mei 2012

**...keterlambatan yang signifikan dalam penyerahan surat PIB...**

Keterlambatan dalam penyerahan PIB dapat ditelusuri kembali ke penundaan penyerahan manifest/surat muatan kepada Bea Cukai dari perusahaan pelayaran yang datang melalui angkut lanjut (*trans-shipment*) di Singapura atau Malaysia. Pengiriman-pengiriman tersebut kadangkala hanya memiliki beberapa jam untuk mengkonsolidasikan surat muatannya, sehingga informasi itu disampaikan hanya beberapa jam sebelum sebuah kapal berlabuh di Tanjung Priok dan kadang-kadang bahkan setelah kapal telah bersandar. Informasi surat muatan dibutuhkan untuk menyerahkan PIB, dengan demikian penundaan dalam mendapatkan informasi itu berdampak kepada waktu dimulainya proses perizinan Bea dan Cukai.

**...rendahnya penggunaan jalur risiko prioritas...**

Berdasarkan informasi importir, jenis barang yang diimpor, negara asal, profil perpajakan perusahaan dan faktor-faktor lainnya, Bea Cukai menetapkan salah satu dari lima golongan risiko yang tersedia (jalur hijau, kuning dan merah, dan dua golongan tambahan bagi importir yang telah disetujui terlebih dahulu). Bergantung pada jalur risiko yang diberikan, importir akan menerima perlakuan yang berbeda untuk pemberian izin Kepabeanan, yang menentukan waktu yang dibutuhkan bagi barang untuk tinggal di pelabuhan. Jalur prioritas khusus, MITA Prioritas, memiliki waktu tinggal peti kemas yang relatif singkat (rata-rata selama 4 hari) namun jalur ini hanya mencakup 16 persen dari seluruh jumlah peti kemas dan merupakan kelompok yang kecil dengan anggota sebanyak 105 importir. Importir dengan jalur ini memiliki fasilitas penangguhan pembayaran bea masuk dan cukai, dan mereka tidak perlu menyerahkan nomor surat muatan dalam PIB, sehingga PIB dapat diserahkan secara lebih cepat dibanding jalur-jalur lainnya.

**...dan lemahnya kinerja sistem Pelayanan Satu Atap Indonesia ( Indonesian National Single Window, INSW)**

INSW terbatas hanya dalam ruang lingkup pemberitahuan dan informasi status proses pada badan-badan instansi pemerintah yang terkait. Perizinan kepabeanan dan persyaratan dokumen perbatasan lainnya masih berfungsi di dalam sistem-sistem yang terpisah dan belum terpadu ke dalam suatu proses yang menyatu. Pada sistem Pelayanan Satu Atap (National Single Windows) yang ideal dan berfungsi dengan baik, pengguna akan menyerahkan informasi yang dibutuhkan oleh sejumlah instansi pemerintah hanya satu kali saja, dengan satu kali masuk ke sistem (*sign-on*), termasuk untuk pembayaran. Sistem seperti itu mengurangi interaksi fisik dan transaksi yang menggunakan kertas. Namun saat ini proses pembayaran harus dilakukan secara terpisah bagi seluruh badan-badan pemerintah dan lembaga-lembaga pelabuhan, termasuk pembayaran bea impor, pajak-pajak, biaya instansi, biaya operator terminal dan lainnya. Selain itu, Badan Karantina tidak memiliki akses terhadap informasi kedatangan kapal. Diperkirakan bahwa sekitar 15 persen dari total peti

kemas impor memerlukan dokumen dan persetujuan dari karantina. Sebagian impor juga memerlukan izin masuk dan izin bongkar barang sehingga, tanpa adanya informasi tentang kedatangan kapal lebih awal, pekerjaan yang dilakukan oleh Badan Karantina akan sangat bergantung kepada pihak importir.

d. **Sejumlah langkah-langkah penting telah diambil untuk mengatasi keadaan tersebut...**

**Walau rata-rata waktu tinggal peti kemas meningkat dibanding tahun sebelumnya, operator terminal peti kemas dan Pemerintah mencatat sejumlah keberhasilan dalam mengatasi keadaan**

Sejumlah upaya telah ditetapkan untuk mengatasi peningkatan waktu tinggal peti kemas. Sebagai contoh, pembayaran tunai pada lokasi terminal peti kemas telah dihapuskan dan diganti dengan transaksi ATM. Walau belum optimal, pemangkasan transaksi tunai adalah langkah awal dalam menurunkan perlambatan pada komponen hilir. Pengumuman kurs tukar telah digeser dari hari Senin ke Rabu, yang memungkinkan importir untuk menyerahkan PIB mereka sebelum akhir pekan dengan informasi yang paling terkini. Pengumuman kurs tukar yang sebelumnya dilakukan pada hari Senin memberikan alasan lain bagi penundaan penyampaian PIB.

Sistem i-CaRe (*integrated cargo release*) yang baru diluncurkan di Tanjung Priok untuk mengintegrasikan seluruh layanan pada komponen hilir, bertujuan untuk menghapus interaksi tatap muka antara pengemudi truk dan petugas Bea Cukai di pintu gerbang. Proyek percontohan diluncurkan pada TPK Koja pada bulan November 2012 dan juga dipadukan dengan INSW. Pemerintah juga telah menetapkan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT), yang memungkinkan Bea Cukai, Karantina dan BPOM untuk melakukan pemeriksaan pada waktu yang bersamaan, sehingga memangkas pergerakan peti kemas dan memungkinkan waktu pemeriksaan fisik yang lebih cepat pada jalur kuning dan merah. TPFT dikembangkan bersama-sama dengan Pelindo II (BUMN yang beroperasi di Tanjung Priok) dan seluruh instansi pemerintahan, dan mulai beroperasi sejak bulan Februari 2013. Prakarsa ini akan membantu menurunkan rata-rata waktu tinggal peti kemas bagi peti-peti kemas yang masuk ke jalur kuning dan merah.

e. **...dan sejumlah upaya tindakan lebih lanjut telah diidentifikasi**

**Reformasi peraturan dan perbaikan prosedur lebih lanjut dapat menurunkan waktu proses di hulu...**

Setelah langkah-langkah di atas, penurunan waktu tinggal peti kemas lebih lanjut membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk Bea Cukai, Pelindo II, operator terminal peti kemas, asosiasi importir, bank dan instansi pemerintah lainnya yang berada di pelabuhan. Berbagai pembicaraan pada tingkat teknis dan politik, dan konsultasi dengan pihak akademis dan mitra pembangunan telah dilakukan untuk menentukan upaya-upaya tambahan yang tersedia yang dapat menurunkan waktu tinggal peti kemas komponen hulu.

**...termasuk meningkatkan jumlah importir dalam jalur khusus MITA Prioritas...**

Menetapkan kriteria yang jelas, pantas dan transparan bagi para importir untuk dapat masuk ke dalam jalur MITA Prioritas, melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan utama, akan membantu menurunkan rata-rata waktu tinggal peti kemas. Penilaian oleh Ditjen Bea Cukai akan pilihan peningkatan jumlah importir MITA Prioritas akan menjadi langkah yang penting untuk memfasilitasi importir-importir yang memenuhi syarat untuk menggunakan jalur kilat ini.

**...memberikan kesempatan lebih banyak untuk melakukan proses paralel dalam komponen Kepabeanan...**

Penggunaan prosedur yang lebih fleksibel yang dapat berlangsung secara paralel, dan bukan melalui langkah-langkah berurutan, secara potensial dapat membantu menurunkan waktu di komponen hulu (pra-kepabeanan). Sebagai contoh, pembayaran dapat diperkenankan sebelum proses kepabeanan, namun setelah penyerahan PIB. Saat ini importir harus membayar seluruh bea masuk dan pajak kepada Bea Cukai sebelum memulai proses kepabeanan. Selain pemberlakuan proses paralel, Bea Cukai dapat mempertimbangkan pemberian pengecualian kepada operator resmi, seperti importir atau perusahaan pengangkutan kargo yang besar dan terpercaya, untuk memiliki rekening langsung dengan Bea Cukai, yang memungkinkan penangguhan pembayaran atau pendebitan langsung. Proses

paralel yang dapat memungkinkan dimulainya proses kepabeanan pada saat bersamaan, menyamakan informasi akan isi peti kemas akan membantu menurunkan jumlah langkah-langkah yang ada pada komponen hulu.

**...yang memberikan insentif bagi penyerahan PIB sedini mungkin...**

Upaya-upaya lain oleh Ditjen Bea Cukai dan operator terminal untuk mendorong penyerahan PIB secepat mungkin oleh importir dan perusahaan pengiriman barang juga dapat membantu mengurangi waktu pemrosesan. Sosialisasi kepada para pengguna dibantu dengan pemberian insentif penyerahan dini dapat mendorong para importir untuk memulai proses pra-kepabeanan dengan lebih awal. Insentif untuk mendorong penyerahan PIB sedini mungkin dapat berupa potongan pajak, potongan bea dan potongan biaya terminal peti kemas. Insentif tersebut dapat mengimbangi biaya tambahan importir dan perusahaan pengiriman yang ditimbulkan dari beroperasi pada akhir pekan, ketika banyak peti kemas tiba. Sebaliknya, Ditjen Bea Cukai dapat melakukan evaluasi dan pencatatan perusahaan pengirim kargo untuk mengidentifikasi dan memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang menunda penyerahan PIB. Pada akhirnya, pemberian layanan 24/7 dapat ditingkatkan dengan memperkenalkan perjanjian tingkat layanan (*service-level agreement*) antar operator terminal dan perusahaan pelayaran, dan juga bagi badan-badan pemerintah untuk memfasilitasi operasi-operasi akhir pekan.

**... dan semakin memperkuat INSW dan meluncurkan layanan satu atap**

Peningkatan INSW secara berkelanjutan dibutuhkan agar dapat mencapai potensinya dalam meningkatkan efisiensi proses impor. Sebagai langkah sementara, layanan satu atap dapat diprioritaskan, yang mana berbagai lembaga akan memiliki akses terhadap seluruh informasi, termasuk Karantina, Bea Cukai dan BPOM. Penggunaan pembayaran tunggal bagi seluruh proses impor, termasuk seluruh biaya dari setiap badan pemerintahan yang terkait, pajak dan bea masuk juga biaya terminal dapat membawa dampak positif yang besar.

## C. Indonesia tahun 2014 dan selanjutnya: Tinjauan pilihan



### 1. Memperkirakan stok aset tetap infrastruktur di Indonesia

**Rendahnya investasi di Indonesia telah berlangsung lebih dari satu dekade...**

Selama bertahun-tahun investasi infrastruktur di Indonesia hanya mencapai sekitar 3 hingga 4 persen dari PDB, jauh di bawah tingkat investasi di atas 7 persen yang tercatat sebelum Krisis Asia tahun 1997/98 dan lebih rendah dibanding negara-negara tetangga seperti China, Thailand dan Vietnam, yang mencatat angka di atas 7 persen dari PDB.<sup>11</sup> Kontribusi Pemerintah terhadap investasi infrastruktur telah meningkat tajam secara keseluruhan, didorong oleh pemerintah daerah, di tengah penurunan tajam investasi sektor swasta, dan perlambatan investasi oleh BUMN, pada beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, walau Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan layanan dan belanja infrastruktur, tingkat investasi infrastruktur secara keseluruhan masih belum kembali ke tingkat yang tercatat sebelum tahun 1997/98 dan tidak mampu mengejar peningkatan kebutuhan.

**...dengan implikasi ekonomi yang patut diteliti lebih lanjut**

Menggunakan data baru tentang investasi infrastruktur yang dikumpulkan oleh Bank Dunia, dan didasarkan hasil analisis data-data yang disajikan pada Triwulanan edisi bulan Maret 2013, bagian ini meneliti lebih lanjut masalah rendahnya investasi infrastruktur di Indonesia dan juga implikasinya terhadap pertumbuhan. Secara khusus, bagian ini mencoba menjawab dua pertanyaan ini: bagaimana tingkat investasi mempengaruhi akumulasi stok aset infrastruktur yang ada; dan bagaimana jika akumulasi aset infrastruktur yang lebih cepat mempengaruhi lintasan pertumbuhan Indonesia akhir-akhir ini?

<sup>11</sup> Lihat Triwulanan edisi bulan Maret 2013 untuk perkiraan terkini investasi infrastruktur di Indonesia dan untuk lingkup regional lihat Asian Development Bank; World Bank; Japan Bank for International Cooperation (2005) *Connecting East Asia: A New Framework for Infrastructure*.

**Keterbatasan data adalah kendala utama dalam analisis stok aset infrastruktur Indonesia yang perlu ditangani untuk mendukung pengambilan keputusan berdasar data**

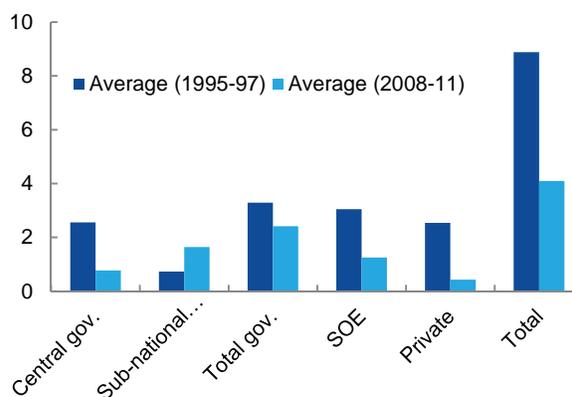
Dalam analisis yang disajikan di bawah ini, infrastruktur diasumsikan mencakup infrastruktur energi, jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi dan telekomunikasi. Terbatasnya ketersediaan dan kurangnya data yang menyeluruh tentang investasi, dan stok aset infrastruktur merupakan tantangan dalam melakukan analisis mendalam untuk menjawab kedua pertanyaan di atas. Kendala-kendala data tersebut, seperti diuraikan pada Triwulanan edisi bulan Maret 2013, mengindikasikan bahwa penghitungan-perhitungan dalam bagian ini harus diperlakukan secara hati-hati. Namun temuan-temuan yang disajikan di bawah bertujuan untuk memberikan landasan bagi analisis yang lebih baik di tingkat nasional, daerah dan sektoral dan untuk mendorong pengumpulan dan analisis data lebih lanjut untuk memberikan informasi bagi pengambilan keputusan berdasarkan data di Indonesia.

**a. Investasi infrastruktur terhadap PDB telah menurun sejak 1997/98**

**Tingkat investasi infrastruktur Indonesia menurun dengan tajam paska Krisis Asia tahun 1997/98...**

Menurut data Bank Dunia, investasi infrastruktur di Indonesia turun secara tajam setelah tahun 1997/98 dan dalam beberapa tahun terakhir mulai stabil pada kisaran 3 hingga 4 persen dari PDB (Gambar 37). Sebaliknya, tingkat Pembentukan Modal Tetap Bruto (termasuk konstruksi, permesinan dan peralatan transportasi) telah pulih sebagai bagian dari PDB, yang mencapai hingga 33 persen pada tahun 2012, melampaui tingkat yang sebelumnya tercatat sebelum krisis Asia. Pemulihan ini didorong oleh investasi dalam bidang konstruksi, yang terutama terlihat pada peningkatan jumlah gedung-gedung, perumahan dan pusat perbelanjaan.

**Gambar 34: Tingkat investasi infrastruktur terhadap PDB telah turun kecuali pada pemerintah daerah**  
(tingkat investasi nominal sebagai bagian dari PDB, persen)



Sumber: Data investasi infrastruktur seperti terinci pada Kotak 5 pada Triwulanan edisi Maret 2013 dan perhitungan staf Bank Dunia

**...dengan penurunan yang bersifat luas dan lintas berbagai bidang, terutama sektor swasta**

Seperti dirinci pada Triwulanan edisi bulan Maret 2013, penurunan investasi infrastruktur (terhadap PDB) bersifat luas termasuk pemerintah, BUMN dan sektor swasta. Investasi sektor swasta mencatat penurunan yang paling tajam, sebesar 2,1 persen dari PDB, dari rata-rata 2,3 persen dari PDB selama tahun 1995-97 menjadi kurang 0,4 persen dari PDB pada tahun 2008-11. Penurunan tajam dalam investasi infrastruktur sektor swasta itu merupakan suatu keprihatinan tersendiri, dengan semakin meningkatnya fokus kepada Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) untuk mendanai pembangunan infrastruktur Indonesia. Investasi BUMN juga turun sekitar 1,8 persen dari PDB. Jumlah investasi pemerintah (baik pusat maupun daerah) turun sebesar 0,9 persen dari rata-rata sebesar 3,3 persen dari PDB pada tahun 1995-1997 menjadi 2,4 persen dari PDB selama periode tahun 2008-11 (Gambar 37).

**Investasi infrastruktur Pemerintah, walau turun terhadap PDB, telah hampir pulih secara riil, didorong oleh investasi pemerintah daerah...**

Secara harga konstan (menggunakan deflator investasi neraca nasional), investasi infrastruktur selama tahun 2008-11 berjumlah sekitar sepertiga lebih rendah dibanding tingkat investasinya pada tahun 1995-97. Namun rata-rata investasi infrastruktur tahunan pemerintah (pusat dan daerah) dalam harga konstan telah kembali ke tingkat tahun 1995-97 pada tahun 2008-11, sementara tingkat investasi BUMN dan sektor swasta masih tetap bertahan lebih rendah 30 persen dan 70 persen. Kontribusi sektor pemerintah terhadap investasi infrastruktur secara keseluruhan telah meningkat, dipimpin oleh belanja pemerintah daerah untuk investasi jalan daerah. Semakin pentingnya investasi pemerintah daerah mencerminkan dampak desentralisasi fiskal pada tahun 2001 yang mana kewenangan belanja dan pembiayaan

diserahkan kepada pemerintah daerah. Sebelum desentralisasi, sekitar 80 persen dari investasi infrastruktur pemerintah berasal dari pemerintah pusat, dan pemerintah daerah hanya menyumbangkan 20 persen. Kini perbandingan ini telah bergeser menjadi 65 persen belanja berasal dari pemerintah daerah sementara 35 persen berasal dari pemerintah pusat.

...dan juga peningkatan besar akhir-akhir ini pada belanja pemerintah pusat, yang mencerminkan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan layanan infrastruktur

Pemerintah menyadari tantangan-tantangan infrastruktur Indonesia dan telah bertekad untuk mengatasinya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Indonesia juga meluncurkan sejumlah prakarsa dan kebijakan, termasuk peningkatan anggaran yang signifikan bagi belanja modal dan penguatan kerangka kelembagaan dan kerangka peraturan perundangan bagi Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS). Walau dengan peningkatan yang cukup besar dalam belanja modal secara nominal oleh pemerintah pusat, kemajuan pelaksanaan investasi infrastruktur secara nyata di lapangan tetap berjalan lambat, karena sejumlah tantangan koordinasi dan implementasi.<sup>12</sup>

#### b. Stok aset tetap infrastruktur Indonesia diperkirakan telah menurun dibandingkan total stok aset...

Didorong oleh kuatnya pertumbuhan investasi konstruksi, rasio stok aset tetap terhadap PDB Indonesia telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir

Seperti telah disinggung di atas, pertumbuhan investasi Indonesia secara agregat telah meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, dengan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) meningkat rata-rata sebesar 8 persen secara riil pada periode tahun 2001 dan 2011, secara umum didorong oleh konstruksi. Sebagai akibatnya, rasio keseluruhan stok aset tetap Indonesia terhadap PDB telah meningkat dari 1,7 kali PDB pada tahun 1995 menjadi 2,1 kali PDB pada tahun 2011. Apakah stok aset infrastruktur, yang merupakan masukan (*input*) utama dalam produktivitas dan pertumbuhan, juga mengikuti tren keseluruhan ini? Bagian berikut akan membahas pertanyaan yang penting ini, termasuk kemungkinan implikasinya terhadap pertumbuhan *output*.

Sebaliknya, perkiraan menunjukkan bahwa stok aset tetap infrastruktur sepertinya telah menurun dibanding ukuran ekonomi (PDB) dan total stok

Metode Persediaan Perpetual (*Perpetual Inventory Method*, PIM), bersama-sama dengan asumsi-asumsi yang diuraikan pada Kotak 4, dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat persediaan modal infrastruktur Indonesia. Perkiraan awal menunjukkan bahwa penurunan riil tingkat investasi infrastruktur ditambah dengan tingkat penyusutan (depresiasi) aset dan pertumbuhan ekonomi yang pesat tampaknya telah mengakibatkan penurunan tingkat stok aset infrastruktur dibanding ukuran ekonomi secara keseluruhan. Sebagai contoh, setelah penyusutan, rata-rata pertumbuhan riil stok aset infrastruktur antara tahun 1996 dan 2011 adalah 3 persen, di bawah rata-rata pertumbuhan PDB riil sebesar 4 persen (termasuk pada masa krisis tahun 1997/98). Laju pertumbuhan investasi infrastruktur juga tidak mengikuti cepatnya pertumbuhan riil total stok, dengan nilai rata-rata sebesar 4,4 persen selama periode tersebut (Gambar 43). Sebagai akibatnya, aset tetap infrastruktur Indonesia telah berangsur-angsur menyusut dari asumsi nilai permulaan sebesar 28 persen dari total aset tetap pada tahun 1995 menjadi 20 persen pada tahun 2011 (Gambar 36). Peningkatan dalam investasi infrastruktur publik beberapa tahun terakhir hanya dapat memperlambat laju penurunan relatif tersebut. Peningkatan dalam pertumbuhan keseluruhan investasi dalam dekade yang lalu didorong oleh sektor konstruksi non-infrastruktur. Sementara perkiraan-perkiraan ini memiliki berbagai keterbatasan, temuan-temuan umumnya kuat walaupun menggunakan asumsi-asumsi yang berlainan (lihat Kotak 4).

<sup>12</sup> Analisis lanjutan tentang tantangan implementasi pada sektor infrastruktur terdapat pada Triwulanan edisi bulan Juni 2012 *IEQ*.

**Kotak 4: Catatan metodologi dalam menghitung stok aset infrastruktur di Indonesia**

Dalam analisis ini, aset infrastruktur didefinisikan sebagai stok aset yang diinvestasikan oleh pemerintah umum, BUMN dan sektor swasta ke dalam infrastruktur utama seperti sektor transportasi, irigasi, air dan sanitasi, energi (listrik) dan telekomunikasi. Definisi ini tidak menyertakan sarana dan peralatan militer dan infrastruktur lainnya seperti rumah sakit, gedung-gedung pendidikan dan gedung-gedung pemerintah lainnya. Analisis ini menggunakan indikator moneter (yaitu aliran investasi infrastruktur dan nilai akumulasi) untuk mengukur aset-aset infrastruktur sebagai ganti indikator-indikator fisik (seperti panjang jalan dalam km). Definisi ini mengikuti data investasi infrastruktur yang dihimpun oleh Bank Dunia, seperti diuraikan pada Triwulanan edisi bulan Maret 2013. Suatu catatan penting mengenai pendekatan ini adalah keterkaitan antara investasi dan layanan infrastruktur, yang merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan dan hasil pembangunan, akan bergantung kepada kualitas dan efisiensi investasi.

Metode Persediaan Perpetual (PIM) digunakan untuk memperkirakan jumlah stok aset infrastruktur, dengan memperkirakan nilai awal stok aset (tahun 1995 ketika data investasi infrastruktur tersedia) ditambahkan aliran investasi bruto dan dikurangi depresiasi (penyusutan). Berdasarkan pendekatan ini, tingkat stok aset infrastruktur Indonesia pada tahun 2011 diperkirakan berada pada 49 persen dari PDB, yang mendekati rata-rata perkiraan McKinsey Global Institute (2013) (selama 1992-2011, termasuk pembentukan aset pemeliharaan) untuk India sebesar 58 persen dari PDB (tahun 1992-2011) namun di bawah negara-negara berpenghasilan menengah maupun tinggi yang mencapai 70 persen dari PDB.

Karena keterbatasan data, sejumlah asumsi telah dibuat untuk menyusun perkiraan stok aset. Pertama, mengikuti Van der Eng (2008) yang memperkirakan tingkat persediaan modal di Indonesia antara tahun 1950 dan 2007, nilai awal stok aset diasumsikan sekitar 1,7 kali PDB pada tahun 1995 dan nilai awal stok aset infrastruktur diasumsikan 28 persen dari total stok aset (walau nilai awal dari stok aset infrastruktur dan total menggunakan perkiraan Van der Eng, perkiraan tren dan tingkatan stok aset infrastruktur dan total untuk periode selanjutnya dalam analisis berbeda karena perbedaan metodologi).

Kedua, tingkat penyusutan tahunan bagi aset-aset infrastruktur diasumsikan 5 persen, mengikuti asumsi Kementerian Keuangan untuk perhitungan akuntansi pajak untuk gedung dan alat transportasi (Kementerian Keuangan, 2009). Nilai ini merupakan titik tengah dibanding tingkat penyusutan tersirat sebesar 6,1 persen yang digunakan oleh Van der Eng untuk Indonesia, dan 3,5 persen yang digunakan oleh Arslanalp (2011) bagi negara-negara berpenghasilan menengah.

Akhirnya, penting untuk dicatat bahwa penggunaan data investasi dapat menyebabkan penilaian yang terlalu rendah akan kontribusi belanja pemeliharaan dalam memperpanjang usia suatu aset. Namun hal ini juga dapat diimbangi dengan kemungkinan penilaian yang terlalu tinggi dari asumsi keterkaitan langsung (one-to-one) antara investasi infrastruktur dan akumulasi aset-aset produktif. Sebagai contoh, Pritchett (2000) menyatakan bahwa kurangnya hubungan antara (aliran) belanja investasi dan akumulasi aset-aset produktif, terutama di negara-negara berkembang, yang disebabkan oleh ketidakefisienan dan pemborosan.

Perkiraan stok aset infrastruktur bersifat peka terhadap asumsi-asumsi tingkat awal stok aset infrastruktur dan tingkat depresiasi (Tabel 7). Sebagai contoh, jika stok aset infrastruktur awal tahun 1995 sebesar 33 persen dari total stok aset (5 poin persentase di atas angka dasar/*baseline*), maka rata-rata pertumbuhan tahunan dari stok aset infrastruktur selama periode tersebut akan mencapai 2,2 persen, di bawah angka *baseline*, karena tingkat stok aset awal yang lebih tinggi akan mengakibatkan tingkat depresiasi yang lebih besar dibanding aliran investasi baru, namun tingkat perkiraan pada akhir periode (tahun 2011) akan menjadi lebih tinggi. Perbedaan asumsi-asumsi tingkat depresiasi juga mempengaruhi laju pertumbuhan dan tingkat stok aset infrastruktur. Sebagai contoh, jika tingkat depresiasi yang digunakan lebih rendah sebesar 3,5 persen (di bawah nilai *baseline* yang 5 persen) akan menghasilkan tingkat pertumbuhan rata-rata stok aset infrastruktur yang lebih tinggi, dan perkiraan tingkatannya dibanding total stok aset akan lebih besar dari nilai *baseline*.

Catatan: Untuk rincian lebih lanjut lihat Van der Eng, Pierre (2008) 'Capital Formation and Capital Stock in Indonesia, 1950-2007.' Kertas Kerja Perdagangan dan Pembangunan No.24. Canberra: School of Economics, ANU College of Business and Economics, Australian National University; McKinsey Global Institute (2013), 'Infrastructure Productivity: How to save \$1 trillion a year'; Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 96/PMK.03/2009); Arslanalp, S. et.al (2011), 'Investing in Growth', Finance & Development, Maret 2011. International Monetary Fund; Pritchett, L (2000), 'The Tyranny of Concepts: CUDIE (Cumulated, Depreciated, Investment Effort) is Not Capital', Journal of Economic Growth, 5:361-384.

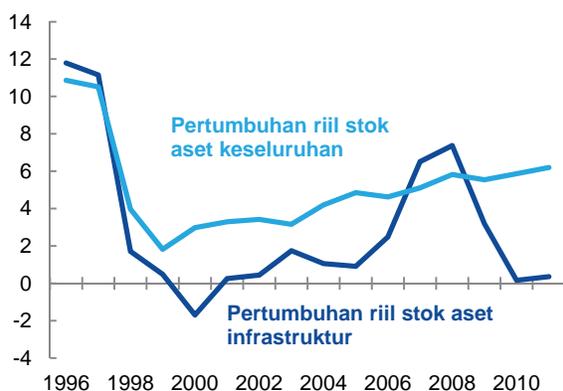
**Tabel 7: Tingkat pertumbuhan stok aset infrastruktur peka terhadap asumsi tingkat awal stok aset infrastruktur dan tingkat depresiasi (penyusutan)**

	Tingkat stok aset infrastruktur (bagian dari total stok aset, persen)			Pertumbuhan stok aset infrastruktur (persen)
	Periode awal (1995)	Periode akhir (2011)	Rata-rata 2001-11	Rata-rata 1996-2011
Dasar ( <i>baseline</i> ): Tingkat awal stok aset infrastruktur: 28 persen; tingkat penyusutan: 5 persen	28	20	23	3,0
<b>Skenario I – Tingkat stok aset infrastruktur awal yang berbeda</b>				
A. +5% dari <i>baseline</i>	33	21	24	2,2
B. -5% dari <i>baseline</i>	23	19	21	4,0
<b>Skenario II – Tingkat penyusutan yang berbeda</b>				
A. 3.5 persen	28	23	25	3,9
B. 6.1 persen	28	18	21	2,3

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 35: Pertumbuhan riil stok aset keseluruhan jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan stok aset infrastruktur....**

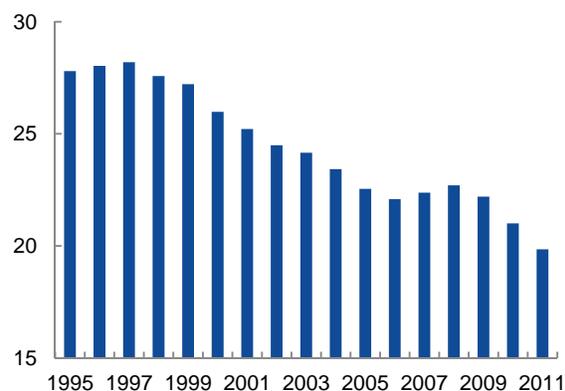
(pertumbuhan stok aset infrastruktur dan keseluruhan, persen)



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 36: ...mengakibatkan penurunan rasio stok aset infrastruktur dibanding jumlah keseluruhannya**

(rasio stok aset infrastruktur terhadap total, persen)



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia

**c. ...mempengaruhi lintasan pertumbuhan Indonesia**

**Lemahnya pertumbuhan stok aset infrastruktur tampaknya telah menghambat kinerja perekonomian Indonesia belakangan ini**

Stok aset, termasuk infrastruktur, mencerminkan kapasitas ekonomi untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Kualitas dan kuantitas persediaan aset infrastruktur – terutama infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, rel kereta api, jembatan, pelabuhan, bandara, listrik, sarana telekomunikasi dan sistem air – merupakan *input* yang sangat penting bagi produktivitas dan daya saing ekonomi. Sebagian besar penelitian empiris menemukan korelasi yang positif antara persediaan aset infrastruktur dan *output* (Kotak 5). Karenanya, dan sesuai harapan dari dampak pelemahan infrastruktur terhadap usaha dan rumah tangga sehari-hari, pertumbuhan stok aset infrastruktur yang relatif rendah di Indonesia tampaknya telah menghambat kinerja ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir.

**Analisa kontra-faktual yang sederhana dapat digunakan untuk mengilustrasikan potensi dampak bagi pertumbuhan dengan peningkatan stok aset infrastruktur Indonesia**

Analisa kontra-faktual yang sederhana dapat menunjukkan bagaimana lambatnya laju investasi infrastruktur dapat mempengaruhi pertumbuhan di Indonesia, atau dengan kata lain, manfaat potensial dari pencapaian tingkatan investasi infrastruktur yang lebih tinggi. Sebagai *baseline*, digunakan asumsi elastisitas *output* terhadap stok aset infrastruktur yang tinggi sebesar 0,15, karena relatif rendahnya tingkat infrastruktur yang ada di Indonesia – peningkatan sebesar 10 persen dalam stok aset infrastruktur diasumsikan akan mengakibatkan peningkatan sebesar 1,5 persen pada PDB. Seperti dibicarakan pada Kotak 5, telah diketahui bahwa angka *multiplier* infrastruktur untuk pertumbuhan akan bervariasi menurut jenis infrastruktur, namun karena keterbatasan data, analisis pemilahan ini tidak dapat dilakukan. Untuk analisis skenario, digunakan dua skenario pertumbuhan stok aset infrastruktur tahunan alternatif sebesar 5 dan 10 persen.

**Kotak 5: Studi empiris tentang hubungan antara stok aset infrastruktur dan publik dan pertumbuhan**

Sejumlah penelitian telah menemukan hubungan yang positif antara stok/persediaan aset infrastruktur dan pertumbuhan, walau besarnya perkiraan bervariasi menurut negaranya, bergantung pada faktor-faktor seperti indikator infrastruktur, periode analisis dan kualitas investasi. Hasil-hasilnya cenderung lebih kuat bila pengukur infrastrukturnya bersifat fisik. Penilaian kuantitatif dalam bidang ini mulai banyak dilakukan dengan karya seminalis dari Aschauer (1989) yang menjelaskan tentang perlambatan pertumbuhan produktivitas pada tahun 70an di Amerika Serikat. Aschauer menemukan bahwa stok aset publik berkaitan dengan peningkatan yang besar terhadap *output* swasta, dengan peningkatan sebesar 1 persen pada stok aset publik akan meningkatkan *output* swasta sebesar 0,39 persen. Sejak itu, banyak penelitian yang telah dilakukan untuk AS dan negara-negara OECD, lintas negara dan pada tingkat regional. Namun penelitian yang khusus pada satu negara untuk negara-negara berkembang masih terbatas. Salah satu penelitian suatu negara yang relevan dilakukan oleh Sahoo dkk (2010) yang menyelidiki peran infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan di China selama periode tahun 1975 hingga 2007. Pembangunan infrastruktur di China ternyata memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap pertumbuhan dengan nilai elastisitas output-terhadap-infrastruktur pada kisaran 0,20 hingga 0,41.

Untuk penyederhanaan, didalam simulasi diasumsikan elastisitas *output* terhadap stok aset infrastruktur sebesar 0,15, sejalan dengan temuan empiris dari Lighthart dan Bom (2009). Pada satu sisi, nilai elastisitas yang relatif konservatif ini memperhitungkan keprihatinan akan lemahnya hubungan antara investasi moneter, stok/persediaan aset fisik, dan layanan infrastruktur. Pada sisi lain, asumsi ini dapat memberikan perkiraan yang terlalu rendah akan dampak eksternalitas positif dari akumulasi modal infrastruktur, misalnya dengan meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kesehatan. Asumsi itu juga mengakui bahwa *multiplier* investasi infrastruktur bagi pertumbuhan akan bervariasi menurut jenis investasi infrastruktur. Sebagai contoh, OECD (2009), dengan menggunakan pengukuran infrastruktur fisik per kapita, memperkirakan sejumlah *multiplier* bagi berbagai jenis infrastruktur, seperti jalan (0,3 – 0,46), infrastruktur rel kereta api (0,39 – 0,53), jalan tol (0,42-4), listrik (0,39), infrastruktur kabel utama telepon (0,39 – 0,42), dan tingkat pelanggan telepon (0,34 – 0,45). Karena keterbatasan data, analisis pemilahan berdasar jenis infrastruktur ini tidak dilakukan untuk Indonesia.

Sumber: Sahoo, Pravakar., Dash, Ranjan Kumar, Nataraj, Geethanjali. (2010). 'Infrastructure development and economic growth in China' IDE Discussion Paper No. 261. Institute of Developing Economies; OECD (2009), 'Infrastructure investment: links to growth and the role of public policies', Douglas Sutherland, Sónia Araújo, Balázs Égert dan Tomasz Kozluk, OECD Working Paper No. 686, 24 Maret 2009; Lighthart, Jenny E., dan Bom, Pedro RD. (2009). 'How Productive is Public Capital? A Meta Regression Analysis' International Studies Program. Andrew Young School of Public Policy Studies. Georgia State University.

**Tingkat pertumbuhan stok aset infrastruktur yang lebih tinggi akan mendorong tingkat pertumbuhan PDB yang lebih tinggi...**

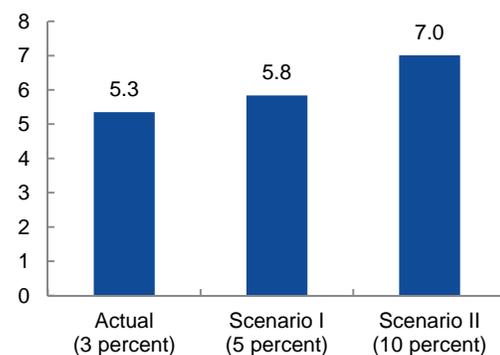
Rata-rata laju pertumbuhan riil perkiraan stok aset infrastruktur dan PDB riil masing-masing adalah 3,0 dan 5,3 persen, untuk periode tahun 2001-2011. Mengasumsikan hubungan kausalitas antara perubahan dalam stok aset infrastruktur dan *output*, jika laju pertumbuhan stok aset infrastruktur adalah 5 persen *yoj*, dan bukan 3 persen, maka perkiraan rata-rata pertumbuhan PDB tahunan untuk periode ini akan mencapai 5,8 persen, atau 0,5 persen lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan PDB tahunan aktual sebesar 5,3 persen. Secara kumulatif, tingkat PDB akan 5 persen lebih tinggi pada tahun 2011. Jika pertumbuhan stok aset infrastruktur lebih besar lagi, misalnya sebesar 10 persen, maka laju pertumbuhan PDB akan mencatat rata-rata sebesar 7 persen untuk periode tahun 2001-11, sekitar 1,7 poin persentase di atas rata-rata aktual, dan tingkat PDB akan 19 persen lebih tinggi pada tahun 2011, yang mencerminkan dampak kumulatif dari rata-rata pertumbuhan tahunan yang lebih tinggi (Gambar 37).

**Tabel 8: Penelitian terpilih tentang perkiraan elastisitas perubahan output terhadap perubahan aset infrastruktur**

Negara/ wilayah	Pengarang	OEI*	Indikator infrastruktur
AS	Aschauer (1989)	0,39	Aset publik
Negara berkembang	Easterly dan Rabelo (1993)	0,16	Transportasi & komunikasi
Lintas negara	Calderon dan Serven (2003)	0,16	Transportasi & komunikasi
Lintas negara	Esfahani dan Ramires (2003)	0,12	Stok aset fisik
Asia Tenggara	Sahoo dan Dash (2008)	0,18 -0,22	Stok aset fisik
Lintas negara (analisis meta)	Lighthart dan Bom (2009)	0,15	Aset publik
China	Sahoo dkk (2010)	0,20 - 0,41	Stok aset fisik

Catatan: \* OEI adalah elastisitas output terhadap infrastruktur  
Sumber: Diambil dari Sahoo dkk (2010) dan Lighthart dan Bom (2009)

**Gambar 37: Investasi aset infrastruktur lebih besar terkait dengan lintasan pertumbuhan yang lebih tinggi (rata-rata pertumbuhan PDB riil pada 2001-11 menurut skenario pertumbuhan stok aset infrastruktur yang berbeda-beda, persen)**



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia

**...yang akan berkontribusi kepada pengentasan kemiskinan lebih cepat dan peningkatan hasil pembangunan**

Analisis empiris yang luas menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB seringkali berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Dengan distribusi konsumsi dan garis kemiskinan resmi Indonesia – yaitu jumlah penduduk yang hidup pada kisaran 1 persen dari garis kemiskinan – pada beberapa tahun terakhir, untuk setiap peningkatan pendapatan kaum miskin sebesar 1 persen, tingkat kemiskinan nasional turun sebesar 0,5 poin persentase. Dengan menggunakan prinsip sederhana ini, dan sejumlah asumsi tentang tingkat pengaruh pertumbuhan PDB terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga miskin, pertumbuhan stok aset infrastruktur yang lebih tinggi sebesar 5 persen (dibanding rata-rata aktual sebesar 3 persen), akan menambah pertumbuhan konsumsi penduduk miskin sebesar 0,3 persen *yy*, dan juga menambah penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1.5 poin persentase (tingkat kemiskinan tahun ini akan menjadi 9,9 persen dibanding 11,4 persen saat ini). Jika pertumbuhan stok aset infrastruktur mencapai rata-rata 10 persen, tingkat kemiskinan akan turun sebesar 4,5 poin persentase selama periode tersebut, atau tingkat kemiskinan sekarang akan menjadi 6,9 persen. Perkiraan ini hanya penyederhanaan dan dimaksudkan sebagai ilustrasi. Penting untuk ingat bahwa tingkat pertumbuhan yang didukung oleh infrastruktur yang dapat mendukung pengentasan kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti jenis infrastruktur, lokasi dan kondisi geografisnya, dan periode analisis.

**Fokus berkelanjutan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas belanja infrastruktur sangat penting bagi Indonesia untuk mewujudkan potensi pertumbuhannya...**

Sejak krisis tahun 1997/98, Indonesia telah mengalami kesulitan untuk meningkatkan pertumbuhan persediaan aset infrastruktur yang berkelanjutan. Sesungguhnya, walau terdapat keterbatasan data yang besar, bukti-bukti awal menunjukkan bahwa persediaan infrastruktur tidak bertambah secara signifikan selama periode itu, sehingga stok asetnya menurun dibanding total stok aset dan ukuran ekonomi. Dengan permintaan akan layanan infrastruktur yang lebih baik tampaknya akan terus meningkat, kebutuhan untuk semakin meningkatkan investasi infrastruktur telah terlihat dengan jelas. Karenanya, peningkatan kuantitas dan kualitas investasi publik menjadi penting. Melanjutkan peningkatan alokasi anggaran bagi pembangunan infrastruktur memang memiliki andil, melalui realokasi anggaran, misalnya subsidi energi, dan mendukung perbaikan pengumpulan penerimaan. Secara bersamaan upaya-upaya pemerintah seperti disebut dalam Bagian A, untuk memperbaiki eksekusi anggaran dan pelaksanaan proyek harus terus dilanjutkan. Keberlanjutan fiskal dan persaingan dalam permintaan bagi dana publik juga mendorong penekanan yang kuat akan efisiensi, termasuk menjamin kelancaran operasi dan pemeliharaan atas infrastruktur yang ada, dan secara lebih luas meningkatkan kualitas pengelolaan investasi publik untuk menghasilkan infrastruktur publik prioritas yang dibutuhkan oleh ekonomi. Selanjutnya, juga penting untuk mendukung kebijakan, aturan, dan institusi seperti yang terkait dengan Kemitraan Publik Swasta, yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk investasi swasta dalam infrastruktur .

**...dan pengumpulan dan analisis data lebih lanjut akan membantu memberikan informasi bagi pengambilan keputusan berkualitas yang berdasar bukti untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut**

Seperti telah dibahas, mengukur besaran investasi total dan infrastruktur Indonesia, stok aset dan dampaknya terhadap pertumbuhan merupakan suatu tantangan karena rangkaian keterbatasan data dan asumsi-asumsi yang dibutuhkan. Perkiraan dan simulasi yang disajikan di atas merupakan langkah awal analisis ini. Peningkatan kualitas, ketepatan waktu dan cakupan data-data itu merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan analisis ini dan untuk memberikan informasi yang lebih baik untuk kebijakan berdasar bukti tentang kebutuhan dan kinerja infrastruktur. Perluasan analisis ini juga dapat mendukung tujuan-tujuan itu, misalnya, dengan mengaitkan perkiraan investasi dan stok aset dengan indikator-indikator sektor riil, dengan memisahkan investasi dan stok/persediaan menurut jenis dan daerah, dengan mengaitkan belanja untuk operasi dan pemeliharaan dengan perkiraan stok aset, dan membuat penyesuaian untuk memperhitungkan kualitas investasi, dan dengan mencermati secara lebih rinci akan keterkaitannya dengan hasil pembangunan, termasuk pertumbuhan dan inklusivitas. Perkiraan akan biaya ekonomi dari lemahnya infrastruktur juga akan dapat semakin memperkaya analisis ini. Di dalamnya termasuk tidak hanya biaya ekonomi kemacetan lalu lintas tetapi juga biaya kesempatan (*opportunity cost*) dari tanggapan sektor swasta, seperti pembelian kapasitas pembangkit tenaga untuk mendukung usahanya atau penambahan jumlah truk-truk untuk mengatasi penurunan jumlah pengiriman yang dapat dilakukan setiap hari oleh setiap truk karena kemacetan lalu lintas.

## 2. Tata kelola pemerintah daerah dan kinerja pendidikan

**Tugas utama dari suatu sistem pendidikan adalah membekali angkatan muda dengan keterampilan yang mereka butuhkan, yang sangat penting bagi pembangunan**

Sistem pendidikan yang kuat dan serba guna merupakan hal yang penting bagi pembangunan jangka panjang setiap negara.<sup>13</sup> Tugas utama dari sistem pendidikan adalah membekali angkatan muda dengan berbagai keterampilan yang mereka butuhkan untuk dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Pemberian pendidikan dasar dengan kualitas yang baik kepada seluruh anak dapat meningkatkan produktivitas, meninggikan laju pertumbuhan ekonomi dan mendukung landasan bagi masa depan yang damai. Sebagai contoh, penelitian internasional terbaru menunjukkan bahwa memastikan seluruh anak menyelesaikan sekolah dengan keterampilan dasar dalam baca-tulis dan berhitung dapat meningkatkan pertumbuhan yoy per kapita hingga satu poin persentase.<sup>14</sup> Manfaat seperti itu akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap prospek pembangunan dan lintasan pertumbuhan jangka menengah di Indonesia. Bagian ini membahas bukti-bukti yang berasal dari penelitian terakhir tentang peran penting yang dapat disumbangkan oleh peningkatan dalam tata kelola pemerintah daerah bagi peningkatan kualitas pendidikan dasar dan memastikan bahwa anak-anak meninggalkan sekolah dengan keterampilan yang memadai.

**Reformasi pendidikan telah mendorong meningkatnya akses sekolah tetapi peningkatan dalam pembelajaran masih belum terlalu besar**

Dalam lima belas tahun terakhir, Indonesia telah menerapkan paket reformasi pendidikan yang menyeluruh yang dirancang untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas. Komponen utama dalam proses reformasi adalah pemindahan tanggung jawab atas layanan pendidikan dasar kepada sekolah dan pemerintah di daerah. Upaya reformasi ini, bersama-sama dengan peningkatan investasi pemerintah dalam jumlah yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya, membawa peningkatan yang signifikan dalam akses pendidikan terutama bagi anak-anak dari kelompok yang paling miskin.<sup>15</sup> Namun peningkatan dalam capaian atau prestasi belajar masih tetap kecil dan anak-anak menyelesaikan sekolah dengan keterampilan yang belum memadai dengan kebutuhan yang diminta oleh pasar tenaga kerja. Seperti pada sistem pendidikan lainnya di dunia, peningkatan kualitas pendidikan dasar masih terus menjadi tantangan utama.

**Penguatan kapasitas pemerintah daerah merupakan kunci utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan**

Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikannya secara efektif merupakan hal yang penting dalam mendukung keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan. Kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan layanan pendidikan dasar yang berkualitas sangat bervariasi pada berbagai daerah di Indonesia. Identifikasi dimensi tata kelola utama yang mendasari penyelenggaraan layanan pendidikan yang efektif dapat menjadi titik awal dalam upaya menangani kekurangan yang masih ada dan meningkatkan kinerja pendidikan.

<sup>13</sup> Bagian ini diambil dari penelitian Bank Dunia yang akan terbit 'Local governance and education performance: A survey of local education governance in 50 Indonesian districts'.

<sup>14</sup> Hanushek, E. dan L. Woessmann (2008). "The role of cognitive skills in economic development." *Journal of Economic Literature* 46(3).

<sup>15</sup> Analisis lebih lanjut akan tren dalam belanja dan hasil pendidikan terakhir di Indonesia dapat dilihat pada laporan Bank Dunia (2013), *Indonesia - Spending more or spending better: improving education financing in Indonesia*. <http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/03/17536528/indonesia-spending-more-or-spending-better-improving-education-financing-indonesia>.

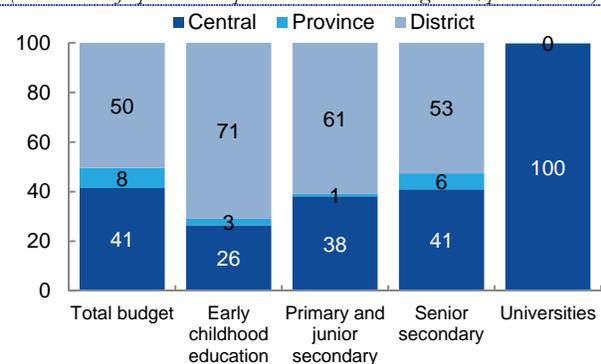
a. Pentingnya tata kelola pendidikan daerah untuk meningkatkan kinerja

Desentralisasi menempatkan pemerintah daerah sebagai pusat penyelenggaraan layanan pendidikan dasar...

Desentralisasi telah menempatkan pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten/kota/kota, sebagai pusat penyelenggaraan layanan pendidikan dasar. Tanggung jawab kabupaten/kota termasuk pengelolaan sistem pendidikan secara keseluruhan, perizinan sekolah dan perencanaan dan pengawasan angkatan pengajar. Kabupaten/kota juga menanggung sebagian besar pendanaan pemerintah bagi sekolah-sekolah dasar dan menengah pertama (Lihat Gambar 38).

Gambar 38: Pemerintah daerah membiayai sebagian besar pendanaan bagi pendidikan dasar

(sumber belanja pendidikan pemerintah menurut tingkatan, persen, 2009)



Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data Kemenkeu dan APBD

...dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan merupakan penentu utama capaian pendidikan

Karena pemerintah daerah memegang peran utama dalam penyelenggaraan layanan dasar, kapasitasnya dalam mengelola sistem pendidikan menjadi penentu utama bagi kinerja. Peluang pendidikan sangat bervariasi di berbagai kabupaten/kota di Indonesia; rata-rata nilai ujian nasional untuk tingkat dasar pada tahun 2009 dimulai dari 48 persen di Sumba Barat Daya di provinsi Nusa Tenggara Timur, hingga 83 persen di Kota Mojokerto di provinsi Jawa Timur. Faktor kemiskinan, geografis dan sosial-ekonomi lainnya dapat menjelaskan sebagian dari variasi tersebut, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas tata kelola daerah juga memegang peranan yang penting. Secara khusus, hasil penelitian menunjukkan catatan hasil pendidikan yang lebih baik di beberapa kabupaten/kota dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif dan dengan tingkat persepsi korupsi yang lebih rendah.<sup>16</sup> Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penangan kelemahan dalam tata kelola pemerintah daerah harus dilakukan terlebih dahulu demi keberhasilan upaya-upaya peningkatan hasil pendidikan.

b. Survei Tata Kelola Pendidikan Daerah Indonesia (ILEG)

Survei kualitas tata kelola pendidikan dasar telah dilakukan di 50 kabupaten/kota pada tahun 2009 dan 2012...

Untuk menilai keadaan tata kelola pendidikan daerah, survei dilakukan di 50 kabupaten/kota (di sembilan provinsi) pada tahun 2009 dan 2012. Kabupaten/kota- yang turut serta dipilih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk ikut di dalam proyek *Basic Education Capacity* (BEC) (yang seperti dijelaskan pada Kotak 6, memberikan hibah dan bantuan teknis kepada kabupaten/kota-kabupaten/kota terpilih). Survei itu bertujuan untuk:

1. Memberi penilaian akan kapasitas kabupaten/kota dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dasar
2. Melihat keterkaitan antara tata kelola dan kinerja pendidikan di kabupaten/kota
3. Menelusuri perubahan-perubahan yang belakangan terjadi dalam bidang tata kelola pendidikan
4. Menilai pengaruh dari kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas yang mendapat dukungan dari para donor

<sup>16</sup> Contoh-contoh dapat dilihat pada laporan Bank Dunia (2010). Governance matters to education outcomes. The Indonesia local education governance index (ILEGI): A report card of 50 local governments dan Suryadarma, D. (2012). "How Corruption Diminishes the Effectiveness of Public Spending on Education in Indonesia." Bulletin of Indonesian Economic Studies 48(1): 85-100.

Kabupaten/kota-kabupaten/kota yang turut serta di dalam ILEG tidaklah mewakili Indonesia secara keseluruhan. Hal yang khusus, kabupaten/kota-kabupaten/kota yang turut serta di dalam survei itu cenderung lebih miskin dibanding kabupaten/kota-kabupaten/kota lain namun memiliki tingkat akses dan capaian pendidikan yang sebanding.

**...dan menyertakan pengukuran tata kelola pendidikan yang diatur ke dalam lima kelompok utama...**

Di dalam survei ILEG itu, tata kelola pendidikan dibagi menjadi empat dimensi utama untuk mengukur efektivitas lembaga-lembaga pemerintah daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan pendidikan:

- **Transparansi dan akuntabilitas.** Upaya pelaksanaan dan penetapan peraturan perundangan oleh pemerintah daerah untuk mendukung tata kelola sektor pendidikan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
- **Sistem pengendalian manajemen.** Menilai sampai sejauh mana sistem yang ditempatkan dapat menyertakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh proses perencanaan tingkat sekolah dan daerah ke dalam rencana kerja pendidikan tahunan tingkat kabupaten/kota.
- **Sistem informasi manajemen.** Mengukur ketersediaan informasi yang berkualitas tentang sistem pendidikan daerah yang dapat digunakan dalam proses perencanaan dan pemantauan pendidikan.
- **Penggunaan sumber daya yang efisien.** Mengamati apakah sistem telah ditempatkan untuk merencanakan, menganggarkan dan memantau penggunaan sumber daya secara efektif.

Komponen kelima, standar pelaksanaan layanan pendidikan, merupakan upaya untuk mengukur tingkatan dan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah pertama di suatu kabupaten/kota. Hal ini juga dapat digunakan untuk melihat keterkaitan antara dimensi tata kelola dan kinerja pendidikan.

**...yang menghasilkan lima sub-indeks dengan pembobotan, dan indeks ILEG keseluruhan untuk memberikan ringkasan pengukuran kualitas tata kelola pendidikan daerah**

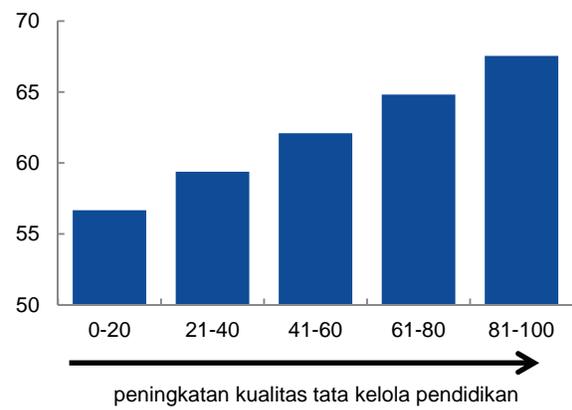
Untuk setiap dimensi, serangkaian indikator digunakan untuk mengevaluasi kualitas tata kelola daerah. Indikator-indikator yang digunakan diberi bobot sesuai sifat pengukurannya, apakah untuk mengukur kesesuaian dengan peraturan, proses atau kinerja. Indikator kinerja mendapat bobot terberat dan indikator peraturan menerima bobot yang paling ringan. Untuk mengkaji kualitas tata kelola daerah, serangkaian indikator pada setiap bidang digabungkan menjadi satu sub-indeks. Sebagai contoh, sub-indeks untuk transparansi dan akuntabilitas merupakan rata-rata tertimbang dari sepuluh indikator. Sub-indeks-sub-indeks itu kemudian dihitung reratanya untuk mendapatkan indeks ILEG, yang merupakan pengukuran keseluruhan akan kualitas tata kelola pendidikan di daerah. Nilai indeks dimulai dari 0 hingga 100 persen dengan nilai yang rendah menunjukkan bahwa komponen tata kelola utama yang mendorong kinerja pendidikan yang lebih baik belum berada pada tempatnya, sementara nilai yang tinggi menunjukkan bahwa komponen-komponen tersebut telah tersedia.

c. Temuan utama dari survei ILEG

Hasil survei menunjukkan bahwa daerah dengan tata kelola yang lebih baik cenderung memiliki masukan (*input*) pendidikan dengan kualitas yang lebih tinggi dan penyebaran yang lebih merata, dan kinerja pendidikan yang lebih baik

Hasil survei menunjukkan bahwa keputusan akan prioritas yang diberikan kepada pendidikan, kualitas masukan (*input*) yang diberikan dan penyebarannya cenderung lebih baik di kabupaten/kota dengan kualitas tata kelola yang lebih baik. Sebagai contoh, kabupaten/kota dengan nilai indeks ILEG yang lebih baik cenderung memiliki guru yang lebih berkualitas, dengan penyebaran yang lebih merata. Hasil-hasil itu tetap bertahan setelah faktor-faktor lain (seperti kemiskinan, usia kabupaten/kota dll) dikendalikan. Hasil realisasi sekunder juga memiliki keterkaitan positif dengan tingkat penerimaan murid dan nilai ujian. Misalnya, kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran yang lebih besar bagi pendidikan dan menerima lebih banyak guru berkualitas, misalnya, cenderung memiliki tingkat penerimaan murid dan nilai ujian yang lebih baik. Kesimpulan hasil-hasil itu menunjukkan bahwa tata kelola daerah yang lebih baik berhubungan dengan kinerja pendidikan yang lebih baik (Gambar 39).

**Gambar 39: Kualitas tata kelola pendidikan daerah yang lebih tinggi berkaitan dengan kinerja pendidikan yang lebih baik**  
(perkiraan nilai ujian SD dan SMP, sumbu-y, nilai pendidikan daerah yang berbeda, sumbu-x)

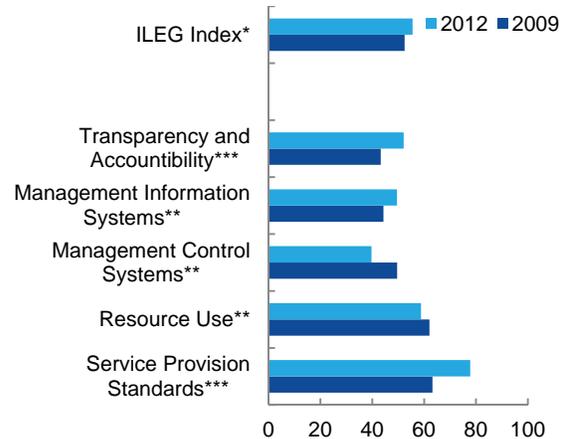


Catatan: Hasil yang disajikan menunjukkan perkiraan keterkaitan antara indeks ILEG dan hasil Ujian Nasional dengan pengendalian pada faktor-faktor lain yang dapat menentukan nilai ujian tingkat kabupaten/kota (seperti tingkat kemiskinan)

Tata kelola pendidikan daerah memang membaik, namun dengan laju yang lambat...

Tata kelola pendidikan telah meningkat dari tahun 2009 ke 2012, secara umum taraf peningkatannya masih kecil (Gambar 40). Indeks ILEG secara keseluruhan meningkat sebesar 3 poin persentase dan kualitas kualitas tata kelola pendidikan daerah tetap bertahan pada rentang tengah. Namun terdapat sejumlah pergeseran yang berarti dalam penyebaran kabupaten/kota-kabupaten/kota pada rentangan kinerja. Prosentase jumlah kabupaten/kota yang digolongkan memiliki kinerja tata kelola yang rendah (dengan nilai ILEG pada atau di bawah 45 persen) turun dari 28 persen menjadi 16 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah bergerak ke arah yang tepat, walaupun masih lambat.

**Gambar 40: Peningkatan kecil pada tata kelola pendidikan secara keseluruhan namun menunjukkan pergeseran yang besar pada beberapa dimensi**  
(nilai indeks tahun 2009 dan 2012, persen)



Catatan: Simbol asterik menunjukkan tingkat signifikansi statistika dari pengujian perbedaan antara indeks tahun 2009 dan 2012 - \*\*\* - signifikan pada tingkat 1 persen, \*\* - signifikan pada tingkat 5 persen, \* - signifikan pada tingkat 10 persen.

Sumber: Survei tata kelola pendidikan daerah Indonesia, tahun 2009 & 2012

...dan kelemahan dalam aspek-aspek utama tata kelola daerah masih ada

Kinerja lintas bidang-bidang tata kelola yang diukur oleh survei itu juga menunjukkan perbedaan yang besar. Pemerintah daerah menunjukkan kinerja yang baik dalam standar pemberian layanan pendidikan yang diukur oleh survei itu. Namun beberapa kabupaten/kota mendapat nilai yang rendah dalam efektivitas sistem pengendalian manajemennya dan hanya memperoleh hasil rata-rata untuk kualitas sistem informasi manajemennya serta di dalam proses-proses yang mereka miliki untuk mendorong pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel.

Terdapat sejumlah peningkatan kualitas sistem informasi manajemen pendidikan dan proses-proses untuk memperkuat transparansi...

Walau dengan kelemahan pada sistem informasi manajemen, dan dalam transparansi dan akuntabilitas, seperti ditemukan oleh survei itu, terdapat sejumlah kemajuan (Gambar 40). Dalam hal transparansi dan akuntabilitas, terdapat peningkatan-peningkatan dalam upaya pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan pengambilan keputusan dan pengawasan. Sebagai contoh, antara tahun 2009 dan 2012 proporsi kabupaten/kota yang memperkenankan partisipasi masyarakat di dalam sesi akuntabilitas dan pemeriksaan pelaporan parlementer meningkat dari 14 persen ke 52 persen. Namun pada tahun 2012, hanya setengah dari kabupaten/kota-kabupaten/kota yang disurvei memperkenankan akses masyarakat terhadap diskusi tentang anggaran dan pemeriksaan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

...namun kelemahan tetap ada, dengan hanya sepertiga kabupaten/kota yang memiliki sistem untuk mengumpulkan informasi secara akurat dan tepat waktu

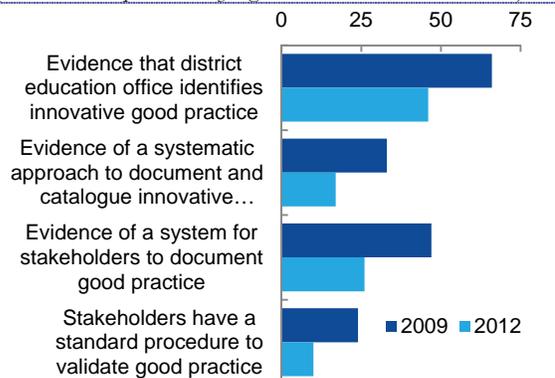
Informasi yang akurat dan tepat waktu sangatlah penting bagi perencanaan dan pemantauan sistem pendidikan daerah yang efektif. Pemerintah daerah mencatat sejumlah peningkatan kecil dalam bidang ini antara tahun 2009 dan 2012. Sebagai contoh, jumlah kantor pendidikan daerah yang memiliki prosedur dan protokol tertulis bagi pengumpulan dan pemeriksaan data sedikit meningkat pada tahun 2012 dibanding pada tahun 2009. Namun hanya sekitar sepertiga dari seluruh kabupaten/kota yang telah memiliki sistem itu pada tahun 2012. Hal ini merupakan faktor penyumbang bagi perbedaan yang besar di dalam variabel utama pendidikan kabupaten/kota ketika sumber-sumber data dibandingkan.

Kelemahan dalam hal pengelolaan dan penggunaan sumber daya oleh daerah tampaknya telah meningkat, terutama dengan dokumentasi inovasi dan praktik terbaik

Penurunan tingkat efektivitas sistem pengendalian manajemen umumnya disebabkan oleh penurunan jumlah kabupaten/kota yang secara sistematis mendokumentasikan dan melakukan sosialisasi contoh-contoh inovasi dan praktik terbaik. Sebagai contoh, pada tahun 2009 dua per tiga kabupaten/kota melakukan upaya identifikasi dan dokumentasi praktik terbaik sementara pada tahun 2012 jumlah ini telah merosot menjadi kurang dari setengah.

Komponen lain dalam dimensi tata kelola ini juga lemah. Pada tahun 2012, hanya 12 persen kabupaten/kota yang melakukan konsolidasi rencana pembangunan sekolah untuk digunakan dalam proses perencanaan pendidikan kabupaten/kotanya. Hal ini merintangangi upaya reformasi berbasis sekolah yang mendorong para sekolah untuk menyusun rencana pembangunan sekolah sebagai bagian dari proses perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up*) yang dirancang untuk mengaitkan sumber daya kabupaten/kota secara lebih erat dengan kebutuhan-kebutuhan yang terdapat pada sekolah-sekolah. Walau dengan kemunduran ini, sejumlah aspek pengendalian manajemen mencatat peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, sistem manajemen aset tampaknya telah menguat dan jumlah kabupaten/kota yang melakukan pemeriksaan persediaan tahunan dan menerbitkan peraturan daerah tentang manajemen aset telah meningkat.

**Gambar 41: Kapasitas daerah dalam mencatat dan melakukan sosialisasi praktik terbaik telah menurun**  
(prosentase kabupaten/kota yang disurvei, tahun 2009 dan 2012)



Sumber: Data survei tata kelola pendidikan daerah Indonesia, tahun 2009 dan 2012

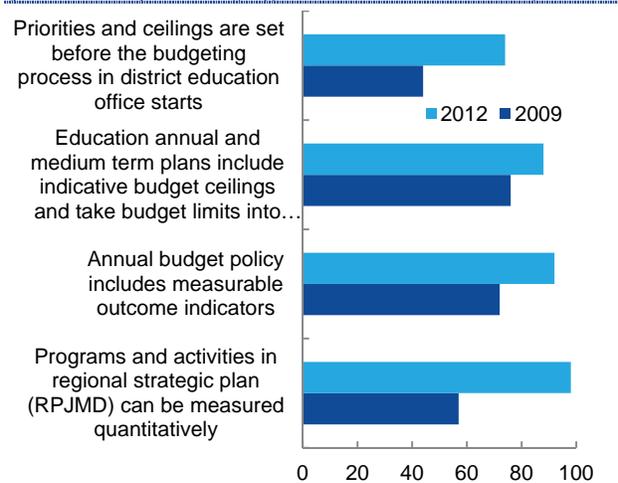
**Perbedaan antara rencana dan realisasi belanja menunjukkan kelemahan dalam penganggaran bagi pendidikan...**

Faktor-faktor yang mendasari penurunan dimensi tata kelola yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang efisien ternyata lebih rumit. Bidang tata kelola ini lebih dekat kaitannya dengan penilaian efektivitas dinas pendidikan kabupaten/kota dalam merencanakan, menganggarkan dan memantau penggunaan sumber daya pendidikan. Indikator efektivitas yang utama dalam bidang ini adalah perbedaan antara rencana dan realisasi belanja pendidikan. Indikator ini menurun dari tahun 2009 ke 2012; jumlah kabupaten/kota yang melaporkan perbedaan antara perencanaan dan realisasi belanja yang kurang dari 10 persen pada tiga tahun terakhir turun dari 46 persen ke 32 persen. Namun penyesuaian yang besar dalam perubahan anggaran sebagian disebabkan oleh perubahan di dalam transfer dari pemerintah pusat, yang berada di luar kendali pemerintah daerah.

**...namun indikator lain menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran daerah mulai membaik**

Walaupun sub-indeks penggunaan sumber daya yang efisien menurun antara tahun 2009 dan 2012, pemerintah daerah berhasil mencatat sejumlah peningkatan yang penting dalam proses-proses yang menentukan bagaimana sumber daya publik digunakan (Gambar 42). Sebagai contoh, proporsi kabupaten/kota yang menyertakan indikator realisasi yang dapat diukur di dalam anggaran tahunannya meningkat dari 72 persen ke 92 persen. Peningkatan dalam fungsi proses perencanaan dan penganggaran daerah juga telah menunjukkan kemajuan. Antara tahun 2009 dan 2012 proporsi kabupaten/kota yang menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebelum dinas-dinas teknis (seperti dinas pendidikan) memulai proses perencanaan mereka, meningkat dari 44 persen menjadi 74 persen. Peningkatan ini mencerminkan upaya-upaya terakhir oleh pemerintah pusat untuk memperkenalkan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka kerja belanja jangka menengah.

**Gambar 42: Sejumlah aspek proses perencanaan dan penganggaran daerah telah meningkat**  
(proporsitas kabupaten/kota yang disurvei, tahun 2009 dan 2012)



Sumber: Data survei tata kelola pendidikan daerah Indonesia, tahun 2009 dan 2012

**Kotak 6: Pengaruh dana hibah untuk pengembangan kapasitas yang diberikan kepada dinas pendidikan daerah**

Program *Basic Education Capacity* (BEC) memberikan dukungan bagi seluruh kabupaten/kota yang menjadi sampel survei ILEG melalui bantuan teknis dan pemberian dana hibah pengembangan kapasitas daerah sebesar 255.000 dolar AS. Sementara jumlah dana hibah itu relatif kecil (secara rata-rata kurang dari satu persen dari rata-rata belanja pendidikan tahunan), dana itu dirancang untuk memperkuat tata kelola pendidikan lokal dan meningkatkan kinerja pendidikan.

Sebelumnya diperkirakan bahwa pemerintah daerah akan menggunakan dana hibah pengembangan kapasitas itu untuk menangani bidang-bidang yang menjadi kelemahan, yang ditemukan oleh survei ILEG putaran pertama pada tahun 2009. Namun tampaknya bidang-bidang yang dinilai sebagai paling lemah menerima sumber daya hibah yang lebih rendah dibanding bidang-bidang yang paling kuat. Sebagai contoh, pada tahun 2009 kabupaten/kota-kabupaten/kota telah mencatat peringkat yang relatif tinggi dalam sub-indeks ILEG bagi standar pemberian layanan pendidikan. Walau telah memiliki peringkat yang tinggi, bidang ini ternyata menerima bagian terbesar dari sumber daya hibah BEC. Tidaklah mungkin untuk secara langsung mengaitkan perubahan dalam kualitas tata kelola pendidikan daerah yang dilaporkan oleh survei ILEG dari tahun 2009 hingga 2012 dengan upaya-upaya pengembangan kapasitas. Namun lemahnya penargetan sumber daya untuk pengembangan kapasitas tampaknya memainkan suatu bagian dalam gabungan peningkatan tata kelola yang dicatat oleh survei ILEG. Program-program yang mendukung pengembangan kapasitas yang akan datang harus disusun dengan menggunakan pengalaman yang didapat oleh program BEC, yang menunjukkan pentingnya dukungan dengan penargetan yang cermat, melintasi sektor-sektor tata kelola, dan menyesuaikan dukungan terhadap karakteristik setiap daerah.

## d. Tanpa penanganan kendala utama tata kelola, kinerja akan sulit meningkat

**Kinerja pendidikan kabupaten/kota tidak akan meningkat tanpa strategi untuk mengatasi kendala tata kelola utama**

Hasil survei ILEG menunjukkan pentingnya kualitas tata kelola daerah dalam meningkatkan kinerja pendidikan di daerah. Pada intinya, kinerja pendidikan daerah akan sulit meningkat tanpa adanya strategi-strategi untuk mengatasi kendala-kendala tata kelola utama yang disoroti pada bagian ini. Kemajuan yang dicatat dalam penguatan tata kelola pendidikan daerah pada empat tahun terakhir berjalan dengan lambat, walau dengan upaya-upaya untuk memperkuat kapasitas daerah. Tantangan-tantangan utama harus ditangani terlebih dahulu agar dapat meningkatkan tata kelola pendidikan di daerah.<sup>17</sup>

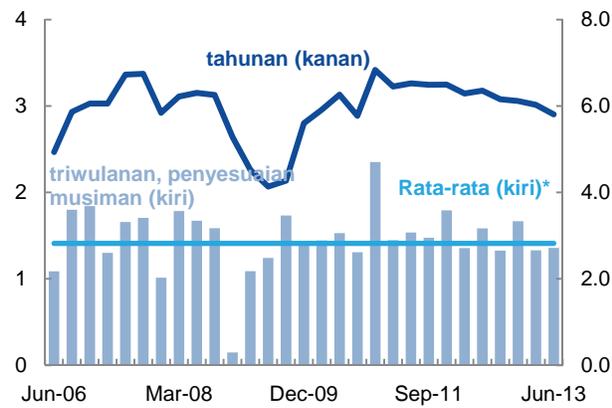
**Dibutuhkan koordinasi dan integrasi pendanaan pemerintah pusat yang lebih baik dalam perencanaan pendidikan di daerah**

Sementara penguatan tata kelola daerah merupakan hal yang penting untuk mendukung kemajuan berkelanjutan pada sektor pendidikan, penting juga untuk memahami bahwa transfer pemerintah pusat dan program-program sektor pendidikan di tingkat pusat membawa sejumlah tantangan kepada tata kelola pendidikan di daerah. Sistem transfer dari pemerintah pusat yang berlaku menyebabkan insentif bagi belanja gaji yang lebih tinggi, yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan yang mengakibatkan ketidakcocokan antara kebutuhan sekolah dan alokasi daerah. Sementara pemerintah daerah menanggung sebagian besar pendanaan bagi pendidikan dasar, pemerintah pusat masih memberikan kontribusi yang signifikan. Untuk menurunkan risiko bahwa program-program pemerintah pusat akan merintangai upaya-upaya daerah untuk meningkatkan pengelolaan dan tata kelola sektor pendidikan, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi dan integrasi antara program-program pemerintah pusat dan daerah. Termasuk didalamnya adalah upaya-upaya untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab dan terdapat kebutuhan yang jelas akan peningkatan upaya untuk menyertakan program-program pemerintah pusat ke dalam proses-proses perencanaan di daerah.

<sup>17</sup> Diskusi yang lebih lengkap mengenai masalah-masalah ini dapat dilihat pada penelitian Bank Dunia yang akan datang, *Local governance and education performance: A survey of local education governance in 50 Indonesian districts*.

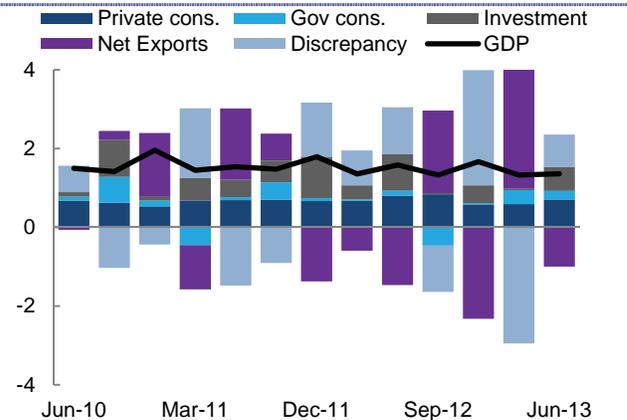
**LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA**

**Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB triwulanan dan tahunan**  
(pertumbuhan PDB riil, persen)



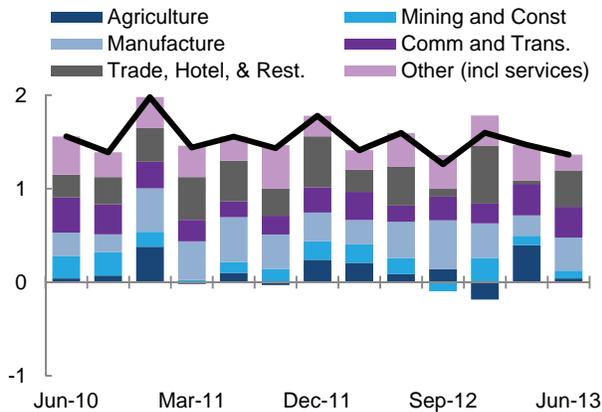
Catatan: \* Rata-rata pertumbuhan Tw-k-Tw pada Q1 2003 – Q1 2013  
Sumber: BPS; World Bank seasonal adjustment

**Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran**  
(kontribusi pertumbuhan PDB riil qoq, dengan penyesuaian musiman, persen)



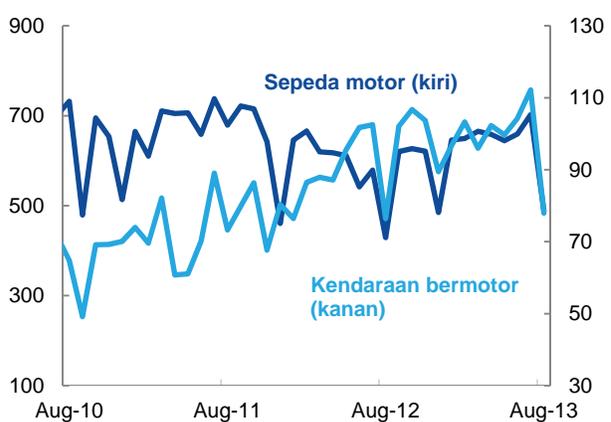
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi**  
(kontribusi pertumbuhan PDB riil qoq, dengan penyesuaian musiman, persen)



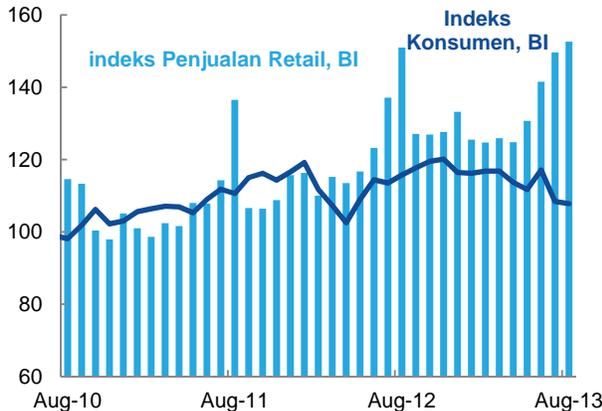
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Lampiran Gambar 4: Penjualan sepeda motor dan mobil**  
(penjualan bulanan, 000 unit)



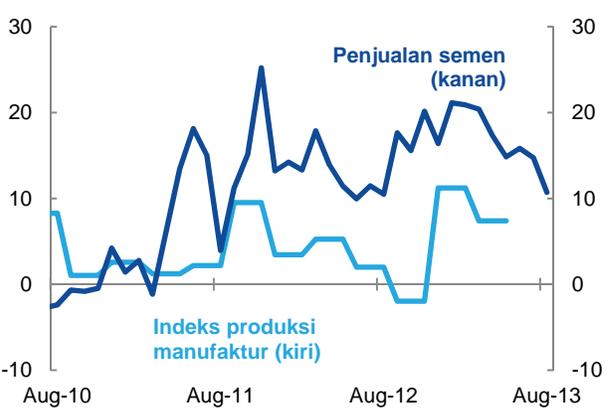
Sumber: CEIC

**Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen**  
(indeks)



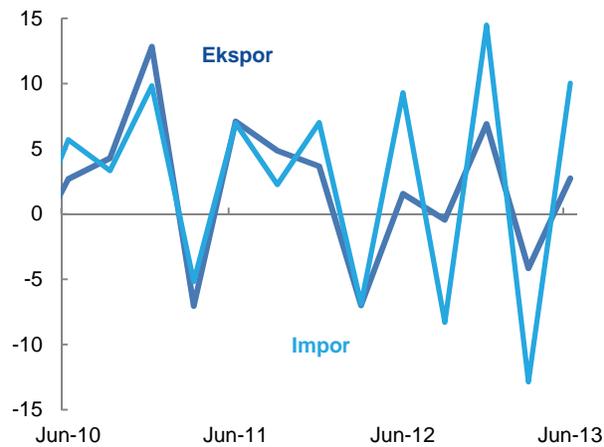
Sumber: BI

**Lampiran Gambar 6: Indikator industri penjualan**  
(rata-rata 3 bulan, pertumbuhan yoy, persen)



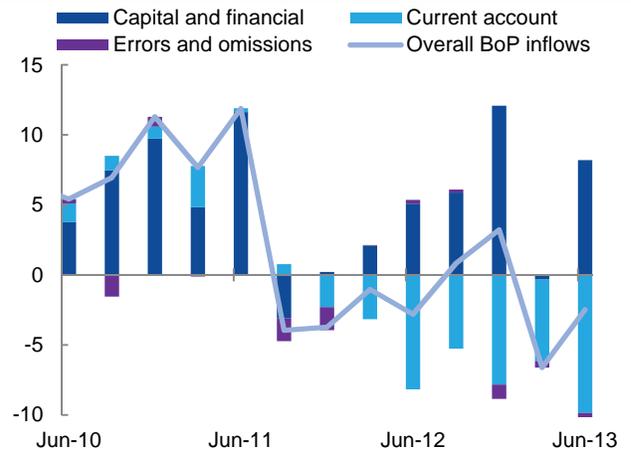
Sumber: CEIC

Lampiran Gambar 7: Arus perdagangan riil  
(pertumbuhan riil triwulanan, persen)



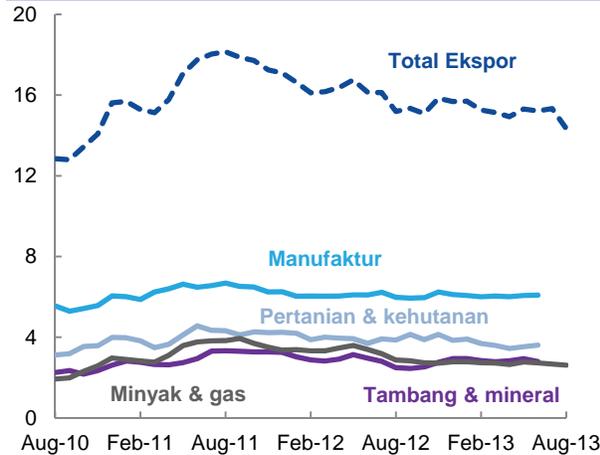
Sumber: BPS

Lampiran Gambar 8: Neraca pembayaran  
(miliar dolar AS)



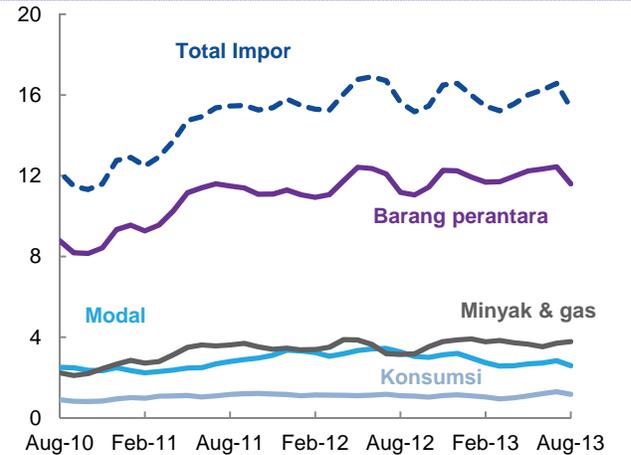
Sumber: BI

Lampiran Gambar 9: Ekspor barang  
(rata-rata 3 bulanan, miliar dolar AS)



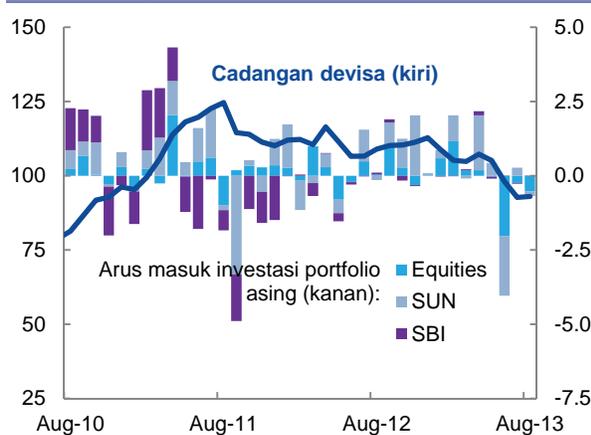
Sumber: BPS

Lampiran Gambar 10: Impor barang  
(rata-rata 3 bulanan, miliar dolar AS)



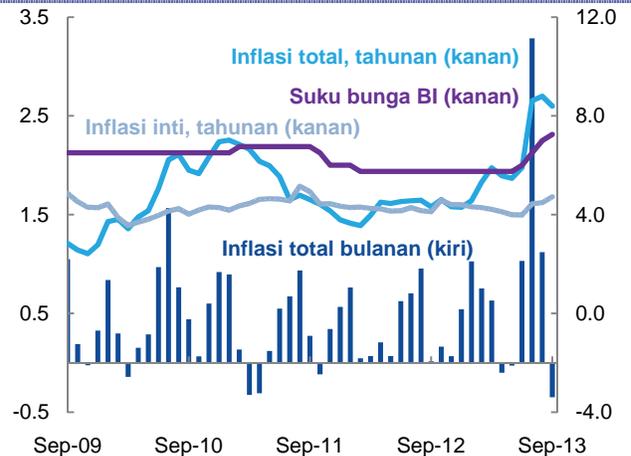
Sumber: BPS

Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus masuk modal  
(miliar dolar AS)



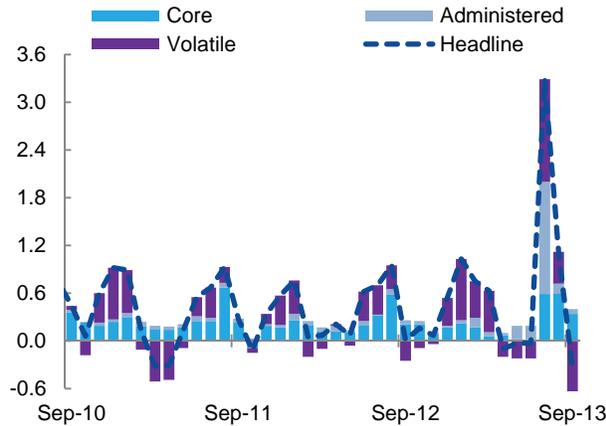
Sumber: BI; CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 12: Inflasi dan kebijakan moneter  
(pertumbuhan month-on-month dan yoy, persen)



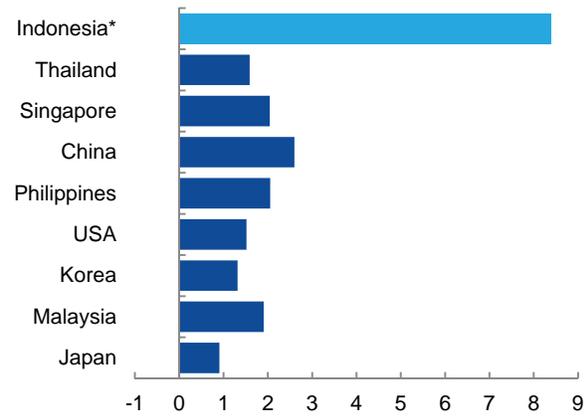
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 13: Rincian bulanan IHK  
(persen kontribusi terhadap pertumbuhan bulanan)



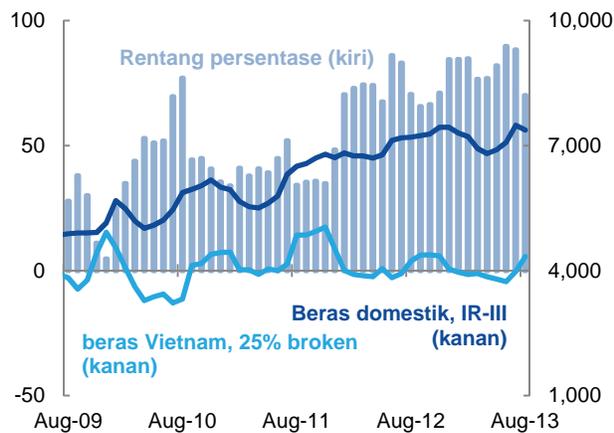
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara  
(yoy, Agustus 2013)



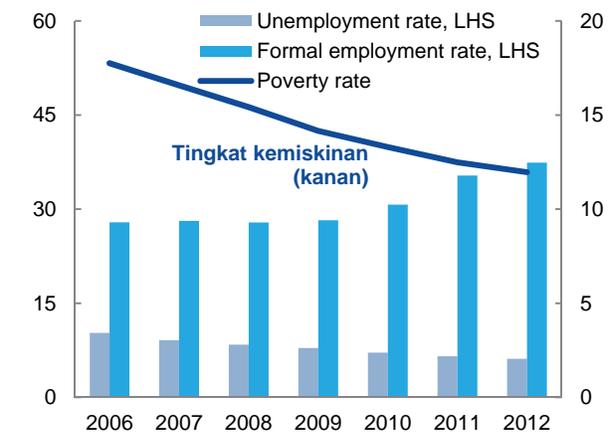
\*Angka inflasi September untuk Indonesia  
Sumber: Biro statistik nasional via CEIC; BPS

Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan internasional  
(persen kiri, harga partai besar, dalam rupiah per kg kanan)



Sumber: PIBC; FAO; Bank Dunia

Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran  
(persen)



Sumber: BPS

Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional  
(indeks barian September 2009=100)



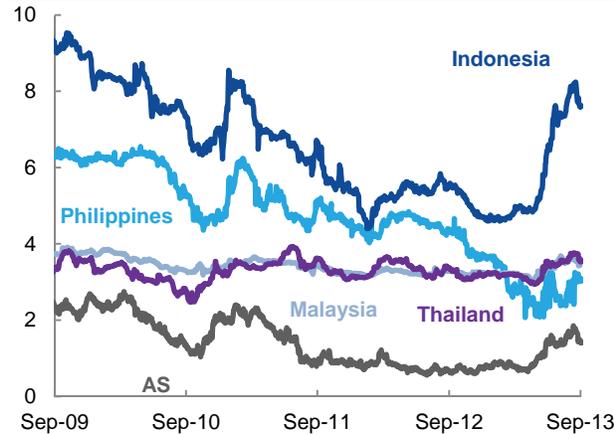
Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 18: Indeks dolar AS dan Nilai tukar rupiah  
(indeks barian, kiri dan rupiah/dolar AS, kanan)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal  
(harian, persen)



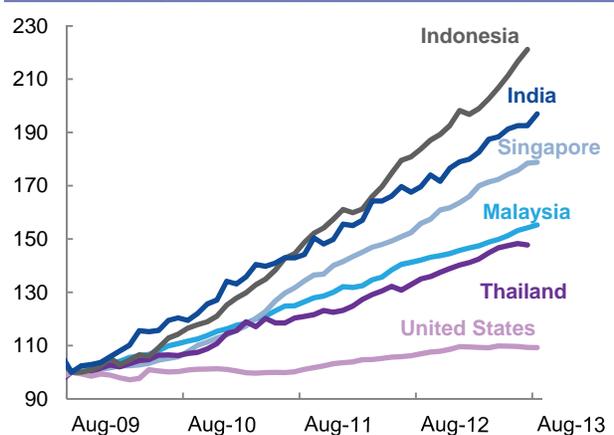
Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS pemerintah EMBI  
(harian, basis poin)



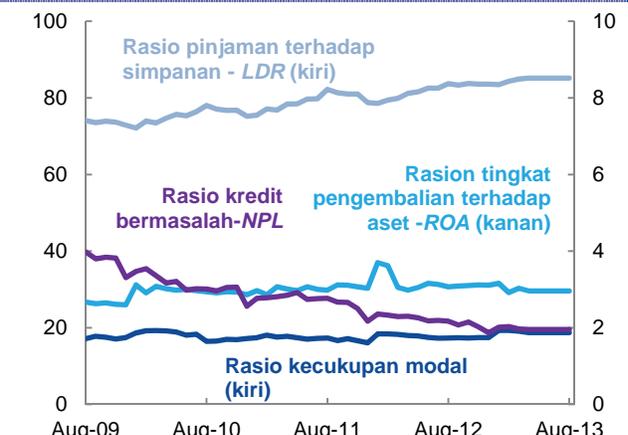
Sumber: JP Morgan; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 21: Pinjaman internasional perbankan komersial  
(bulanan, indeks Agustus 2009=100)



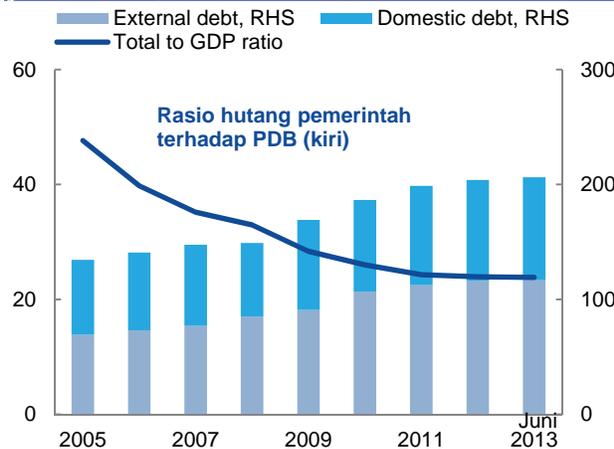
Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan  
(bulanan, persen)



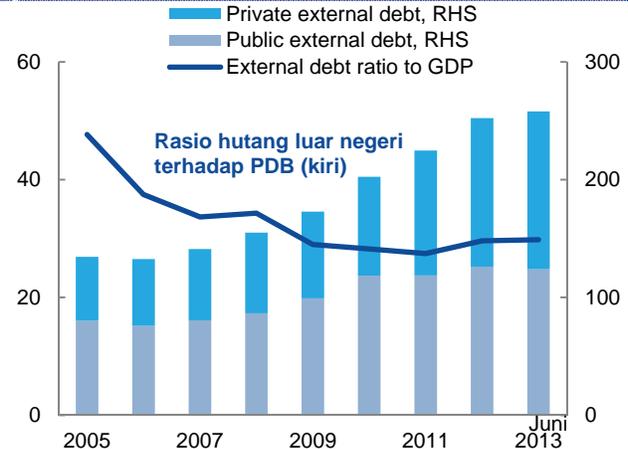
Sumber: BI

Lampiran Gambar 23: Hutang pemerintah  
(persentase terhadap PDB; miliar dolar AS)



Sumber: MoF; BI; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 24: Hutang luar negeri  
(persen terhadap PDB; miliar dolar AS)



Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Tabel 1: Realisasi dan anggaran belanja Pemerintah  
(IDR trillion)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBN	APBN-P
<b>A. Penerimaan negara &amp; hibah</b>	<b>849</b>	<b>995</b>	<b>1,211</b>	<b>1,338</b>	<b>1,502</b>	<b>1,663</b>
1. Penerimaan pajak	620	723	874	981	1,148	1,310
2. Penerimaan non-pajak	227	269	331	352	349	351
<b>B. Belanja</b>	<b>937</b>	<b>1,042</b>	<b>1,295</b>	<b>1,491</b>	<b>1,726</b>	<b>1,817</b>
1. Pemerintah pusat	629	697	884	1,011	1,197	1,230
2. transfer ke daerah	309	345	411	481	529	586
<b>C. Keseimbangan primer</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>9</b>	<b>-53</b>	<b>-112</b>	<b>-35</b>
<b>D. SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>-89</b>	<b>-47</b>	<b>-84</b>	<b>-153</b>	<b>-224</b>	<b>-154</b>
(persen terhadap PDB)	-1.6	-0.7	-1.1	-1.9	-2.4	-1.5

Sumber: Kementerian Keuangan

Lampiran Tabel 2: Neraca Pembayaran  
(miliar dolar AS)

	2010	2011	2012	2011		2012				2013	
				Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
<b>Neraca pembayaran</b>	<b>30.3</b>	<b>11.9</b>	<b>0.2</b>	<b>-4.0</b>	<b>-3.7</b>	<b>-1.0</b>	<b>-2.8</b>	<b>0.8</b>	<b>3.2</b>	<b>-6.6</b>	<b>-2.5</b>
<i>Persentase terhadap PDB</i>	4.3	1.4	0.0	-1.8	-1.7	-0.5	-1.3	0.4	1.5	-3.0	-1.1
<b>Neraca berjalan</b>	<b>5.1</b>	<b>1.7</b>	<b>-24.4</b>	<b>0.8</b>	<b>-2.3</b>	<b>-3.2</b>	<b>-8.2</b>	<b>-5.3</b>	<b>-7.8</b>	<b>-5.8</b>	<b>-9.8</b>
<i>Persentase terhadap PDB</i>	0.7	0.2	-2.8	0.3	-1.1	-1.5	-3.8	-2.4	-3.6	-2.6	-4.4
Neraca perdagangan	21.3	24.2	-1.7	7.1	3.5	1.8	-2.0	0.8	-2.4	-0.9	-3.7
Pendapatan bersih dan transfer	-16.2	-22.5	-22.7	-6.4	-5.8	-5.0	-6.2	-6.1	-5.4	-4.9	-6.2
<b>Neraca modal dan keuangan</b>	<b>26.6</b>	<b>13.6</b>	<b>25.1</b>	<b>-3.1</b>	<b>0.2</b>	<b>2.1</b>	<b>5.1</b>	<b>5.9</b>	<b>12.1</b>	<b>-0.3</b>	<b>8.2</b>
<i>Persentase terhadap PDB</i>	3.8	1.6	2.9	-1.4	0.1	1.0	2.3	2.6	5.5	-0.1	3.6
Investasi langsung	11.1	11.5	14.0	2.1	3.1	1.6	3.7	4.5	4.1	3.9	3.3
Investasi portofolio	13.2	3.8	9.2	-4.6	0.2	2.6	3.9	2.5	0.2	2.8	2.5
Investasi lainnya	2.3	-1.8	1.9	-0.7	-3.2	-2.1	-2.5	-1.2	7.7	-7.0	2.3
<b>Kesalahan &amp; penghapusan</b>	<b>-1.5</b>	<b>-3.4</b>	<b>-0.5</b>	<b>-1.6</b>	<b>-1.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.3</b>	<b>0.2</b>	<b>-1.0</b>	<b>-0.5</b>	<b>-0.8</b>
<b>Cadangan devisa*</b>	<b>96.2</b>	<b>110.1</b>	<b>112.8</b>	<b>114.5</b>	<b>110.1</b>	<b>110.5</b>	<b>106.5</b>	<b>110.2</b>	<b>112.8</b>	<b>104.8</b>	<b>98.1</b>

Catatan: \* Cadangan devisa pada akhir periode

Sumber: BI; BPS

Lampiran Tabel 3: Sekilas tentang perkembangan indikator ekonomi makro Indonesia

	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012
<b>Neraca nasional (% perubahan)<sup>1</sup></b>							
PDB riil	9.0	8.4	4.9	5.7	6.2	6.5	6.2
Investasi riil	25.3	22.6	11.4	10.9	8.5	8.8	9.8
Konsumsi riil	23.2	21.7	4.6	4.3	4.1	4.5	4.8
Swasta	23.9	22.7	3.7	0.9	4.7	4.7	5.3
Pemerintah	18.8	14.7	14.2	6.6	0.3	3.2	1.2
Ekspor riil, barang dan jasa	22.5	18.0	30.6	16.6	15.3	13.6	2.0
Impor riil, barang dan jasa	30.2	29.6	26.6	17.8	17.3	13.3	6.6
Investasi(% PDB)	28	28	20	24	32	32	33
PDB nominal (miliar dolar AS)	114	202	165	286	709	846	878
PDB per kapita (dolar AS)	636	1035	804	1,300	2,984	3,498	3,563
<b>Anggaran pemerintah pusat (% GDP)<sup>2</sup></b>							
Penerimaan dan hibah	18.8	15.2	20.8	17.8	15.5	16.3	16.2
Penerimaan bukan pajak	1.0	4.8	9.0	5.3	4.2	4.5	4.3
Penerimaan pajak	17.8	10.3	11.7	12.5	11.3	11.8	11.9
Pengeluaran	11.8	13.9	22.4	18.4	16.2	17.4	18.1
Konsumsi	..	3.9	4.0	3.0	3.8	4.0	4.1
Modal	..	4.6	2.6	1.2	1.3	1.6	1.8
Pembayaran bunga pinjaman	..	1.4	5.1	2.3	1.4	1.3	1.2
Subsidi	..	..	6.3	4.3	3.0	4.0	4.2
Surplus / defisit	0.4	1.3	-1.6	-0.6	-0.7	-1.1	-1.9
Hutang pemerintah	41.9	32.3	97.9	47.6	26.0	24.3	23.9
o/w Hutang luar negeri pemerintah	41.9	32.3	51.4	22.3	9.5	8.3	7.4
Total hutang luar negeri (termasuk sektor swasta)	61.0	61.5	87.1	47.7	28.2	27.5	29.6
<b>Neraca pembayaran (% PDB)<sup>3</sup></b>							
Neraca pembayaran keseluruhan	..	..	..	0.2	4.3	1.4	0.0
Neraca transaksi berjalan	-2.6	3.2	4.8	0.1	0.7	0.2	-2.8
Ekspor, barang dan jasa	25.6	26.2	42.8	35.0	24.7	26.2	24.1
Impor, barang dan jasa	24.0	26.9	33.9	32.0	21.6	23.3	24.3
Neraca perdagangan	1.6	-0.8	8.9	2.9	3.0	2.9	-0.2
Neraca transaksi keuangan	..	..	..	0.0	3.7	1.6	2.9
Investasi langsung bersih	1.0	2.2	-2.8	1.8	1.6	1.4	1.6
Cadangan devisa bruto (miliar dolar AS)	8.7	14.9	29.4	34.7	96.2	110.1	112.8
<b>Moneter (% perubahan)<sup>3</sup></b>							
Deflator PDB <sup>1</sup>	7.7	9.9	20.4	14.3	8.3	8.1	4.5
Suku bunga Bank Indonesia (%)	..	..	..	9.1	6.5	6.6	5.8
Kredit domestik	..	..	..	28.7	17.5	24.4	24.2
Nilai tukar nominal (rata-rata, rupiah/dolar AS) <sup>4</sup>	1,843	2,249	8,422	9,705	9,090	8,770	9,387
<b>Harga (% perubahan)<sup>1</sup></b>							
Indeks harga konsumen (akhir periode)	9.9	9.0	9.4	17.1	7.0	3.8	4.3
Indeks harga konsumen (rata-rata)	7.7	9.4	3.7	10.5	5.1	5.4	4.3
Inflasi keranjang kemiskinan (rata-rata)	..	..	..	10.8	8.7	8.2	6.5
Harga minyak mentah Indonesia (dolar AS per barrel) <sup>5</sup>	..	17	28	53	79	112	113

Sumber: 1 BPS dan perhitungan staf Bank Dunia; 2 Kementerian Keuangan dan perhitungan staf Bank Dunia (untuk 1995 menggunakan tahun dasar 1995/1996, untuk 2000 hanya 9 bulan); 3 Bank Indonesia; 4 IMF; 5 CEIC

Lampiran Tabel 4: Sekilas indikator pembangunan Indonesia

	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012
<b>Kependudukan<sup>1</sup></b>							
Penduduk (juta)	184	199	213	227	241	244	247
Tingkat pertumbuhan penduduk (%)	1.7	1.5	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2
Penduduk perkotaan (% terhadap total)	31	36	42	46	50	51	51
Rasio ketergantungan (% penduduk usia kerja)	67	61	55	54	53	53	52
<b>Angkatan kerja<sup>2</sup></b>							
Angkatan kerja, total (juta)	75	84	98	106	117	117	118
Laki-laki	46	54	60	68	72	72	73
Perempuan	29	31	38	38	45	45	45
Kontribusi tenaga kerja sektor pertanian (%)	55	43	45	44	38	36	35
Kontribusi tenaga kerja sektor industri (%)	14	19	17	19	19	21	22
Kontribusi tenaga kerja sektor jasa (%)	31	38	37	37	42	44	43
Tingkat pengangguran, total (% angkatan kerja)	2.5	7.0	8.1	11.2	7.1	6.6	6.1
<b>Kemiskinan dan distribusi pendapatan<sup>3</sup></b>							
Konsumsi rumah tangga, median (Rp.000)	..	..	104	211	374	421	446
Garis kemiskinan nasional (Rp.000)	..	..	73	129	212	234	249
Jumlah penduduk miskin (juta)	..	..	38	35	31	30	29
Penduduk miskin (% penduduk dibawah garis kemiskinan)	..	..	19	16	13	12	12
Di perkotaan	..	..	14.6	11.7	9.9	9.2	8.8
Di perdesaan	..	..	22.4	20.0	16.6	15.7	15.1
Laki-laki sebagai kepala rumah tangga	..	..	15.5	13.3	11.0	10.2	9.5
Perempuan sebagai kepala rumah tangga	..	..	12.6	12.8	9.5	9.7	8.8
GINI indeks	..	..	0.30	0.35	0.38	0.41	0.41
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok termiskin (%)	..	..	9.6	8.7	7.9	7.4	7.5
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok terkaya (%)	..	..	38.6	41.4	43.5	46.5	46.7
Pengeluaran publik untuk kesejahteraan masyarakat (% PDB) <sup>4</sup>	..	..	..	4.4	3.9	3.9	4.2
<b>Kesehatan dan gizi<sup>1</sup></b>							
Dokter (per 1,000 people)	0.14	0.16	0.16	0.13	0.29	..	0.20
Balita kurang gizi (% total anak usia dibawah 5)	..	27.4	24.8	24.4	18.6	..	..
Tingkat kematian balita (per 1000 anak usia dibawah 5 tahun) <sup>5</sup>	98	67	52	42	34	32	31.0
Tingkat kematian bayi lahir (per 1000 kelahiran hidup) <sup>5</sup>	27	26	22	19	16	15.5	15.0
Tingkat kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) <sup>5</sup>	67	51	41	34	28	26.7	25.8
Rasio kematian persalinan (perkiraan, per 100,000 kelahiran hidup)	600	420	340	270	220	..	..
Persalinan yang dibantu penolong kelahiran (% total kelahiran)	36	..	66	..	82	..	..
Imunisasi campak (% anak usia dibawah 1 tahun)	..	63	74	..	76	..	..
Total pengeluaran untuk kesehatan (% of GDP)	..	1.8	n.a	2.8	2.8	2.7	..
Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (% of GDP)	..	0.7	0.9	0.9	1.0	0.9	..
<b>Pendidikan<sup>3</sup></b>							
Angka partisipasi murni (APM) SD, (%)	..	..	..	92	92	92	93
APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	..	..	48	48	49	49
Angka partisipasi murni pendidikan tingkat menengah, (%)	..	..	..	52	61	60	60
APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	..	..	50	50	50	49
Angka partisipasi murni universitas/pendidikan tinggi, (%)	..	..	..	9	16	14	15
APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	..	..	55	53	50	54
Angka melek huruf dewasa (%)	..	..	..	91	91	91	92
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap PDB) <sup>4</sup>	..	..	..	2.7	3.4	3.5	3.5
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap APBN) <sup>4</sup>	..	..	..	14.5	19.7	19.8	18.9
<b>Air bersih dan sanitasi<sup>1</sup></b>							
Penduduk dengan akses air bersih (% total penduduk)	70	74	78	81	84	84	..
Di perkotaan (% penduduk perkotaan)	91	91	91	92	93	93	..
Di perdesaan (% penduduk perdesaan)	61	65	68	71	75	76	..
Penduduk dengan akses kesehatan lingkungan (% total penduduk)	32	38	44	53	58	59	..
Di perkotaan (% penduduk perkotaan)	56	60	64	70	73	73	..
Di perdesaan (% penduduk perdesaan)	21	26	30	38	43	44	..
<b>Lainnya<sup>1</sup></b>							
Pengurangan resiko bencana, penilaian (skala 1-5; 5=terbaik)	..	..	..	..	..	3.3	..
Proporsi perempuan yang duduk di parlemen (%) <sup>6</sup>	..	..	8	11	18	18.2	18.6

Sumber: 1 BPS dan perhitungan staf Bank Dunia; 2 Kementerian Keuangan dan perhitungan staf Bank Dunia (untuk 1995 menggunakan tahun dasar 1995/1996, untuk 2000 hanya 9 bulan); 3 Bank Indonesia; 4 IMF; 5 CEIC



Supported by funding from the Australian Government-AusAID, under the Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis (SEMEFPA) Program.